

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Sumedang perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tatacara Evaluasi Rancangan Perencanaan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
7. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau tercatat dalam kartu keluarga Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kabupaten.
11. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. keterpaduan;
- c. partisipatif;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. keterbukaan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan daerah bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB III RAD PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 5

RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan dokumen perencanaan dalam upaya percepatan pencapaian target Program Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dalam bentuk, arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 6

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Profil Kemiskinan Daerah;
- c. BAB III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. BAB IV Rencana Aksi Daerah; dan
- e. BAB V Penutup.

Pasal 7

RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pencapaian target Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang dilakukan TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
- (3) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara periodik.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 110

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 110 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan masih berada pada angka dua digit, angka ini masih berada jauh di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat sehingga dapat dikatakan bahwa dalam indikator kemiskinan Kabupaten Sumedang masih menjadi pemberat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada tingkat nasional, RPJMN tahun 2015-2019 secara tegas menetapkan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan. Sasaran ini kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi sekretariat nasional MDGs, salah satu tujuan yang tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan program MDGs masih menjadikan kemiskinan sebagai target utama pada tahun 2015-2030. Kemiskinan masuk dalam target pertama yaitu *no poverty*. Selain itu, beberapa target lain pun sangat relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan seperti target 2 yaitu *zero poverty*. Oleh karena itu maka kemiskinan pun masih menjadi agenda utama pada tingkat internasional.

Dokumen Rancangan Teknokratis (RT) RPJMD Provinsi Jawa Barat yang disusun sebagai persiapan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 memasukan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang harus dituntaskan pada agenda kerja lima tahun kedepan kepala daerah terpilih.

Visi yang diusung oleh KDH terpilih adalah Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023 yang dijabarkan dalam lima misi yaitu: (1) Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan; (3) Mengembangkan wilayah ekonomi

didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal; (4) Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; (5) Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sumedang, hal ini terlihat dari salah satu janji politiknya yaitu terbentuknya sebuah rumah besar penanganan fakir miskin/lansia serta peningkatan layanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan optimalisasi peran pemerintahan desa, RT/RW, DKM dan pondok pesantren. Rumah besar ini kemudian dinamakan dengan Rumah Besar Simpati.

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan ini adalah dokumen yang berisi analisis kondisi dan permasalahan kemiskinan serta rencana aksi yang disusun berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Penyusunan dokumen melibatkan seluruh stakeholder Kabupaten Sumedang melalui Focussed Group Discoussion (FGD) yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1.Maksud

Maksud penyusunan dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang tahun 2019-2023 adalah untuk menyusun dokumen perencanaan sektoral dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

1.2.2.Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang tahun 2019-2023 sebagai pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang mengacu kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tatacara Evaluasi Rancangan Perencanaan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 mengacu kepada Petunjuk Teknis Penyusunan yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Kemiskinan

Bab III : Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

BAB IV : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

BAB V : Penutup

BAB II

PROFIL KEMISKINAN

2.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan antara 107°01'45,63"-108°21'59,04" Bujur Timur, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha, Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Buahdua yaitu 10.768,28 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.770,74 Ha.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang
- Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh kawasan budidaya seluas 82.009,23 Ha (52,61 persen) serta sisanya dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 73.862,75 Ha (47,39 persen). Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu :

1. 0-8 persen, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan.
2. 8-15 persen, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya.
3. 15-25 persen, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68 persen. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat.
4. 25-40 persen, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur.

5. Lebih dari kemiringan 40 persen, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi sepanjang tahun 2017 di Kabupaten Sumedang terjadi pada bulan Januari 2017 yang mencapai 449 mm³ dengan jumlah hari hujan 20, dan terendah pada bulan Agustus yaitu 2 mm³.

Secara Administratif pada akhir tahun 2017 Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 Kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan. Jumlah Pemerintahan di Kabupaten Sumedang berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 7.365 Rukun Tetangga dan 2.078 Rukun Warga.

Tabel 2-1 Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Jatinangor	2.562	12
2	Cimanggung	4.298	11
3	Tanjungsari	4.319	12
4	Sukasari	3.899	7
5	Pamulihan	5.367	11
6	Rancakalong	5.596	10
7	Sumedang Selatan	9.659	10/4
8	Sumedang Utara	3.132	10/3
9	Ganeas	2.525	8
10	Situraja	4.934	14
11	Cisitu	6.398	10
12	Darmaraja	5.403	16
13	Cibugel	4.999	7
14	Wado	7.334	11
15	Jatinunggal	6.311	9
16	Jatigede	11.392	12
17	Tomo	8.324	10
18	Ujungjaya	8.738	9
19	Conggeang	11.220	12
20	Paseh	3.382	10
21	Cimalaka	4.755	14
22	Cisarua	1.450	7
23	Tanjungkerta	4.393	12
24	Tanjungmedar	6.688	9
25	Buahdua	11.149	14
26	Surian	7.645	9

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011-2031

Daerah yang berpotensi terjadi bencana alam harus menjadi perhatian pada agenda penanggulangan kemiskinan. Adanya bencana dapat menyeret individu atau rumah tangga menjadi masyarakat miskin. Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung dan gempa bumi. Kejadian gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai-sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Jatinangor.

Tabel 2-2 Kawasan Rawan Bencana

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Gerakan Tanah	Tersebar di sebagian wilayah kabupaten	Luas kurang lebih 21.612 Ha
2	Banjir	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Ujungjaya; d. Kecamatan Tomo; e. Kecamatan Sumedang Utara; dan f. Kecamatan Sumedang Selatan.	-
3	Puting Beliung	a. Kecamatan Cimanggung; b. Kecamatan Cimalaka; c. Kecamatan Cisarua; d. Kecamatan Ujungjaya; dan e. Kecamatan Wado.	-
4	Gempa Bumi	a. Kecamatan Jatinangor; b. Kecamatan Cimanggung; c. Kecamatan Pamulihan; d. Kecamatan Tanjungsari; e. Kecamatan Sukasari; f. Kecamatan Rancakalong; g. Kecamatan Sumedang Utara; h. Kecamatan Sumedang Selatan; i. Kecamatan Ganeas; j. Kecamatan Cisarua; k. Kecamatan Cimalaka; l. Kecamatan Paseh; m. Kecamatan Tanjungkerta; n. Kecamatan Tanjungmedar; o. Kecamatan Situraja; p. Kecamatan Cisitua; q. Kecamatan Darmaraja; r. Kecamatan Wado; s. Kecamatan Jatinunggal;	-

No	Kawasan Bencana	Lokasi	Keterangan
		t. Kecamatan Jatigede; u. Kecamatan Tomo; v. Kecamatan Ujungjaya; w. Kecamatan Conggeang; x. Kecamatan Buahdua; dan y. Kecamatan Surian.	

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), Tataguna Lahan, Morfologi dan kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di sekitar Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Conggeang dan Rancakalong sedangkan yang di bagian timur terutama yang berada pada jalur sesar berada di Tomo, Jatigede, Darmaraja dan Jatinunggal.

2.2. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.146.435 jiwa dengan proporsi 570.808 penduduk laki-laki dan 575.627 penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2017 sebesar 99,16. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang

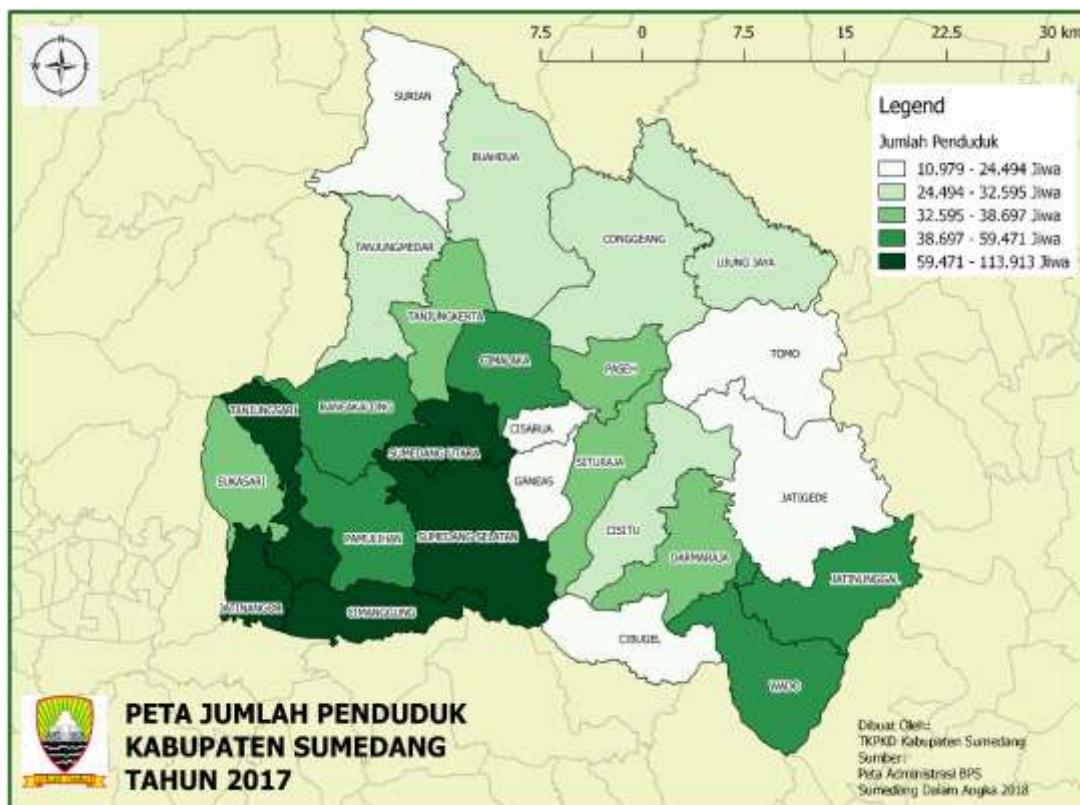
No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	Jatinangor	57.736	56.177	113.913	102,78
2	Cimanggung	42.477	41.013	83.490	103,57
3	Tanjungsari	41.420	39.458	80.878	104,97
4	Sukasari	17.390	16.345	33.735	106,39
5	Pamulihan	27.728	31.743	59.471	87,35
6	Rancakalong	19.627	19.467	39.094	100,82
7	Sumedang Selatan	39.395	38.098	77.493	103,40
8	Sumedang Utara	45.138	51.856	96.994	87,04
9	Ganeas	12.462	12.032	24.494	103,57
10	Situraja	19.210	19.487	38.697	98,58
11	Cisitu	13.441	13.583	27.024	98,95
12	Darmaraja	18.575	19.142	37.717	97,04
13	Cibugel	10.699	10.714	21.413	99,86

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
14	Wado	22.517	21.879	44.396	102,92
15	Jatinunggal	21.273	21.596	42.869	98,50
16	Jatigede	11.602	12.448	24.050	93,20
17	Tomo	11.284	11.791	23.075	95,70
18	Ujung Jaya	14.660	15.010	29.670	97,67
19	Conggeang	14.320	14.780	29.100	96,89
20	Paseh	18.429	18.390	36.819	100,21
21	Cimalaka	30.005	29.330	59.335	102,30
22	Cisarua	9.719	9.653	19.372	100,68
23	Tanjungkerta	17.461	17.329	34.790	100,76
24	Tanjungmedar	12.704	12.268	24.972	103,55
25	Buahdua	16.019	16.576	32.595	96,64
26	Surian	5.517	5.462	10.979	101,01
TOTAL		570.808	575.627	1.146.435	99,16

Sumber: Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2018 (BPS)

Dalam kurun waktu 2010-2017 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang adalah sebesar 4,07%. Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 berjumlah 1.142.097 atau dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2017 adalah sebesar 0,38%.

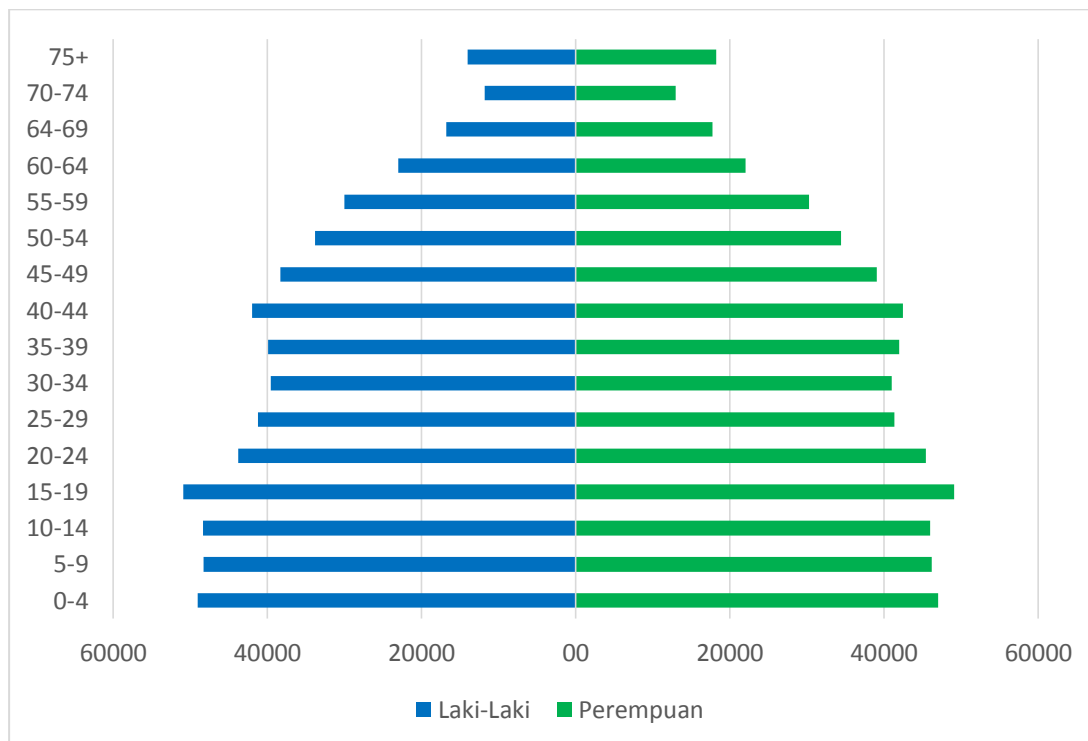
Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2017 mencapai 753 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatinangor dengan kepadatan sebesar 4.348 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Jatigede sebesar 215 jiwa/km².



Gambar 2- 1 Peta Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang

Piramida penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan data BPS seperti yang terlihat pada Grafik diatas, dimana penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan. Dari segi ekonomi, kondisi yang perlu diperhatikan adalah komposisi penduduk usia non-produktif yaitu usia 0-14 dan usia 65 tahun keatas secara ekonomi biasanya tergantung pada penduduk produktif yaitu usia 15-64 tahun. Pada Grafik terlihat bahwa Kabupaten Sumedang mempunyai rasio ketergantungan sebesar 48,90 yang artinya setiap 100 penduduk produktif di Kabupaten Sumedang menanggung sekitar 49 orang penduduk non produktif.

Jika dilihat tingkat pendidikan penduduk terahir Kabupaten sumedang tahun 2017 pada umur 15 tahun keatas terlihat masih ada kesenjangan tingkat pendidikan terakhir penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dimana penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebesar 107.036 Jiwa, diposisi kedua dan ketiga ditempati tamatan Diploma dan Universitas dengan jumlah penduduk yang bekerja masing-masing sebesar 72.217 jiwa dan 51.440 jiwa. Posisi terendah di isi oleh tamatan Sekolah Dasar dengan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.010 jiwa.



Sumber: Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2018 (BPS)

Gambar 2-2 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang

Bila dilihat berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2017, terlihat bahwa sebagian besar penduduk (24,89%) bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan, sebanyak 20,12% penduduk bekerja pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan masing-masing sebesar 0,52% dan 8,06% dan sisanya bekerja pada sektor lain.

2.3. Kondisi Perekonomian

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Sumedang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang baik dimana nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB) terus menunjukkan peningkatan.

Tabel 2-4 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kabupaten Sumedang menurut Lapangan Usaha

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK	17.194.506	18.004.694	18.950.356	20.029.717	21.276.696
PRDB ADHB	20.260.541	22.345.410	24.834.253	27.012.007	29.638.762

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang

Pada tahun 2013, nilai PDRB ADHK Kabupaten Sumedang tercatat sebesar Rp 17,20 Trilyun kemudian terus tumbuh hingga menjadi Rp 21,28 Trilyun pada tahun 2017. Demikian halnya dengan PDRB ADHB pada tahun 2013 bernilai Rp 20,26 Trilyun kemudian naik terus hingga mencapai Rp 29,64 Trilyun pada tahun 2017.

Struktur perekonomian Kabupaten Sumedang yang digambarkan oleh distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa kontribusi nilai tertinggi PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan lapangan usaha Konstruksi. Masing-masing sebesar 20,33 %, 18,36 %, 15,90 dan 10,19 %, Sedangkan kontribusi terkecil diberikan oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,02 %.

Tabel 2-5 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sumedang menurut Lapangan Usaha

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,55	21,70	20,65	20,35	20,33	21,12
Pertambangan dan Penggalan	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,10
Industri Pengolahan	18,27	18,88	18,49	18,63	18,36	18,52
Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,31	0,32	0,36	0,42	0,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Konstruksi	9,25	9,30	10,16	10,08	10,19	9,80
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,63	17,08	16,45	16,07	15,90	16,63
Transportasi dan Pergudangan	4,52	4,72	5,25	5,33	5,29	5,02

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,27	4,38	4,31	4,48	4,49	4,38
Informasi dan Komunikasi	2,65	2,77	2,91	3,06	3,13	2,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,06	4,07	4,14	4,36	4,53	4,23
Real Estate	1,64	1,59	1,61	1,57	1,60	1,60
Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,11	6,81	6,84	6,65	6,35	6,75
Jasa Pendidikan	5,10	5,56	5,92	6,04	6,30	5,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,02	1,08	1,10	1,12	1,04
Jasa Lainnya	1,55	1,61	1,67	1,72	1,79	1,67
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau LPE Kabupaten Sumedang tahun 2017 yaitu sebesar 6,23 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2016 dimana laju pertumbuhan PDRB nya sebesar 5,70 persen. Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi tahun 2017 yaitu sektor informasi dan komunikasi yaitu 14,62% diikuti oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan 11,26% dan sektor Jasa Pendidikan dengan 11,02%.

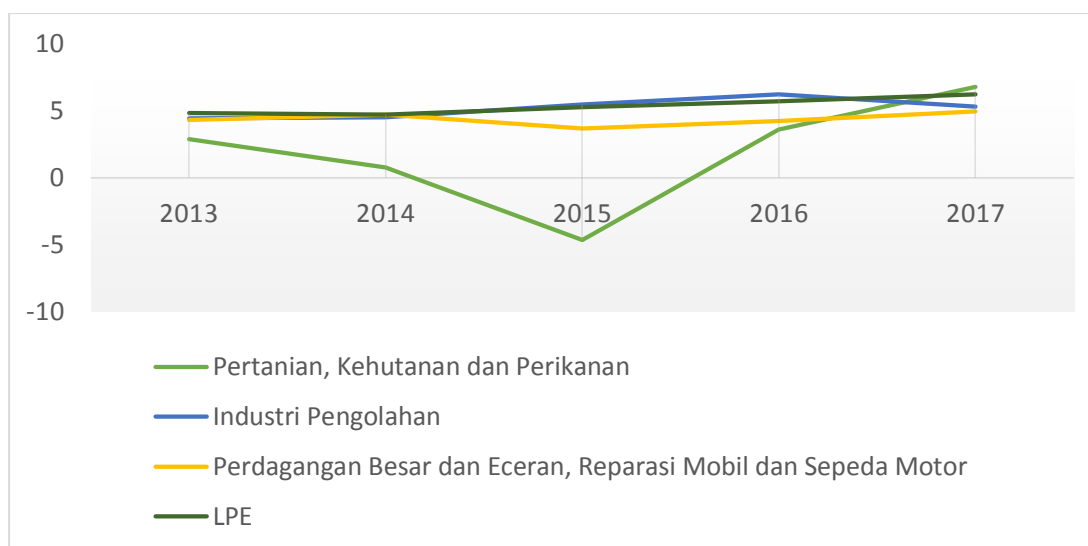
Tabel 2-6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sumedang menurut Lapangan Usaha

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	0,74	-4,67	3,60	6,79	1,86
Pertambangan dan Penggalian	2,85	2,16	0,86	-0,39	0,17	1,13
Industri Pengolahan	4,44	4,49	5,46	6,21	5,29	5,18
Pengadaan Listrik dan Gas	6,72	7,89	-0,21	6,63	10,92	6,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,25	3,36	2,88	6,25	0,12	3,17
Konstruksi	6,38	3,87	15,46	6,40	7,83	7,99
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,31	4,70	3,67	4,23	4,94	4,37
Transportasi dan Pergudangan	5,32	5,34	8,16	5,97	5,64	6,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	6,74	5,30	7,50	6,04	6,11
Informasi dan Komunikasi	11,89	19,11	17,98	14,01	10,12	14,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,86	4,43	8,53	9,26	6,82	8,18
Real Estate	5,72	5,39	9,22	4,89	9,73	6,99
Jasa Perusahaan	6,76	5,84	7,22	6,82	8,52	7,03
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,88	-2,68	4,23	2,82	0,88	0,67
Jasa Pendidikan	11,49	15,65	12,90	6,86	8,19	11,02

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,57	21,65	10,79	7,49	8,80	11,26
Jasa Lainnya	7,53	10,51	9,66	6,08	5,54	7,87
PDRB	4,84	4,71	5,25	5,70	6,23	5,35

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang menunjukkan fluktuasi, namun mengalami percepatan pada periode 2014-2016 namun melambat pada tahun 2017.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-3 LPE dan Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Besar Kabupaten Sumedang

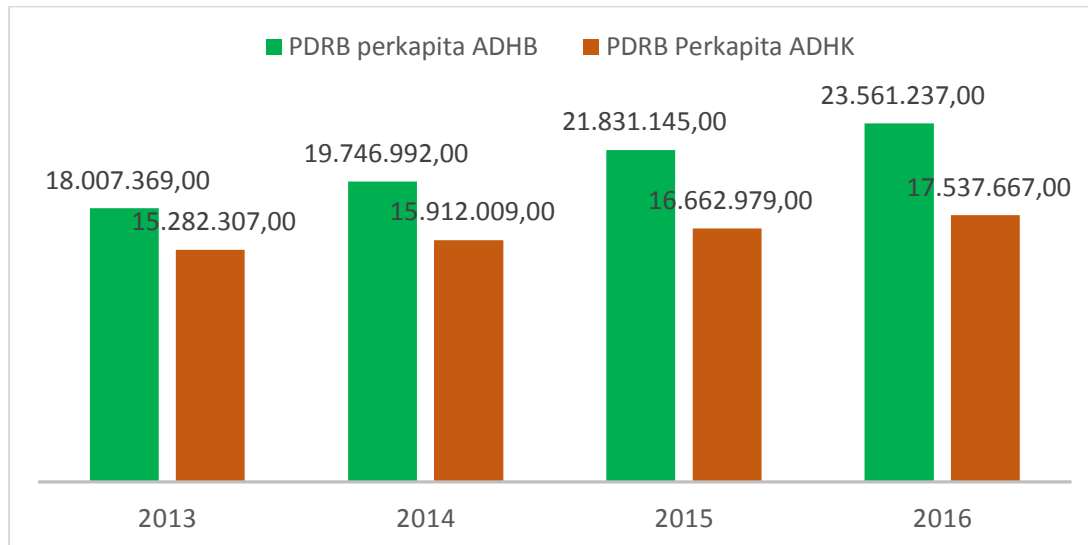
Gambar di atas menunjukkan LPE Kabupaten Sumedang dan laju pertumbuhan tiga sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian yaitu pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Dari gambar di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan relatif stabil dan relevan dengan kondisi LPE Kabupaten Sumedang namun sektor pertanian menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi namun menunjukkan tren yang meningkat pada tiga tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat melihat pertumbuhan sektor-sektor tersier sebagai potensi perekonomian yang dapat ditingkatkan dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Meskipun demikian sektor-sektor besar yang menyerap tenaga kerja yang besar harus terus dikembangkan.

2.3.2.PDRB per Kapita

Pada Tahun 2016, PDRB per kapita (adhb) Kabupaten Sumedang mencapai Rp. 23.651.2.37 atau meningkat 8,34 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bila dilihat selama lima tahun terkahir (Tahun 2012- 2016) PDRB perkapita (adhb) mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Sumedang dari tahun ke tahun semakin baik. Walaupun demikian,

peningkatan PDRB per kapita di atas masih belum menggambarkan secara riil peningkatan daya beli masyarakat Sumedang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang

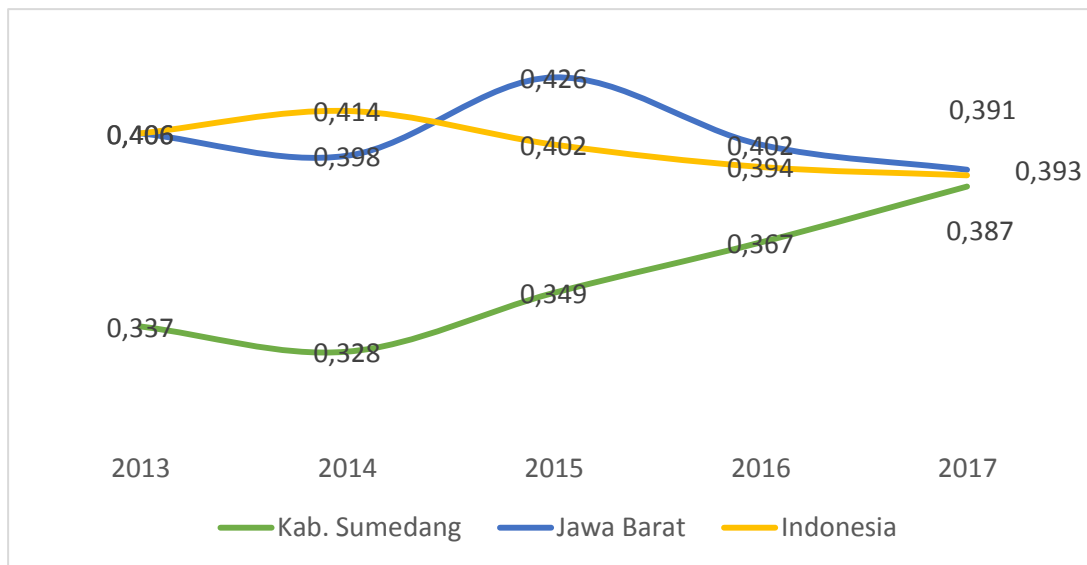
Gambar 2-4 PDRB Perkapita Kabupaten Sumedang

Dari Gambar dapat diamati bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2016 sebesar Rp.17,54 juta atau mengalami kenaikan sebesar 5,25% dibandingkan Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.16,66 juta.

2.3.3. Distribusi Pendapatan

Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang bersifat inklusif atau bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan lebih merata. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah indeks gini.

Ketimpangan distribusi pendapatan dalam indeks gini diukur oleh angka indeks yang berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nol maka tingkat ketimpangan semakin rendah, dan sebaliknya semakin mendekati satu maka distribusi pendapatan masyarakat semakin timpang. Secara spesifik kriteria ketimpangan menurut indeks gini, yaitu: (1) di bawah 0,4 terkategori ketimpangan rendah; (2) antara 0,4 dan 0,5 terkategori ketimpangan moderat; dan (3) di atas 0,5 terkategori ketimpangan tinggi.



Sumber: BPS

Gambar 2-5 Perkembangan Indeks Gini Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia

Indeks Gini Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan pada empat tahun terakhir, meskipun demikian indeks gini Kabupaten Sumedang masih masuk dalam kategori moderat dan masih berada di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kenaikan angka indeks ini mencerminkan bahwa ada peningkatan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumedang.

2.3.4. Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pembangunan gender (IPG) terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, IPG Kabupaten Sumedang mengalami tren peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2- 7 Capaian Indikator Gender Kabupaten Sumedang

No	Indikator Gender	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	IPG	67,24	67,47	83,77	94,36	94,37
2	IDG	65,14	62,91	64,82	72,32	68,69

Sumber: BPS

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Keterlibatan perempuan dalam suatu pembangunan yang diukur menggunakan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 2011-2015 mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2011 tercatat 65,14, kemudian meningkat menjadi 72,32 di tahun 2014, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 68,69.

2.4. Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur melalui berbagai konsep, di Indonesia BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

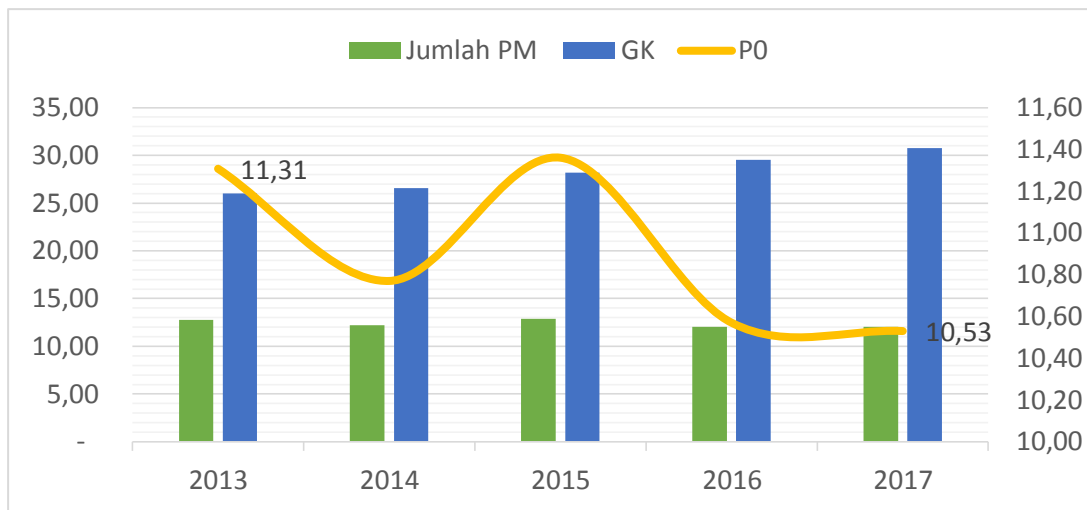
Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Konsep kemiskinan yang dijelaskan di atas dapat disebut sebagai kemiskinan dari sisi konsumsi, namun ada juga konsep kemiskinan yang diukur dari segi yang lain yang dikenal dengan kemiskinan multi dimensi (*multidimensional poverty index-MPI*). MPI dikembangkan awalnya oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI) yang merupakan lembaga riset di Oxford University. Berbeda dengan pendekatan pengukuran kemiskinan lainnya, MPI melihat potret kemiskinan dari banyak dimensi (multidimensi).

MPI melihat dari tiga dimensi utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Pendidikan diukur melalui dua dimensi yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Kesehatan diukur melalui dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Sedangkan kualitas hidup diukur melalui enam indikator yaitu: (1) air; (2) sanitasi; (3) listrik; (4) lantai rumah; (5) bahan bakar untuk memasak; dan (6) kepemilikan asset.

2.4.1. Kemiskinan Makro Konsumsi

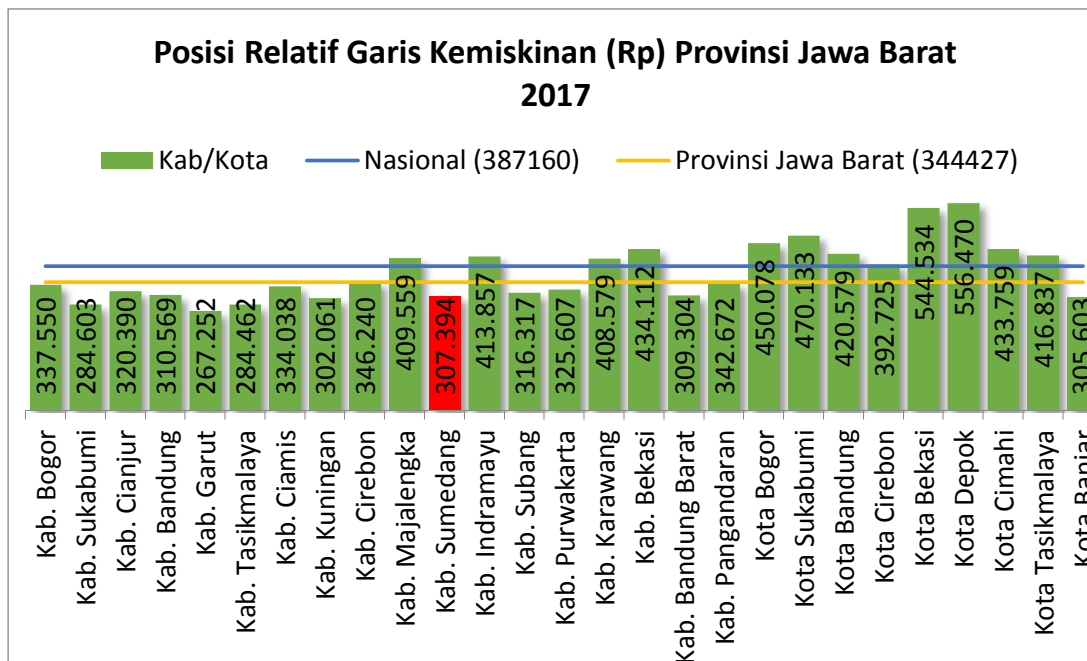
Kemiskinan makro konsumsi diukur melalui konsep pemenuhan atas kebutuhan dasar dan akan sangat terkait dengan garis kemiskinan (GK). Berikut ini perkembangan kondisi kemiskinan Kabupaten Sumedang dari jumlah, garis kemiskinan dan persentasen penduduk miskin.



Sumber: BPS

Gambar 2-6 Perkembangan GK Kabupaten Sumedang

Gambar di atas menunjukkan adanya standar dalam penentuan penduduk miskin di Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2013 penduduk dikatakan miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Rp 260.160 namun pada tahun 2017 naik menjadi Rp 307.394. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumedang menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 127.400 orang kemudian menurun menjadi 122.000 pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 berada pada angka 120.630 orang. Persentase penduduk miskin terlihat berfluktuasi melalui diagram garis pada gambar di atas, terlihat meningkat pada tahun 2015 dan kembali menurun pada dua tahun setelahnya.



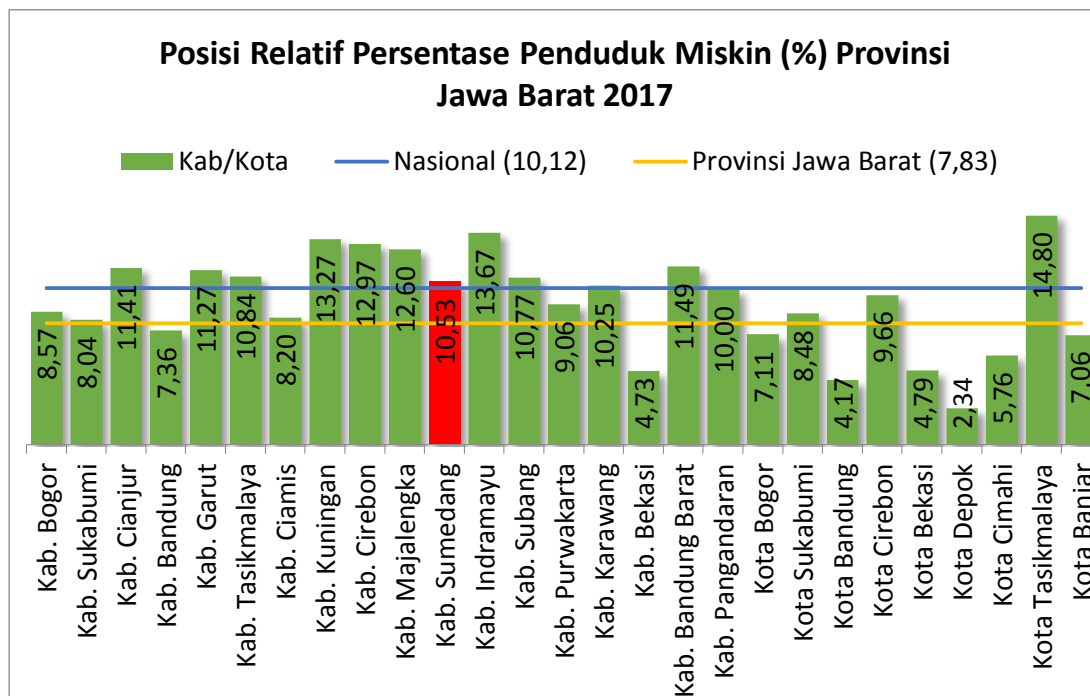
Sumber: BPS

Gambar 2-7 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Sumedang

Secara posisi, GK Kabupaten Sumedang tahun 2017 berada di bawah GK Provinsi Jawa Barat maupun nasional, Kabupaten Sumedang menempati peringkat ke-6 dengan GK terendah di Jawa Barat sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Garut dengan 267.252 per kapita per bulan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk menjadi penduduk miskin di Kabupaten Sumedang lebih

tinggi dibandingkan di Kabupaten Garut. Penduduk miskin di Sumedang belum tentu menjadi penduduk miskin bila tinggal di Kabupaten Garut.

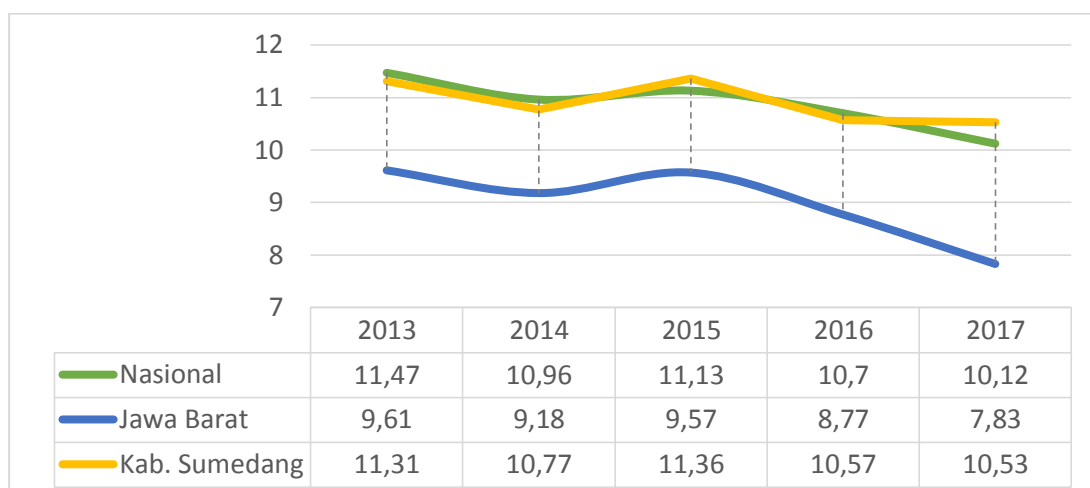
Secara persentase, persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang masih masuk dalam dua digit yaitu sebesar 10,53% pada tahun 2017. Angka ini menempatkan Kabupaten Sumedang di atas nilai persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat (7,83%) dan Nasional (10,12%). pada tahun 2017 terhadap total kemiskinan di Propinsi Jawa Barat berada pada posisi 11 dari persentase penduduk miskin diantara 27 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-8 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang

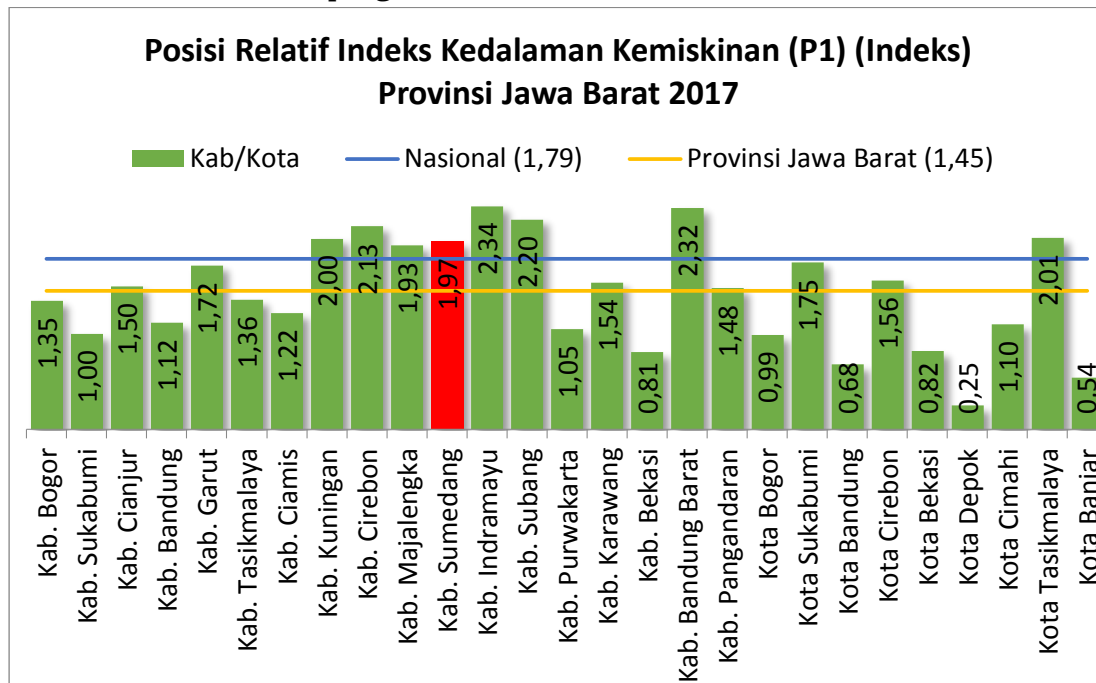
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang dalam grafik diatas menunjukkan trend penurunan dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang sebesar 11,31% dan terus mengalami penurunan menjadi 10,53% pada tahun 2017.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-9 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Sumedang, Jawa Barat dan Nasional

Selain indikator-indikator di atas, kemiskinan dapat diukur melalui indikator lain yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

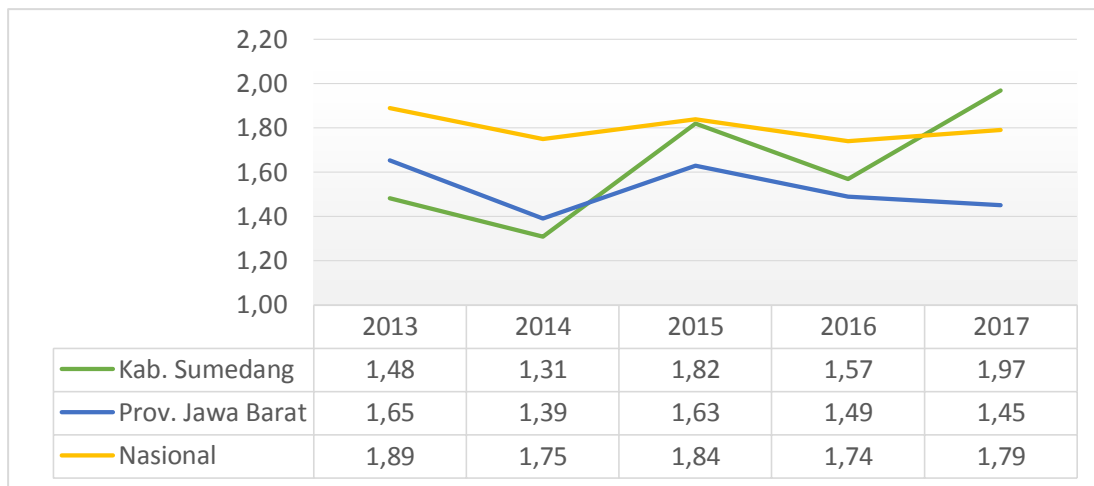


Sumber: BPS

Gambar 2-10 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumedang

Pada tahun 2017, nilai P1 Kabupaten Sumedang sebesar 1,97 poin angka ini melampaui angka Provinsi Jawa Barat (1,45 poin) dan Nasional (1,79 poin), dan secara posisi menempatkan Kabupaten Sumedang pada peringkat ke-7 dengan P1 tertinggi di Jawa Barat, peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Bandung Barat dengan 2,32 poin.

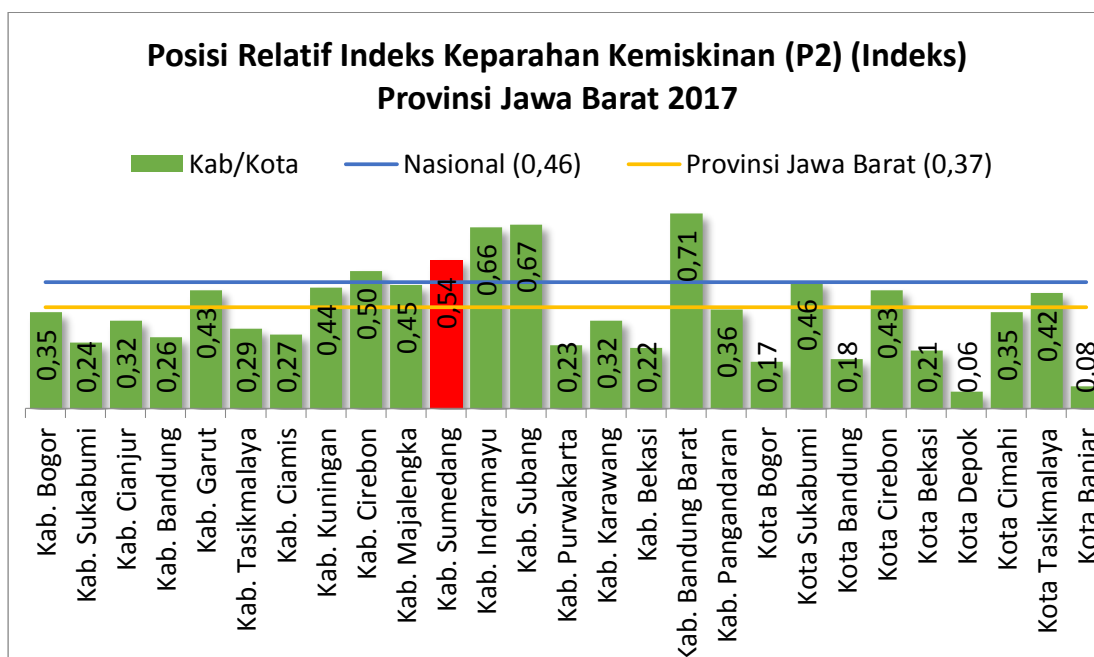
Nilai capaian P1 Kabupaten Sumedang menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, tren cenderung menunjukkan peningkatan terutama pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2014 nilai P1 Kabupaten Sumedang sebesar 1,31 poin kemudian meningkat menjadi 1,82 poin dan pada tahun 2017 menjadi 1,97 poin.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-11 Perkembangan P1 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

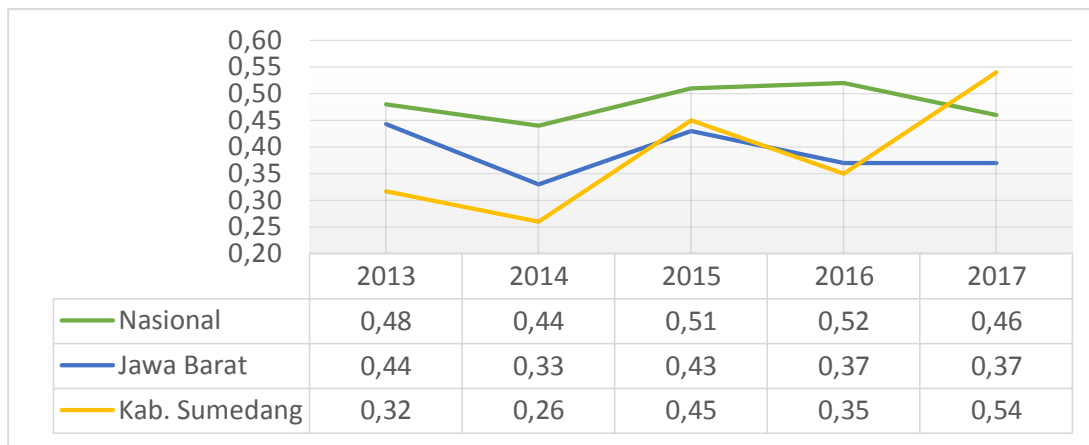
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-12 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang

Pada grafik di atas terlihat bahwa posisi relatif P2 Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 sebesar 0,54 poin sementara jika kita lihat posisi relatif P2 ini berada diatas rata-rata Nasional (0,46 poin) dan rata-rata di Propinsi Jawa Barat (0,37 poin). Posisi relati P2 Kabupaten Sumedang menempati posisi ke 4 tertinggi dari 27 Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten sumedang memiliki ketimpangan yang lebih luas daripada Jawa Barat.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-13 Perkembangan P2 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional

Jika dilihat pada grafik tersebut posisi relatif P2 Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2017 mengalami kenaikan dan penurunan, posisi relatif P2 tertinggi terjadi pada tahun 2017 (0,54 poin) atau mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan P2 Nasional dan P2 Jawa Barat, selama tahun 2013-2014 penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sumedang memiliki ketimpangan yang lebih sempit daripada nasional dan Jawa Barat. Akan tetapi, pada tahun 2017 terjadi sebaliknya dimana posisi P2 Kabupaten Sumedang berada diatas P2 Nasional dan Jawa barat dengan selisih masing-masing 0,04 poin dan 0,17 poin. Artinya, penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sumedang memiliki ketimpangan yang lebih luas dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat.

2.4.2. Kondisi Kemiskinan Makro Non Konsumsi

Selain kemiskinan yang diukur oleh tingkat konsumsi yang dilihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Kemiskinan pun dapat dilihat dari non konsumsi pada beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup.

A. Pendidikan

Pada bidang pendidikan, kemiskinan dapat dilihat dari yaitu berapa lama penduduk dapat bersekolah (*years of schooling*) dan seberapa besar akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Untuk menjawab berapa lama penduduk bisa bersekolah digunakan indikator rata-rata lama sekolah.

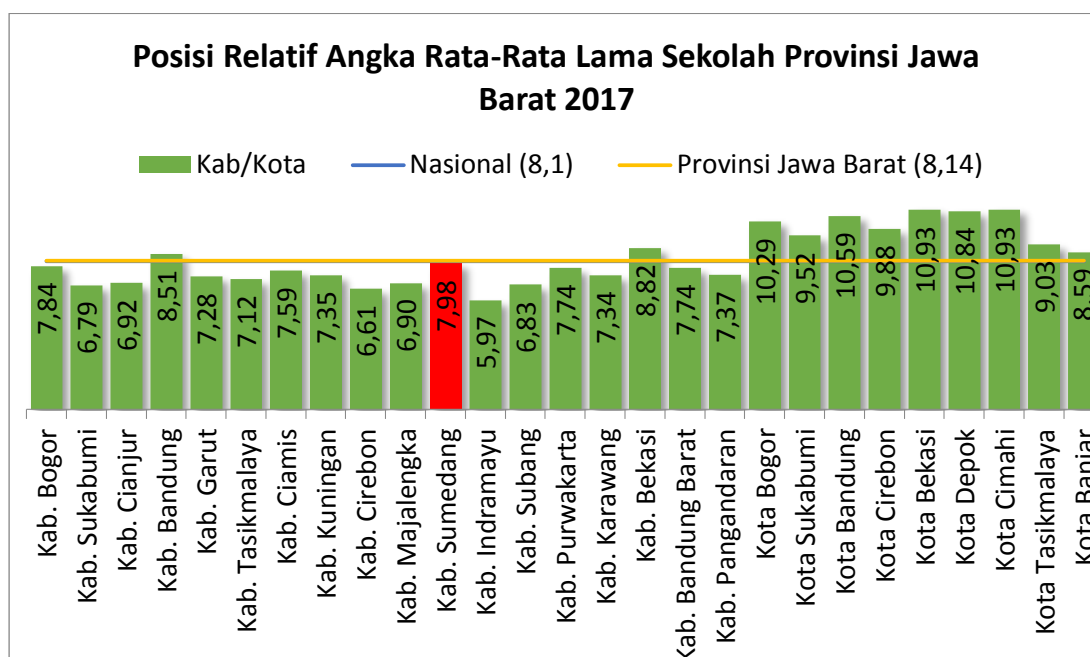
Rata-rata Lama Sekolah atau *Mean Years School (MYS)* adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Tabel 2-8 Perkembangan MYS Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia

Uraian	Tahun					Peningkatan
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kabupaten Sumedang	7,51	7,66	7,66	7,72	7,98	0,47
Provinsi Jawa Barat	7,58	7,71	7,86	7,95	8,14	0,56

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2017 MYS Kabupaten Sumedang berada pada angka 7,98 tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang menamatkan pendidikannya pada kelas dua atau tiga SMP sederajat. Nilai MYS Kabupaten Sumedang meningkat 0,47 tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka ini masih di bawah peningkatan MYS Provinsi Jawa Barat sebesar 0,56 tahun.



Sumber: BPS

Gambar 2-14 Posisi Relatif MYS Kabupaten Sumedang Tahun 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sumedang pada tahun 2017 adalah 7,98 Tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang hanya mengenyam pendidikan formal hingga ke jenjang SMP/MTS. Jika dibandingkan dengan rata-rata 27 Kab/Kota lain di Propinsi Jawa Barat dan rata-rata Nasional, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sumedang pada tahun 2017 masih berada dibawah rata-rata lama sekolah penduduk Propinsi Jawa Barat (8,14 tahun) dan rata-rata Nasional (8,1 tahun).

MYS Kabupaten Sumedang menempati peringkat ke-12 dari 27 kabupaten/kota, daerah dengan MYS tertinggi adalah Kota Cimahi dengan 10,93 tahun atau rata-rata penduduk Kota Cimahi menamatkan pendidikannya sampai dengan kelas satu atau dua SMA sederajat. Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Indramayu dengan 5,97 tahun.

Akses terhadap pendidikan dapat diukur melalui sejauh mana partisipasi pada pendidikan yang diindikasikan oleh angka partisipasi baik kasar maupun murni. Angka Partisipasi Kasar (APK) atau gross enrollment rate adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia

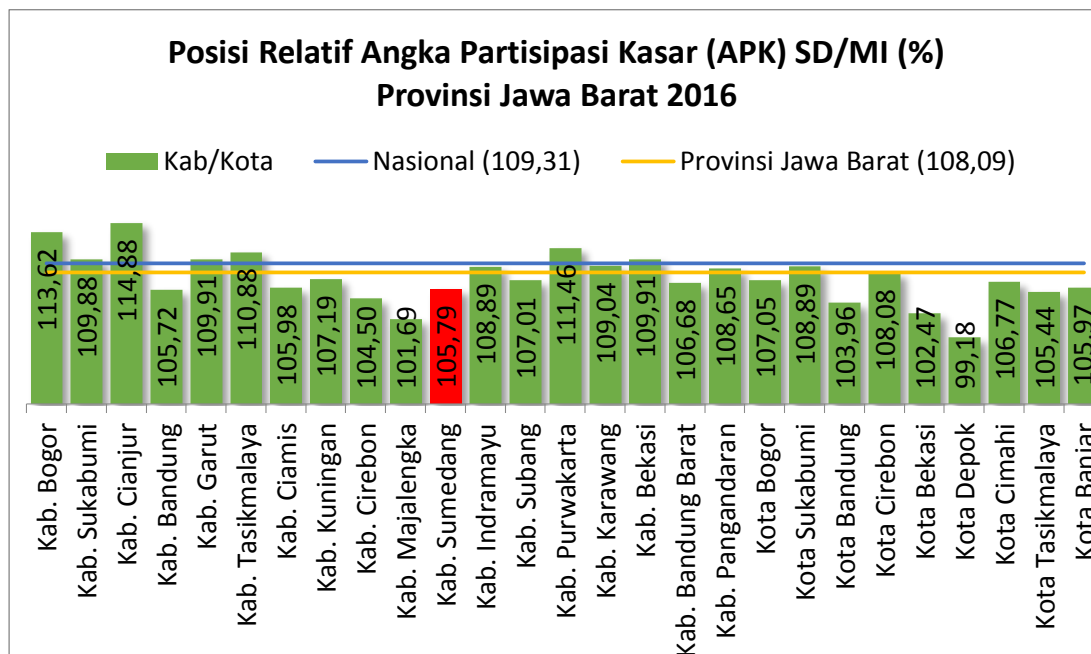
tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 2-9 Tabel APK Kabupaten Sumedang menurut Jenjang

Jenjang	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
SD Sederajat	102,91	109,02	106,11	109,96	105,79
SMP Sederajat	92,45	89,67	93,22	86,54	88,12
SMA Sederajat	61,76	64,37	71,99	76,09	60,21

Sumber: BPS

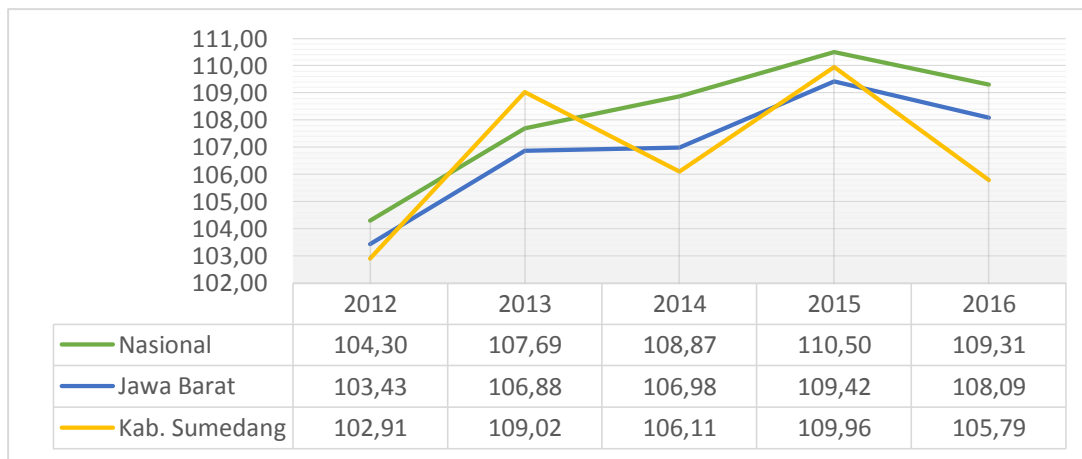
Nilai capaian APK Kabupaten Sumedang pada setiap jenjang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2016 APK SD sederajat sudah masuk dalam angka 105,79%, pada jenjang SMP sederajat sebesar 88,12% dan jenjang SMA sederajat 60,21%.



Sumber: BPS

Gambar 2-15 Posisi Relatif APM Jenjang SD Sederajat Kabupaten Sumedang

Dalam grafik tersebut APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 adalah 105,79%. Jika kita melihat, nilai APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang menempati posisi ke 8 terendah di provinsi Jawa Barat. Nilai ini mengindikasikan bahwa terdapat 5,79% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI. APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang berada dibawah nilai capaian APK Nasional 109,31% dan Jawa Barat 108,9%.

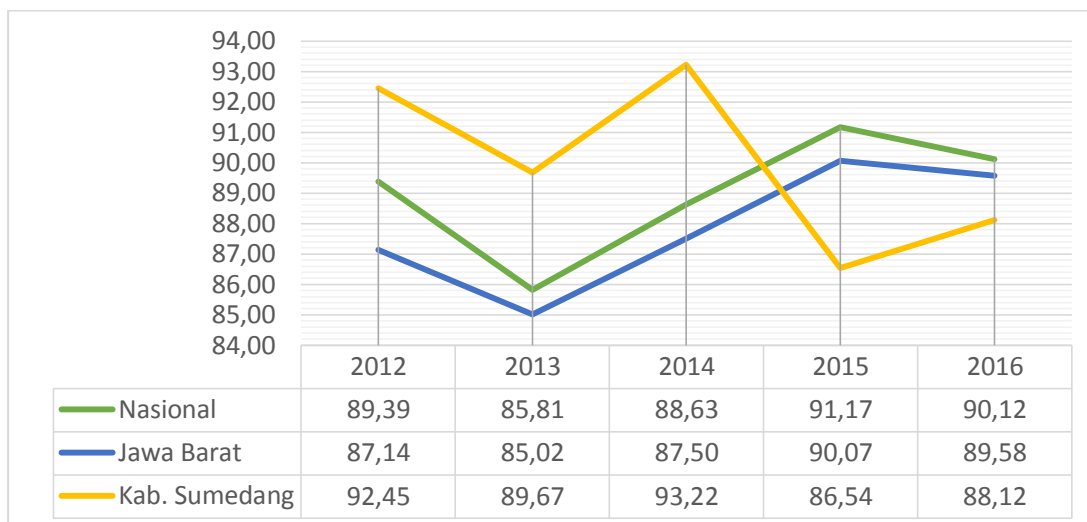


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-16 Perkembangan APK SD Sederajat

Berdasarkan Grafik tersebut, APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang selama periode 2012-2016 adalah sebesar 102,91%; 109,02%; 106,11%; 109,96%; dan 105,79%. Selama kurun waktu 5 tahun APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dan penurunan, selama 3 tahun terakhir capaian hasil APK jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang selalu berada dibawah APK jenjang SD/MI Nasional.

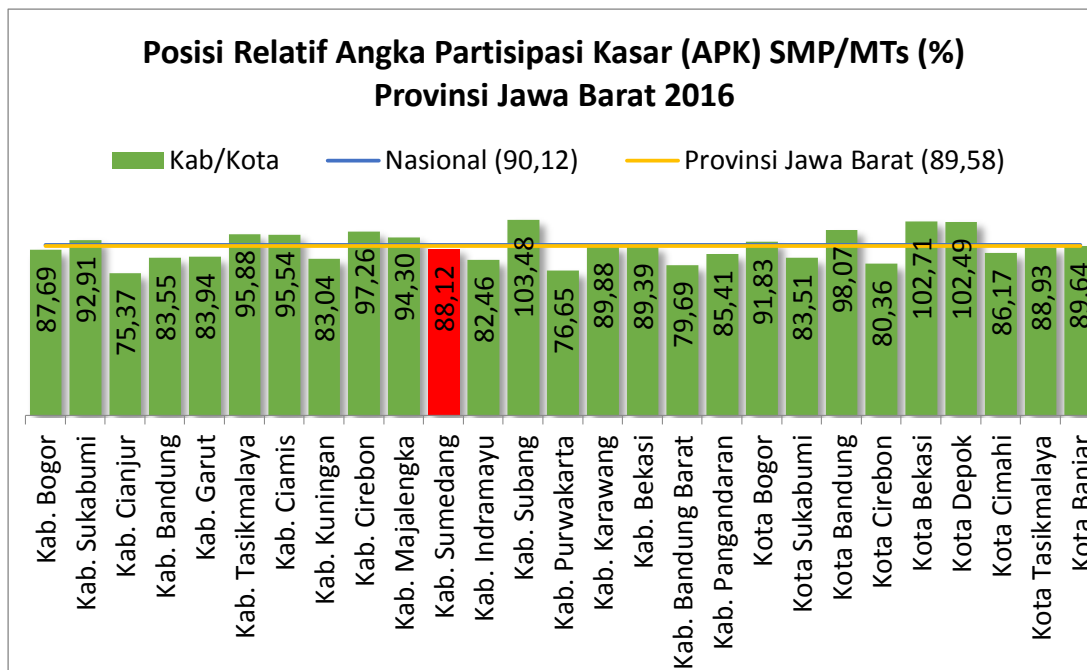
APK jenjang SMP sederajat Kabupaten Sumedang menunjukkan kondisi yang berfluktuasi namun cenderung menurun, nilai APK tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan 93,22% namun pada tahun 2016 berada pada angka 88,12%.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-17 Perkembangan APK SMP Sederajat

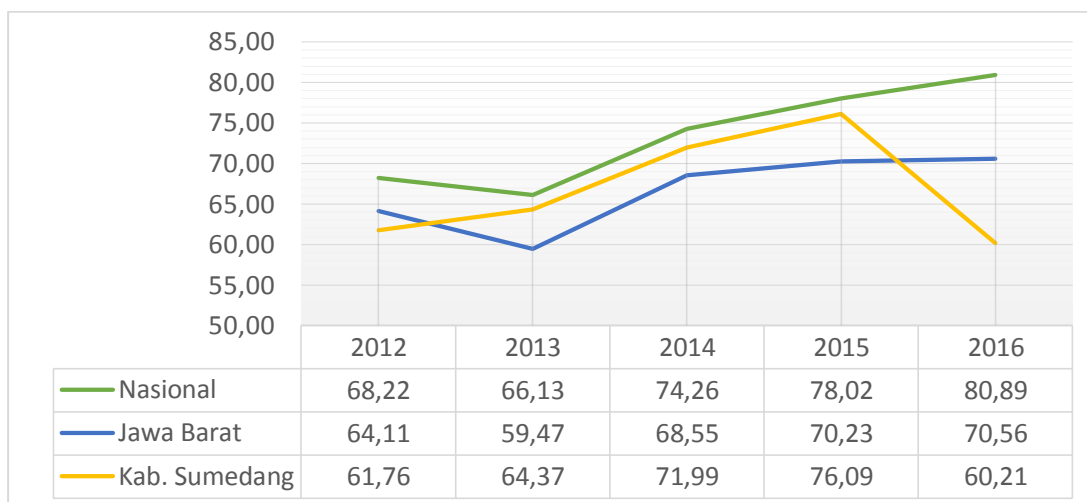
Pada tahun 2016, posisi APK jenjang SMP sederajat Kabupaten Sumedang masih berada di bawah nilai APK Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Daerah dengan nilai APK SMP sederajat tertinggi ditempati oleh Kabupaten Subang dengan 103,48% dan yang terendah Kabupaten Cianjur dengan 75,37%.



Sumber: BPS

Gambar 2-18 Posisi Relatif APK Jenjang SMP Sederajat Kabupaten Sumedang

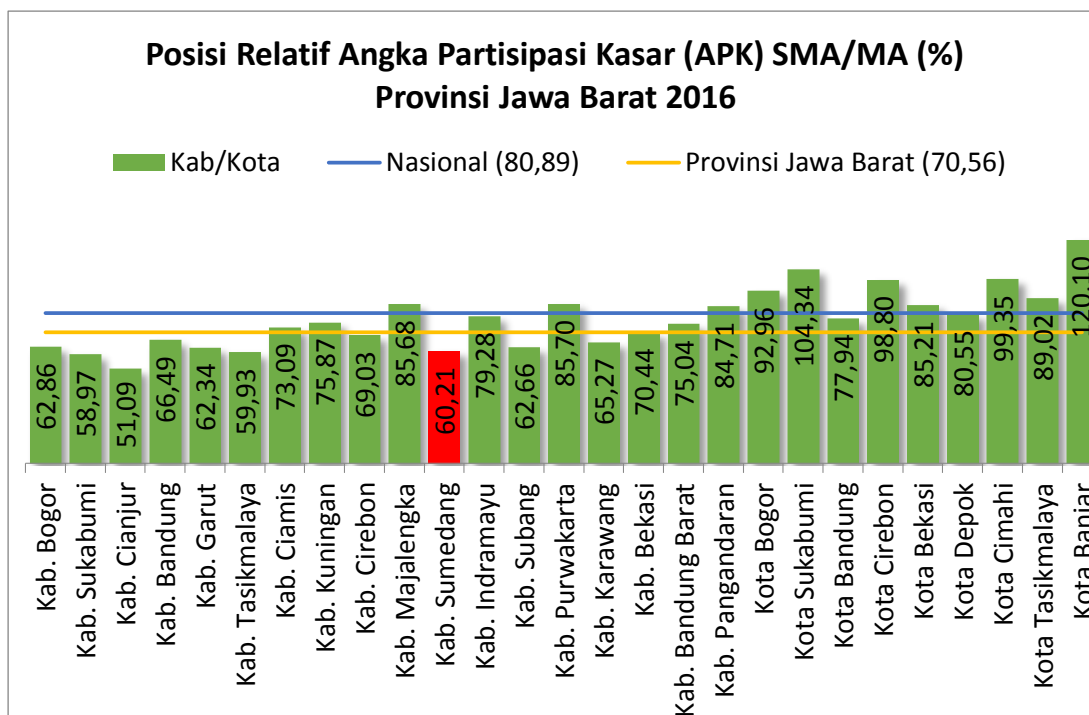
Berikut ini perkembangan nilai capaian APK pada jenjang SMA sederajat tahun 2012-2016



Sumber: BPS

Gambar 2-19 Perkembangan APK SMA Sederajat

APK jenjang SMA sederajat Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan yang presisten yaitu dari 61,76% menjadi 76,09% namun mengalami penurunan menjadi 60,21% pada tahun 2016. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Sumedang berada di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat (70,56%) dan Nasional (80,89%).



Sumber: BPS

Gambar 2-20 Posisi Relatif APK SMA Sederajat Kabupaten Sumedang

APK SMA/MA Kabupaten Sumedang menempati posisi ke-4 dengan APK terendah dari 27 Kab/Kota di provinsi Jawa Barat, nilai ini hanya lebih baik dari Kabupaten Cianjur (51,09%), Kabupaten Sukabumi (58,97%) dan Kabupaten Tasikmalaya (59,93%). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan pendidikan dan peningkatan akses pendidikan yang telah dilakukan selama ini masih belum berhasil dengan baik, sehingga minat masyarakat Kabupaten Sumedang dalam menempuh pendidikan di tingkat SMA/MA masih rendah.

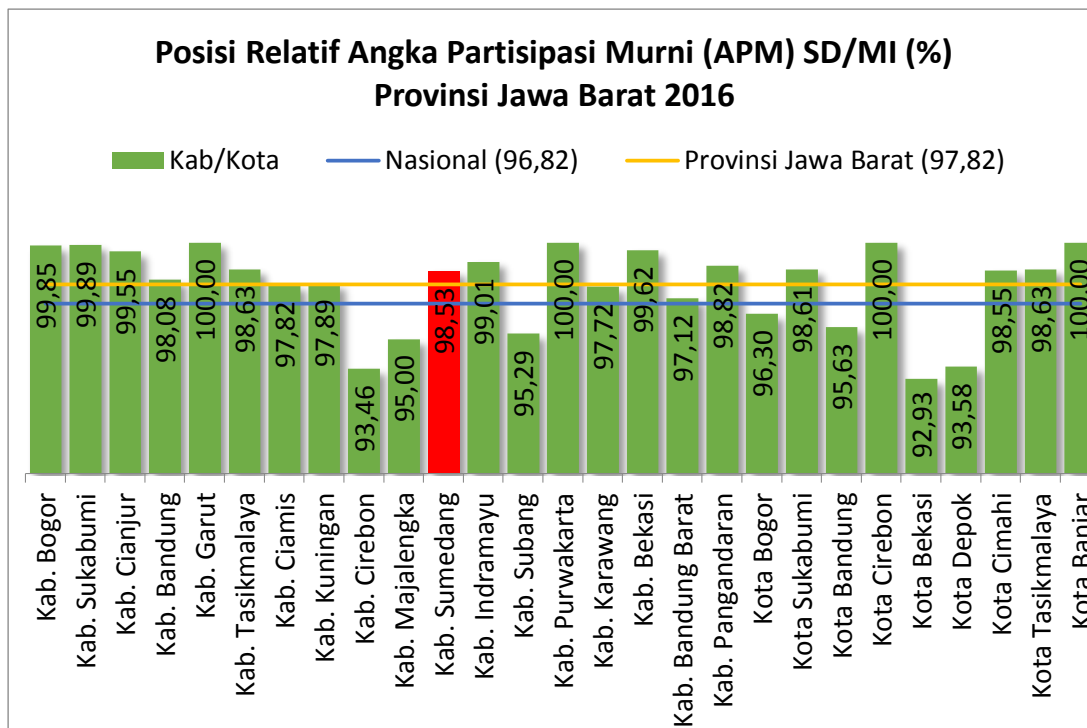
Selain APK, indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) atau *Net Enrollment Rate* adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel 2-10 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sumedang menurut Jenjang

Jenjang	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
SD Sederajat	95,39	97,73	98,36	99,75	98,53
SMP Sederajat	82,56	84,47	87,85	79,53	78,22
SMA Sederajat	56,13	56,87	60,80	56,35	42,48

Sumber: BPS

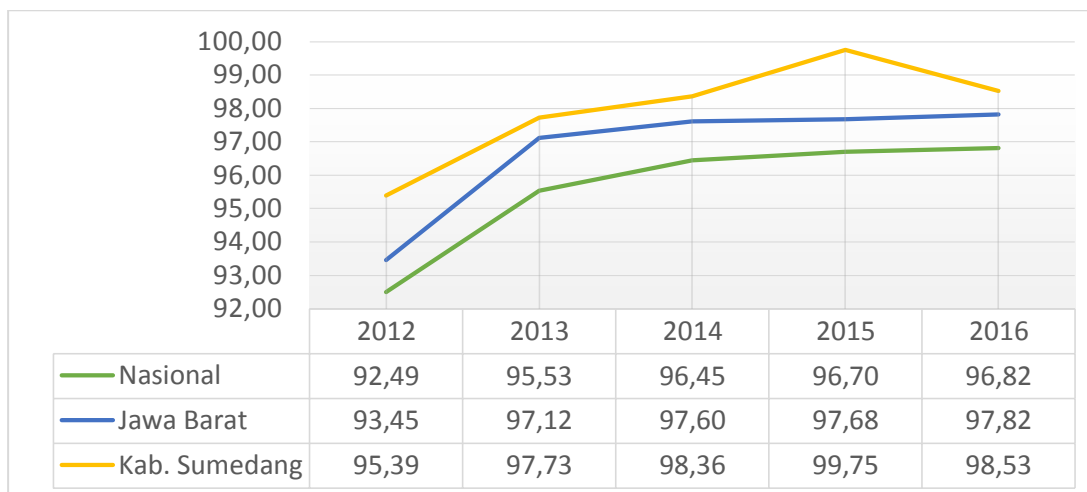
Nilai APM Kabupaten Sumedang pada setiap jenjang tahun 2012-2016 cenderung menunjukkan fluktuasi dan menurun pada dua tahun terakhir. Nilai APM jenjang SD sederajat berada pada angka 98%, jenjang SMP sederajat masih di sekitar 80% dan pendidikan menengah baru 45%.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-21 Posisi Relatif APM Jenjang SD Sederajat Kabupaten Sumedang

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 adalah sebesar 98,53% artinya masih ada 2,47% anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Capaian APM SD/MI Kabupaten Sumedang sudah melebihi dari capaian APM Nasional 96,82% dan Jawa Barat 97,82%.

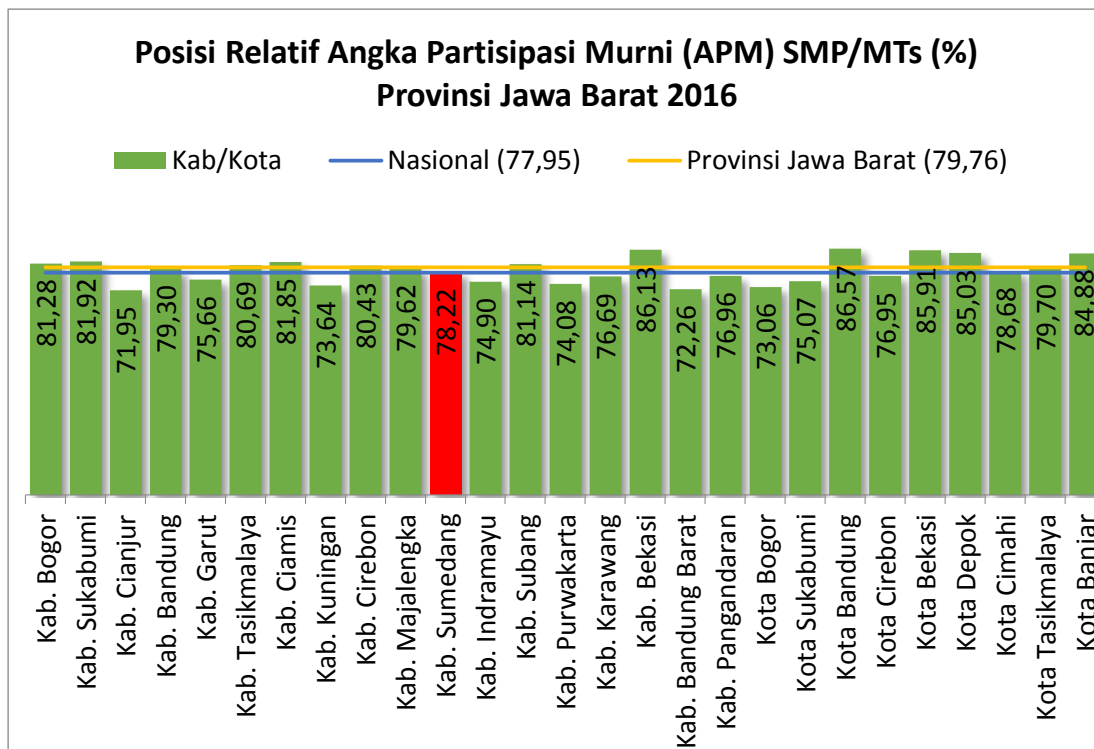


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-22 Perkembangan APM SD sederajat

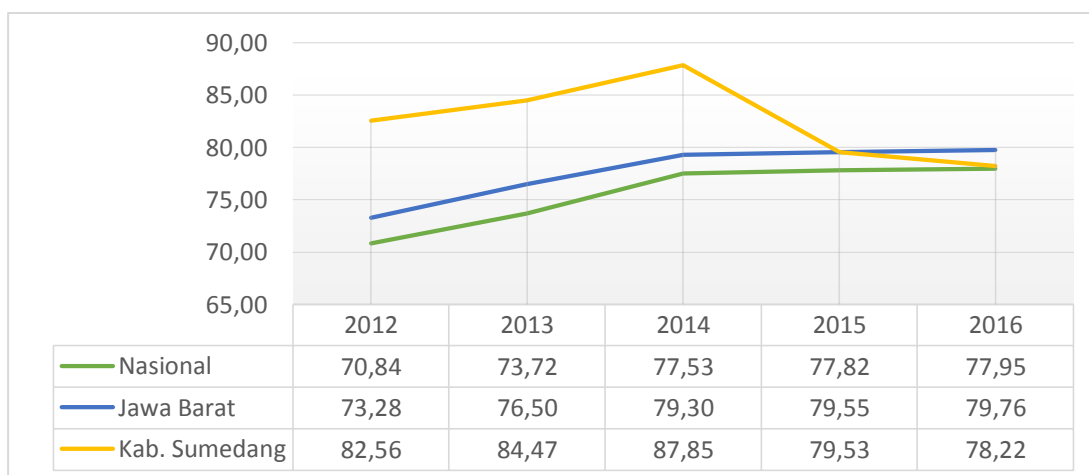
APM SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2016 menempati posisi ke 15 tertinggi dari 27 Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat, daerah dengan APM tertinggi yaitu Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Garut yang sudah mencapai angka optimal yaitu 100%.

APM SD sederajat Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2016 selalu berada di atas nilai capaian Jawa Barat dan Nasional, meskipun sedikit berfluktuasi namun secara tren menunjukkan kondisi yang positif.



Gambar 2-23 Posisi Relatif APM Jenjang SMP Sederajat Kabupaten Sumedang Tahun 2016

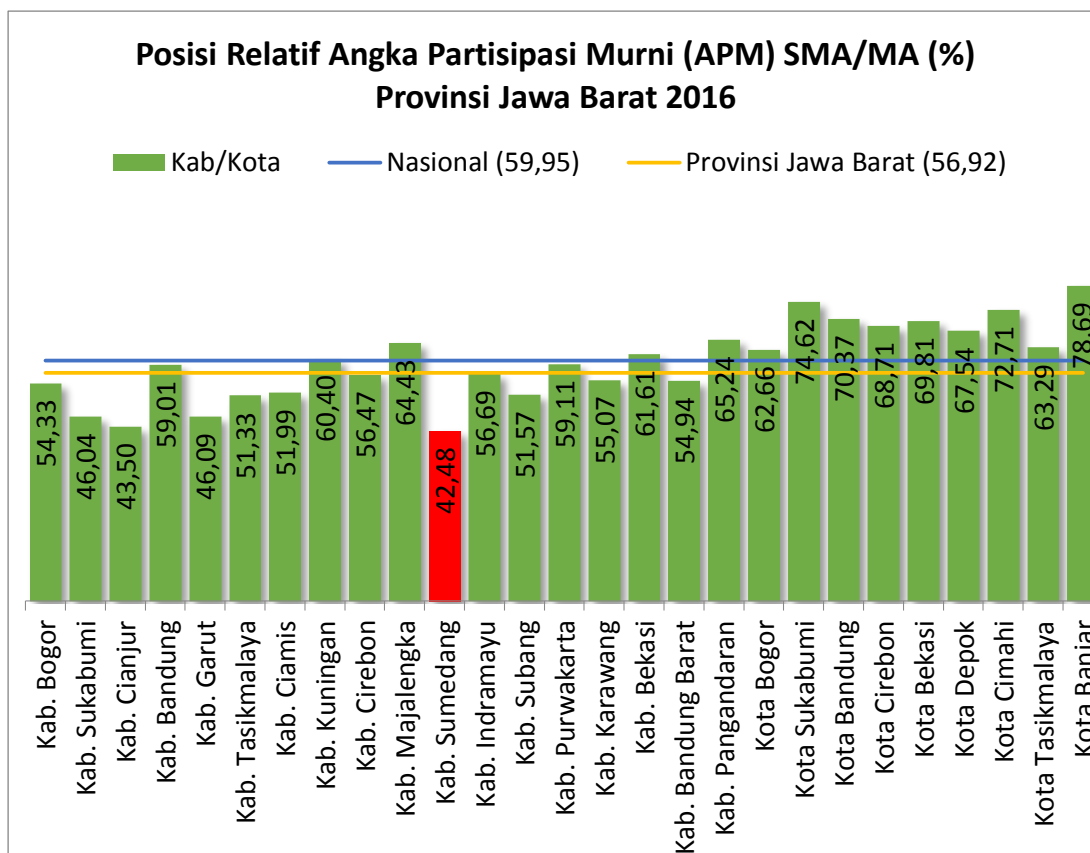
APM SMP/MTS Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 adalah 78,22%, artinya masih terdapat 78,22% penduduk yang berusia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTS. APM SMP/MTS Kabupaten Sumedang menempati posisi ke 11 terendah dari 27 kab/kota. APM SMP/MTS Kabupaten Sumedang sudah melebihi dari capaian APM Nasional 77,95% tetapi masih berada dibawah capaian APM Propinsi Jawa Barat 79,76%.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-24 Perkembangan APM SMP sederajat

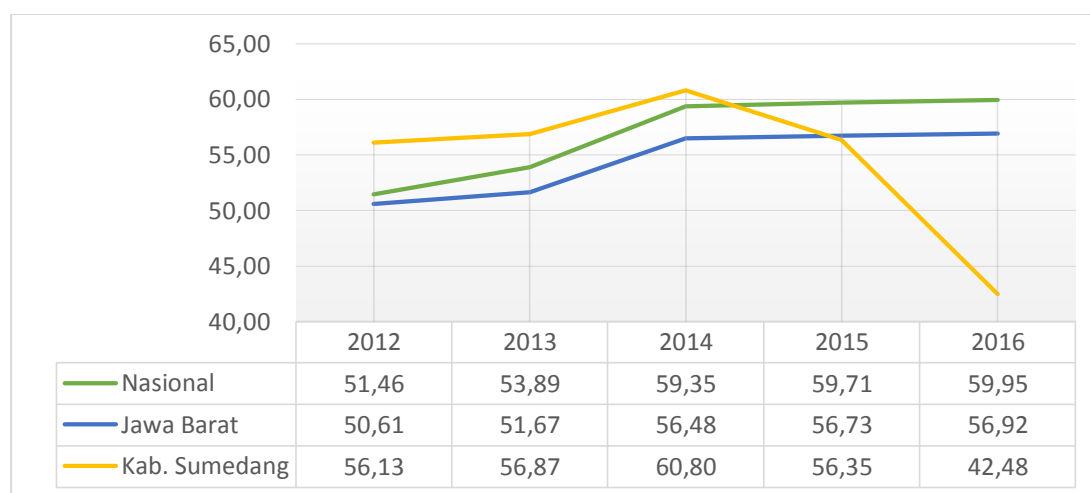
APM SMP Sederajat Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016 terus berfluktuasi, namun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan hingga berada di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2016.



Sumber: BPS

Gambar 2-25 Posisi Relatif APM Jenjang SMA Sederajat Kabupaten Sumedang

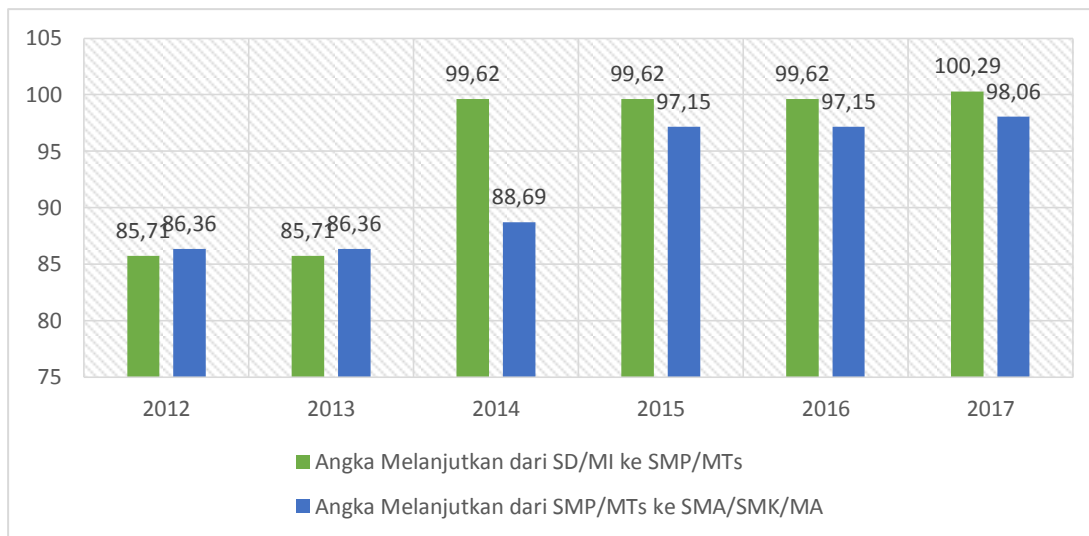
APM SMA/MA Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 sebesar 42,48%, artinya masih ada 42,48% penduduk yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/MA. Nilai ini menempatkan Kabupaten Sumedang menjadi daerah dengan nilai APM SMA terendah di Jawa Barat.



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-26 Perkembangan APM SMP sederajat

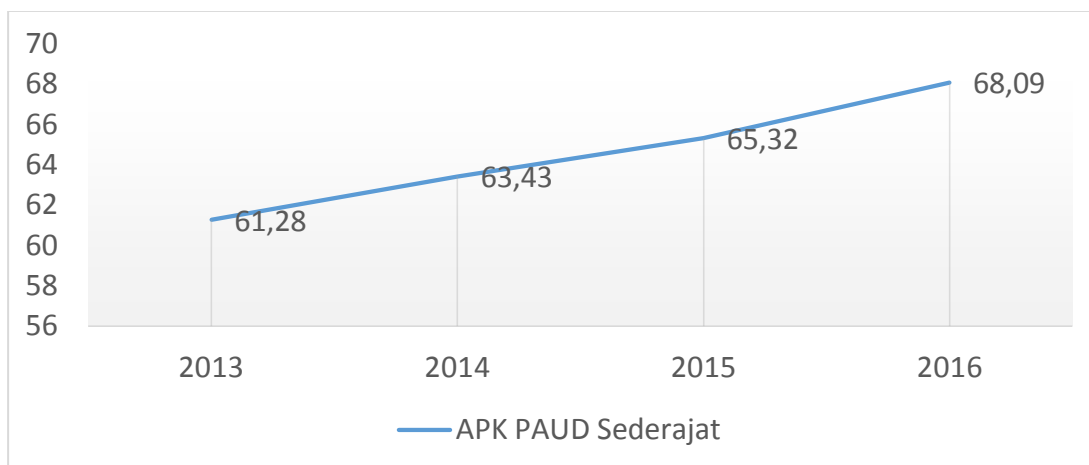
APM SMA Kabupaten Sumedang selama periode 2012-2016 mengalami fluktuasi namun mengalami penurunan yang signifikan pada dua tahun terakhir, nilai capaian turun dari 60,80 pada tahun 2014 menjadi 42,48% pada tahun 2016. Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pendidikan adalah faktor ekonomi yang sangat memberatkan bagi penduduk miskin dan rentan miskin.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-27 Grafik Angka Melanjutkan Kabupaten Sumedang

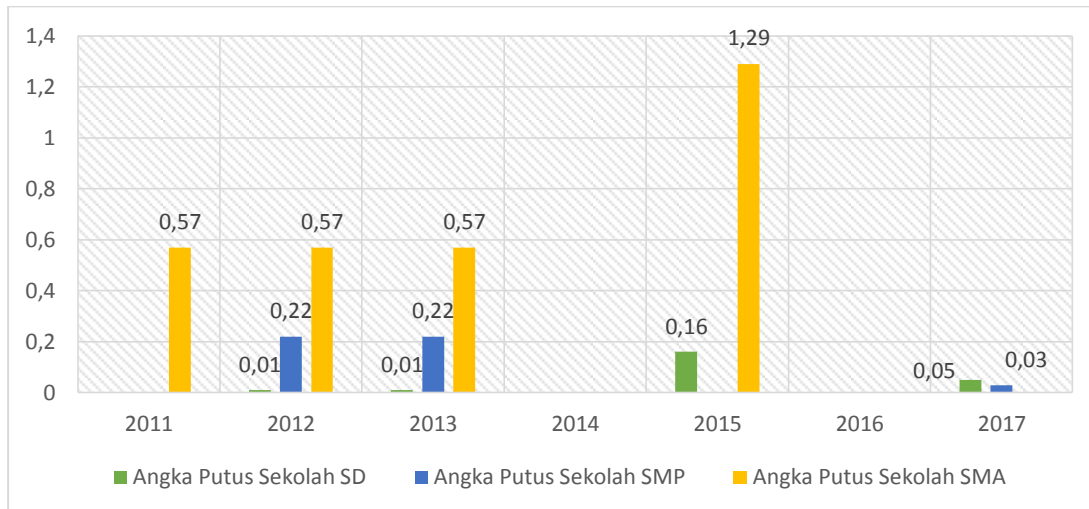
Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs selama enam tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 85,71% murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, kemudian meningkat menjadi 100,29% di tahun 2017, hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Sumedang untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi. Kemudian untuk angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama enam tahun mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 86,36% murid SMP/MTs yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA, kemudian meningkat menjadi 98,06% di tahun 2017.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-28 Grafik APK PAUD Sederajat

Pada jenjang pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terdapat 61,28% anak usia dini yang mengikuti PAUD, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 68,09%. Meskipun secara tren meningkat, namun angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,02% di tahun 2019. Kondisi tersebut dapat diakibatkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam sekolah PAUD dan masih rendahnya jumlah sekolah PAUD sehingga tidak menjangkau seluruh anak usia dini di Kabupaten Sumedang.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-29 Grafik Angka Putus Sekolah

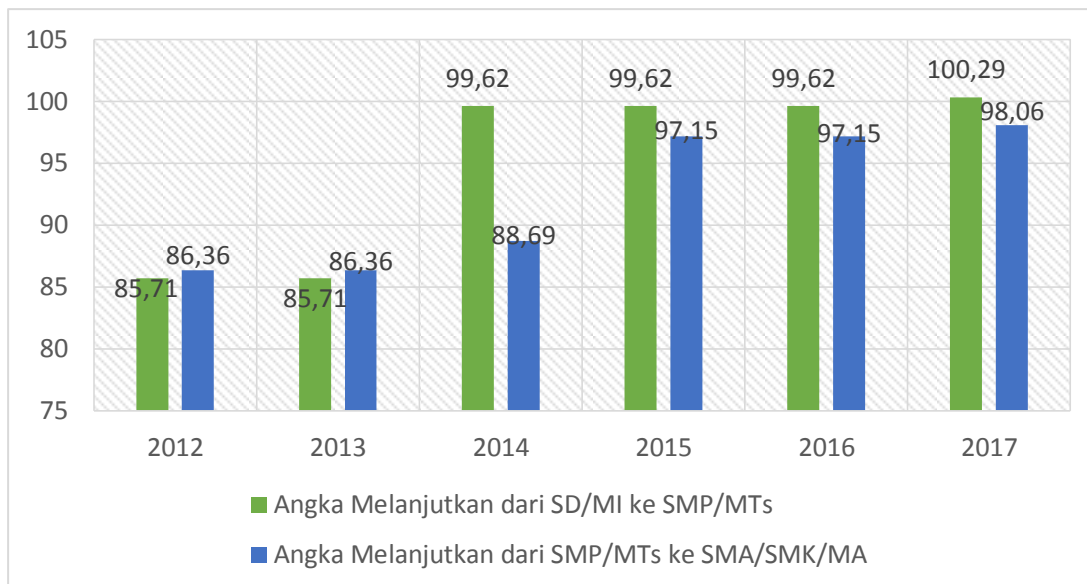
Angka putus sekolah di Kabupaten Sumedang untuk jenjang pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan, pada tahun 2012 tercatat 0,01%, kemudian menjadi 0,05 di tahun 2017. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah (SMP) pada tahun 2012 sebesar 0,01 kemudian meningkat menjadi 0,03 di tahun 2017. Pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) di tahun 2011 tercatat 0,57 kemudian meningkat menjadi 1,29 di tahun 2015.

Tabel 2-11 Indikator Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Guru Terhadap Murid per kelas rata-rata					
a	SD			1:16	1:16	1:16
b	SMP			1:18	1:18	1:18

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Rasio Guru terhadap murid idealnya 500 orang guru untuk 10.000 murid atau 1 (satu) orang guru untuk 20 murid. Jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan angka rasio ideal sudah melampaui. Pada tahun 2017 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SD sebesar 1 (satu) guru untuk 16 murid, sedangkan pada jenjang SMP di tahun yang sama 1 (satu) guru untuk 18 murid. Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Sumedang sudah mencukupi. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-30 Grafik Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs selama enam tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 85,71% murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, kemudian meningkat menjadi 100,29% di tahun 2017, hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Sumedang untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi. Kemudian untuk angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama enam tahun mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2012 sebesar 86,36% murid SMP/MTs yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA, kemudian meningkat menjadi 98,06% di tahun 2017.

B. Kesehatan

Kesehatan sangat terkait erat dengan kemiskinan, rata-rata penduduk miskin akan sangat sulit untuk mengakses kesehatan bila mereka membutuhkan tindakan kesehatan terkait dengan biaya. Selain itu banyak penduduk yang tidak miskin dengan mudah jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena menderita penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi.

MPI menggunakan indikator gizi dan kematian anak sebagai dua indikator karena dua indikator ini merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga termasuk keluarga miskin. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak, sehingga muncul konsep *stunting*, *wasting* dll. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan *Body Mass Index* (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18,5. Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan.

Secara umum untuk melihat kondisi kesehatan sebuah daerah, indikator umum yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), AHH yaitu Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Kegunaan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Tabel 2-12 Indikator Makro Kesehatan Kabupaten Sumedang

Uraian	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	71,8	71,86	71,89	71,91	71,96	72
Balita Gizi Buruk (%)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Desa Siaga Aktif	69	71	71	69	69	69
Angka Kematian Bayi (jiwa)	205	202	181	120	146	205
Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan)	108,14	52,69	38,94	84,77	111	108,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Sumedang dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tapi pasti. Dari angka 71,8 tahun pada 2010, meningkat menjadi 72,00 pada 2017. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup ini menggambarkan bahwa tidak mudah meningkatkan angka harapan hidup dalam jangka waktu satu tahun, karena harapan hidup seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal yang kompleks, antara lain kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga perlu upaya keras di bidang pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

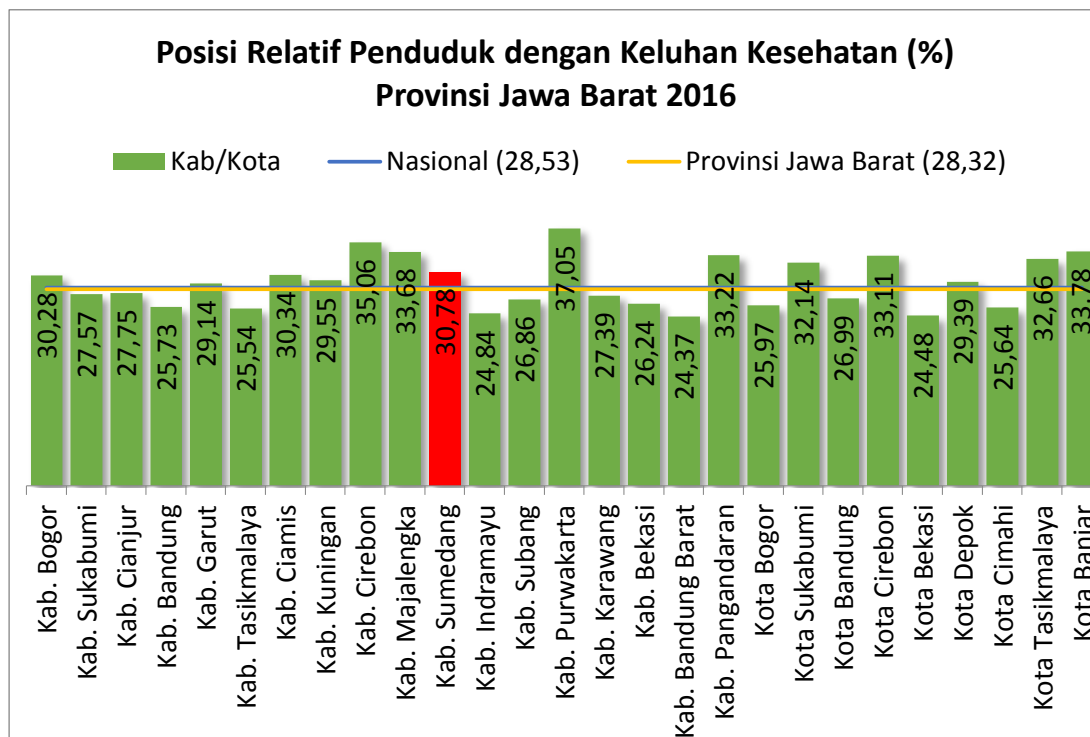
Selanjutnya persentase balita gizi buruk selama tahun 2013-2017 berada dibawah 1%, jika dibandingkan dengan target MDGs yakni 3,60% maka dengan demikian pencapaian indikator balita gizi buruk selama lima tahun di Kabupaten Sumedang tergolong berhasil.

Untuk indikator desa siaga aktif, Kementrian Kesehatan menetapkan SPM desa siaga aktif sebesar 80%. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase desa siaga aktif Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2013-2017 masih dibawah 75%, sehingga belum mencapai SPM yang ditetapkan.

Adapun Angka Kematian Bayi mengalami tren penurunan selama tahun 2013-2017, pada tahun 2013 tercatat 205 bayi yang mati, kemudian menurun di tahun 2015 menjadi 181 bayi, kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 146. Meskipun secara tren mengalami penurunan, namun angka tersebut perlu terus dikurangi hingga angka kematian bayi menjadi 0 kejadian.

Angka Kematian Ibu (per 100.000 ibu melahirkan) menurut SPM Kementerian Kesehatan ditetapkan 0 kasus, dengan demikian indikator angka kematian ibu di Kabupaten Sumedang belum mencapai target. Pada tahun 2013 tercatat 108 kematian ibu dari 100.000 kelahiran, kemudian dalam dua tahun menurun yakni tahun 2014 sebesar 52,69 kematian dan tahun 2015 sebesar 38,94 kematian. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 84,77 kematian, dan kembali meningkat menjadi 111 kematian di tahun 2017. Kenaikan angka ini dikarenakan adanya ibu hamil dengan komplikasi kebidanan dari puskesmas/bidan yang dirujuk ke rumah sakit, namun terdapat jeda waktu antara rujukan dari puskesmas/bidan ke rumah

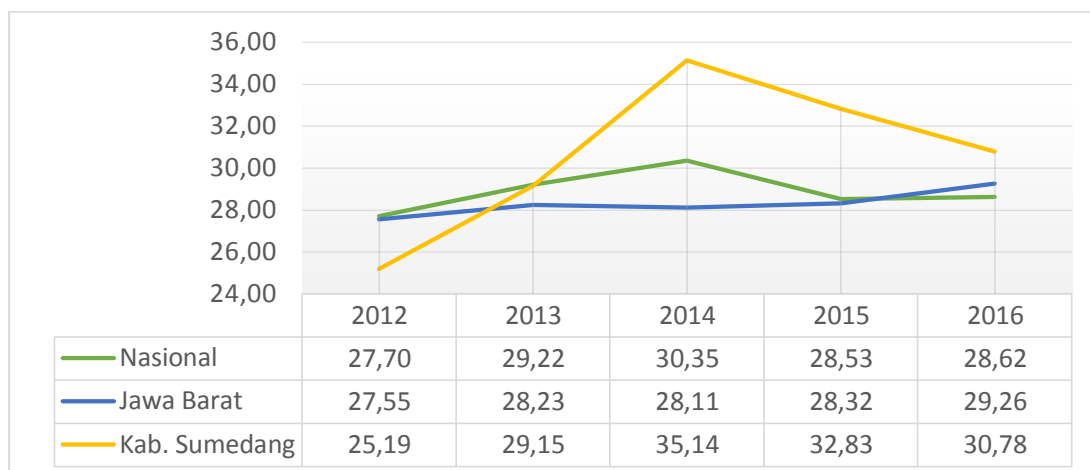
sakit yang mengakibatkan ibu hamil tersebut mengalami kematian. Dalam perspektif ke depan sistem pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu melahirkan perlu disempurnakan sehingga dapat melayani pasien ibu melahirkan dengan cepat, akurat, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu.



Sumber: BPS

Gambar 2-31 Posisi Relatif Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan Kabupaten Sumedang

Grafik di atas menunjukkan persentase jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2016 masih berada di atas nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kabupaten Sumedang menempati peringkat ke-9 dengan keluhan tertinggi, posisi teratas ditempati oleh Kabupaten Purwakarta dengan 37,05%.

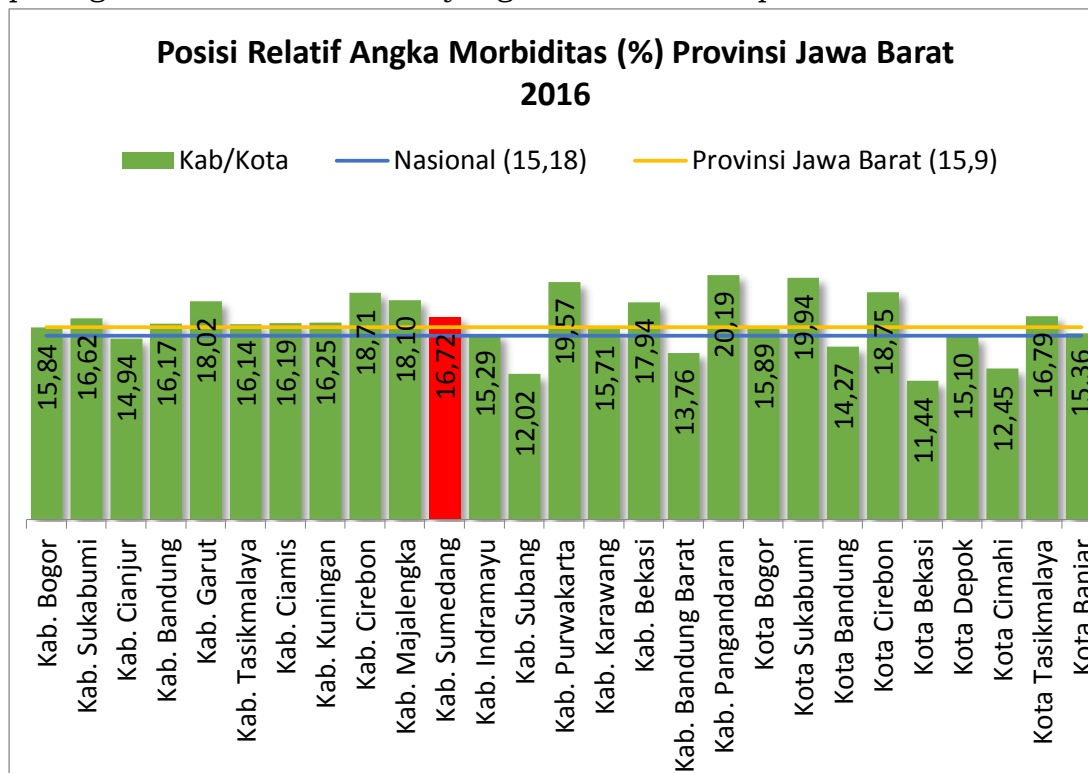


Sumber: BPS

Gambar 2-32 Perkembangan Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan

Penduduk dengan keluhan kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2012-2014 menunjukkan peningkatan namun kemudian menurun dalam dua tahun terakhir. Meskipun demikian, selama 3 tahun terakhir Persentase keluhan kesehatan Kabupaten Sumedang selalu berada diatas rata-rata Nasional dan Propinsi Jawa

Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan fasilitas kesehatan dan peningkatan akses kesehatan yang telah dilakukan perlu dievaluasi kembali.



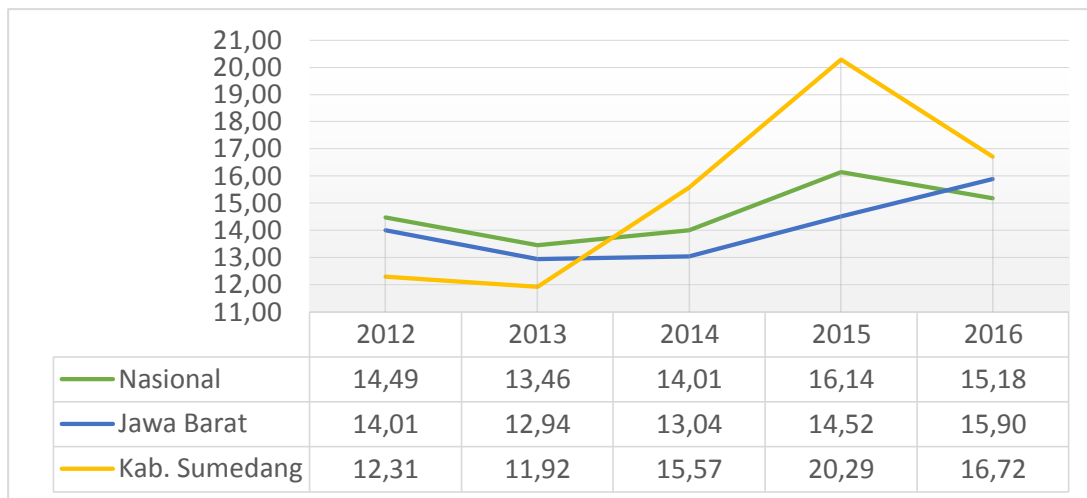
Sumber: BPS

Gambar 2-33 Posisi Relatif Angka Morbiditas Kabupaten Sumedang

Angka Kesakitan/Morbiditas adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Angka morbiditas Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 adalah sebesar 16,72%. hal ini berarti bahwa terdapat 16,72% penduduk Kabupaten Sumedang yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehari-hari pada tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa posisi relatif angka morbiditas Kabupaten sumedang pada tahun 2016 (16,72%) masih berada diatas rarta-rata angka morbiditas Nasional (15,18%) dan Propinsi Jawa barat (15,9%). Jika dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang menempati posisi ke 10 tertinggi diantara 27 Kab/Kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas sehar-hari selama tahun 2016.

Berikut ini perkembangan angka morbiditas Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2012-2016.

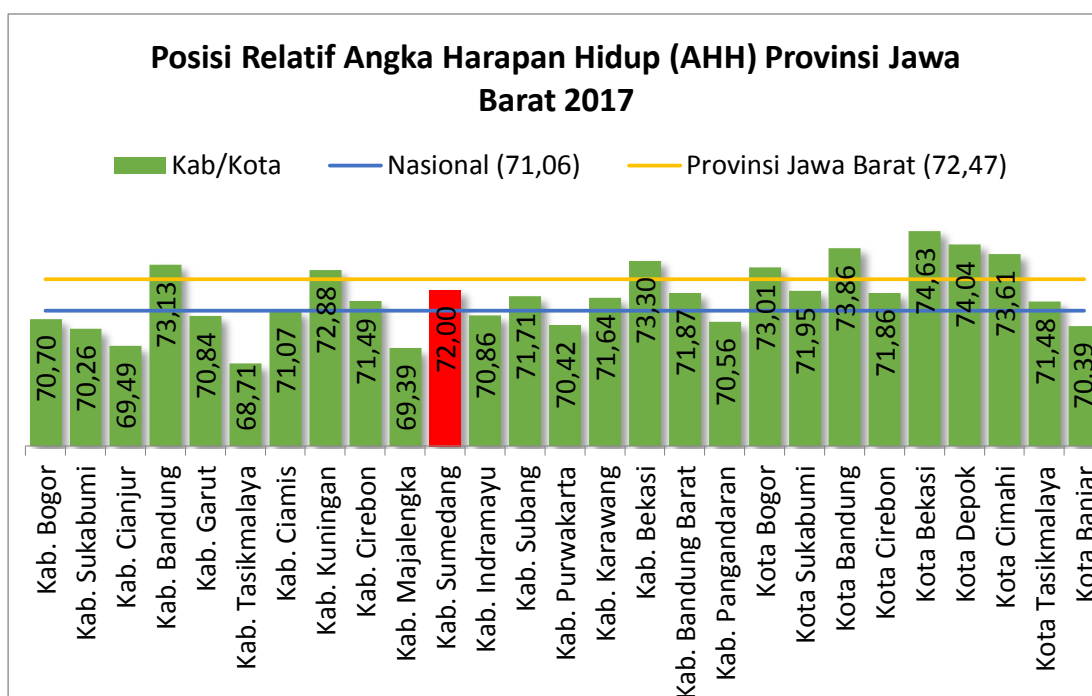


Sumber: BPS

Gambar 2-34 Perkembangan Angka Morbiditas

Persentase angka morbiditas Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada tahun 2015 (20,29%), dan persentase keluhan kesehatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2013 (11,92%). Selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) persentase angka morbiditas Kabupaten Sumedang selalu berada di atas rata-rata Nasional dan Propinsi Jawa Barat meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

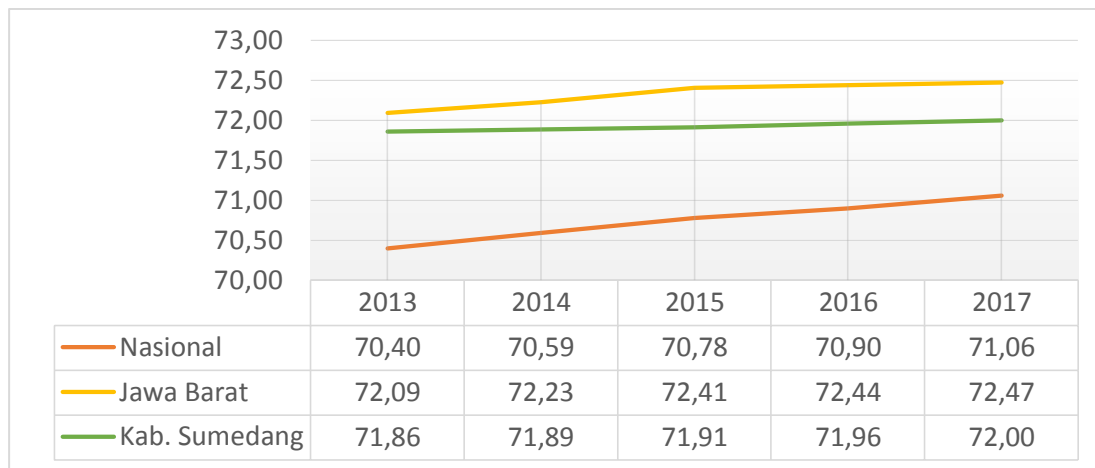
Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada grafik di bawah maka terlihat bahwa sampai pada tahun 2017 Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. AHH Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 adalah sebesar 72,00 tahun, nilai ini sudah berada di atas nilai capaian Nasional tahun 2017 adalah 71,06 tahun, masih berada di bawah nilai capaian AHH Propinsi Jawa Barat (72,47 tahun).



Sumber: BPS

Gambar 2-35 Posisi Relatif AHH Kabupaten Sumedang

Nilai AHH Kabupaten Sumedang pada tahun 2013-2017 terus berada di atas nilai capaian nasional namun selalu berada di bawah angka AHH Provinsi Jawa Barat. Bila dilihat, perkembangan AHH Kabupaten Sumedang cenderung lebih landai dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2013 nilai AHH Kabupaten Sumedang 71,86 tahun naik 0,14 tahun sehingga menjadi 72 tahun pada tahun 2017.



Sumber: BPS

Gambar 2-36 Perkembangan AHH Sumedang, Jawa Barat dan Nasional

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 adalah 1:44 atau dengan kata lain satu posyandu digunakan untuk melayani 44 balita. Kondisi tersebut telah melampaui rasio ideal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni satu posyandu untuk melayani 100 balita (1:100).

Tabel 2-13 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Tahun	Jumlah Posyandu (Aktif)	Jumlah Balita (0-4 Tahun)	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
2013	946	83.743	1: 88
2014	1014	118.592	1:116
2015	1644	86.901	1:52
2016	1635	85.504	1:52
2017	-	-	1:44

Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Rasio puskesmas per satuan penduduk adalah jumlah puskesmas per 30.000 penduduk. Perkembangan rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2017 mengalami tren negatif. Pada tahun 2013 tercatat satu puskesmas untuk melayani 36.298 penduduk, kemudian di tahun 2017 satu puskesmas untuk melayani 32.755 penduduk. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Kesehatan yakni satu puskesmas untuk 30.000 penduduk, maka pada tahun 2017 puskesmas di Kabupaten Sumedang *overload* atau kelebihan beban 20.755 penduduk. Sehingga penambahan puskesmas menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan optimal kepada penduduk.

Tabel 2-14 Rasio Rumah Sakit dan Puskesmas Per Satuan Penduduk

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1:580.765	1:592.961	1:568.636	1:571.048	1:382.145
2	Rasio Puskesmas Per satuan penduduk	1:36.298	1:37.060	1:35.539	1:32.631	1:32.755

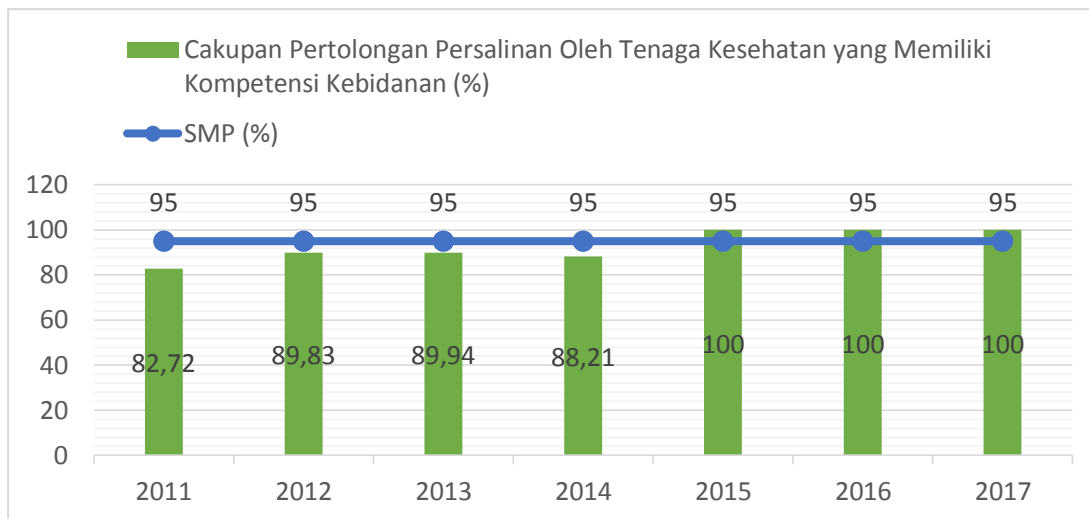
Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Sampai pada tahun 2013, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Sumedang sebesar 1:1.580.765 penduduk. Jika dibandingkan dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk, maka ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Sumedang masuk dalam kategori belum mencukupi, namun demikian kondisi tersebut diimbangi oleh adanya pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu

Berdasarkan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, pada tahun 2014 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 48 per 100.000 penduduk, dokter gigi 11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per 100.000 penduduk, sanitarian 15 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 24 per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang ada di Kabupaten Sumedang maka target tersebut belum tercapai.

Hingga tahun 2017 ketersediaan dokter spesialis hanya 46 orang, sementara idealnya perlu 137 dokter spesialis, untuk ketersediaan dokter umum hanya 29 dokter sementara idealnya perlu 550 dokter umum, selanjutnya ketersediaan dokter gigi hanya 13 dokter sementara idealnya perlu 126 dokter gigi, adapun ketersediaan bidan hanya 348 bidan sementara idealnya perlu 860 bidan. Kemudian ketersediaan sanitarian pada tahun 2017 hanya 20 orang, sementara idealnya 172 orang sanitarian, selanjutnya untuk ketersediaan ahli gizi saat ini hanya 19 orang, sementara idealnya perlu 275 orang ahli gizi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Sumedang dari periode tahun 2015-2017 telah mencapai 100%, artinya bahwa proses persalinan di Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sudah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 95%.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-37 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

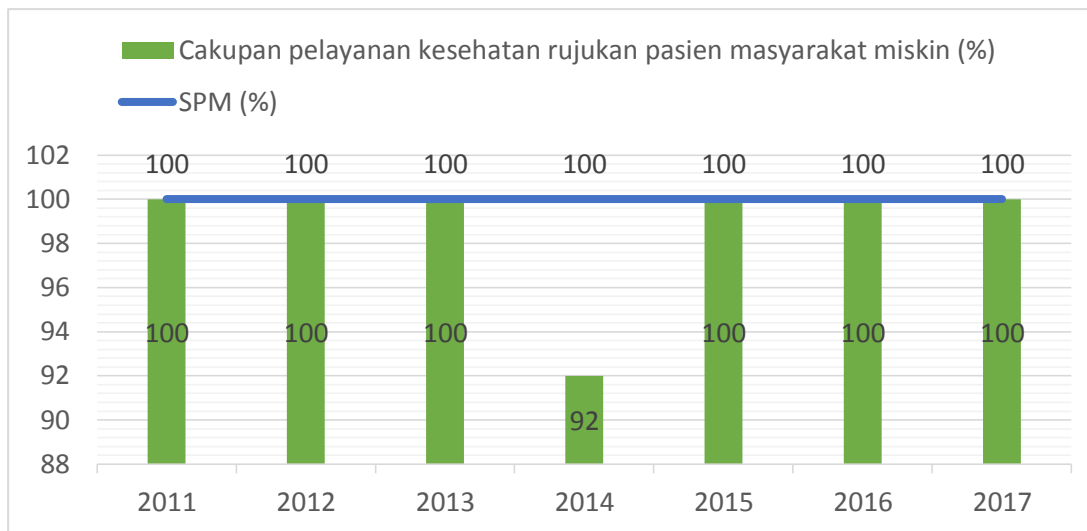
Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Sumedang selama periode 2011-2017 menunjukkan tren penurunan, hanya di tahun 2015-2016 mencapai 100% dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 96%. Hal ini berarti masih terdapat bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan dalam waktu satu tahun, meskipun demikian capaian tahun 2017 tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni >95%.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-38 Grafik Cakupan Gizi Buruk mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Sumedang selama periode 2011-2016 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk di tahun 2013-2017 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

Gambar 2-39 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada grafik di bawah maka terlihat bahwa sampai pada tahun 2017 Kabupaten Sumedang sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

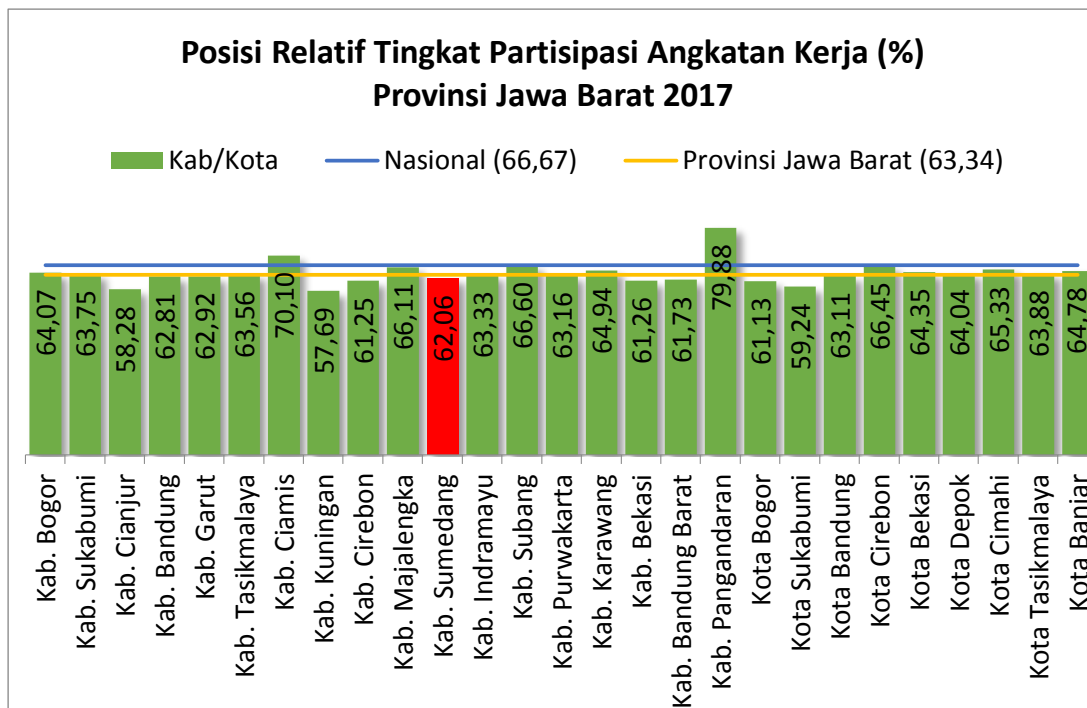
Indikator cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM cakupan peserta KB Aktif ditetapkan sebesar 65% dari total pasangan usia subur. Sehingga realisasi cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Sumedang pada tahun 2013 hingga 2017 sudah berhasil melampaui target SPM. Pencapaian ini berindikasi positif terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang.

Untuk realisasi indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun sejak tahun 2013-2017 telah mencapai target, namun demikian jika dilihat secara tren pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 79,76% dari 88,6% di tahun 2014. Kemudian memasuki tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 81,57%.

Untuk indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) di Kabupaten Sumedang telah mencapai realisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional BKKBN Tahun 2017 (17,5%). Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

C. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan berperan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pelatihan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, lebih jauh dinas terkait harus menjadikan penduduk miskin dan rentan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga akselerasi penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan optimal.

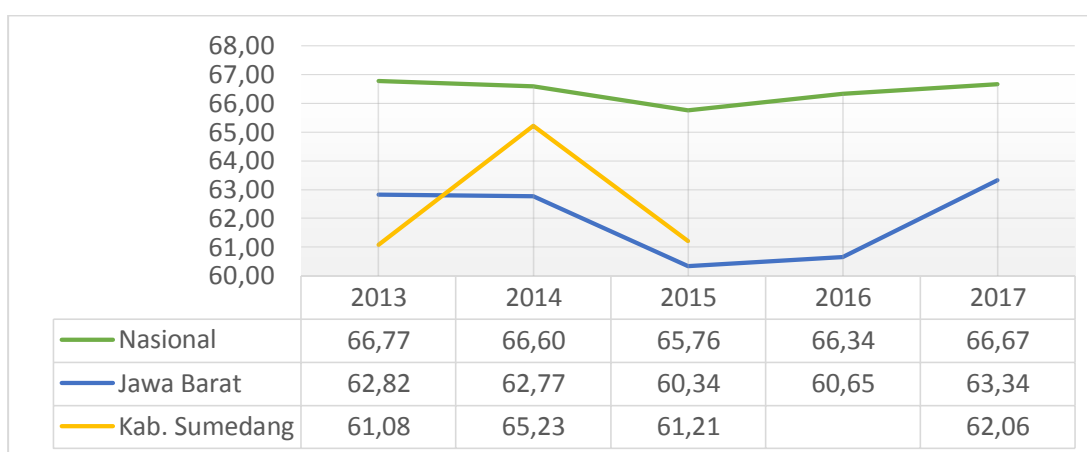


Sumber: BPS

Gambar 2-40 Posisi Relatif TPAK Kabupaten Sumedang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja yang mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK Kabupaten Sumedang tahun 2017 adalah sebesar 62,06%, artinya tersedia 62 orang penduduk yang siap bekerja dari 100 orang penduduk angkatan kerja. TPAK Kabupaten Sumedang masih berada dibawah rata-rata angka Nasional (66,67%) dan Jawa Barat (63,34%). Jika dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa barat, Kabupaten Sumedang menduduki posisi ke 8 terendah di Jawa Barat.

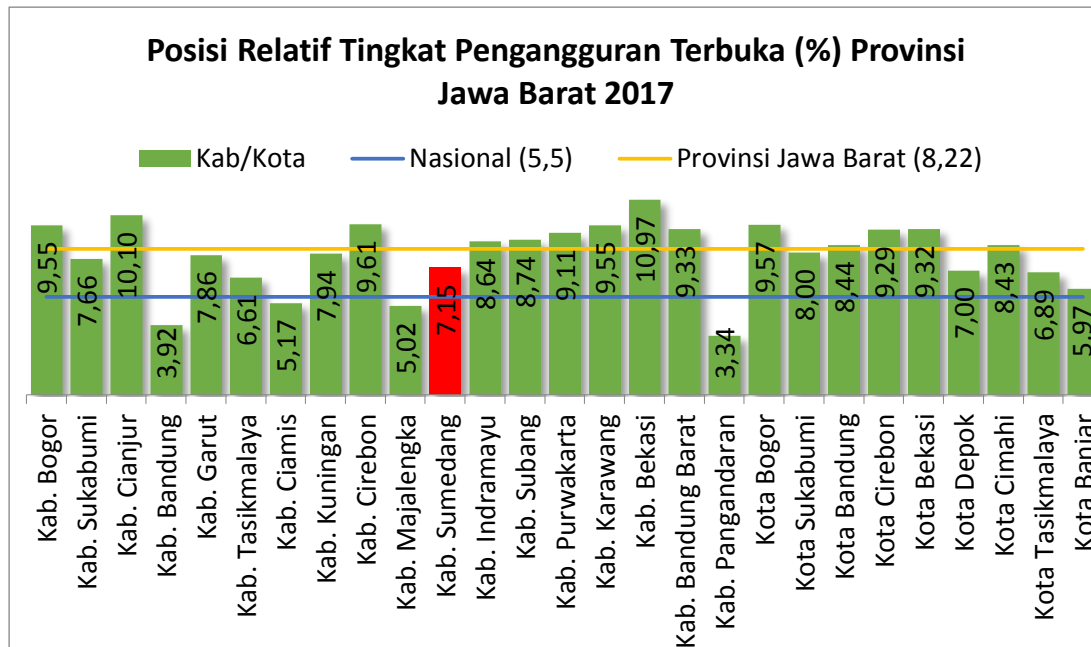
TPAK Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2017, menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2014 (65,23%) dan yang terendah terjadi pada tahun 2013 (61,08%). Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) TPAK Kabupaten Sumedang selalu berada dibawah rata-rata Nasional.



Sumber: BPS

Gambar 2-41 Perkembangan TPAK

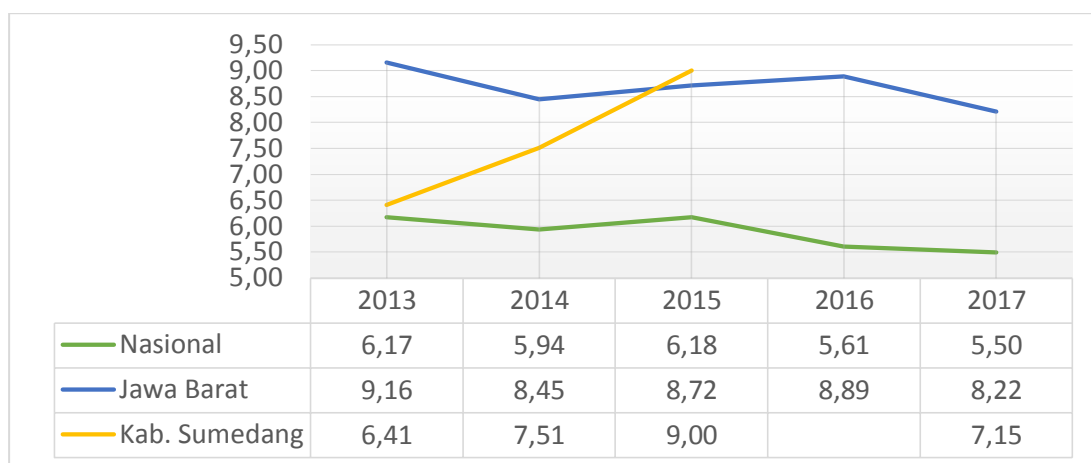
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja



Sumber: BPS

Gambar 2-42 Posisi Relatif TPT Kabupaten Sumedang

Grafik di atas merepresentasikan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten sumedang pada tahun 2017. TPT Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 sebesar 7,15%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat sekitar 8 orang yang merupakan pengangguran. TPT Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 masih berada di atas nilai Nasional (5,5%) akan tetapi sudah berada dibawah rata-rata Propinsi Jawa Barat (8,22%). Kabupaten Sumedang menempati peringkat 9 dengan nilai TPT terendah dari 27 Kab/Kota di Propinsi jawa barat.



Sumber: BPS

Gambar 2-43 Perkembangan TPT

TPT Kabupaten Sumedang tertinggi terjadi pada tahun 2015 (9,00%) dan terendah terjadi pada tahun 2013 (6,41%). Selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) posisi relatif TPT selalu berada di atas rata-rata Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa

jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja di Kabupaten Sumedang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial).

Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-15 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	12,04	13,13	29,54	15,32	12,04
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	8	36	54	73	24
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	25	27	20	15	16
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	19,37	19,15	20,46	21,33	-
5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi (%)	23,48	36	61	75	46
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	12,9	7	13	18	10

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 13,13% di tahun 2014 dan 29,54% di tahun 2015 kemudian pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan masing-masing menjadi 15,32% di tahun 2016 dan 12,04% di tahun 2017. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi kepada pengusaha maupun pekerja tentang pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing telah berhasil mengurangi angka sengketa pengusaha-pekerja.

D. Infrastruktur Dasar

Strategi peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur dasar merupakan salah satu strategi utama penanggulangan kemiskinan pada RPJMN Tahun 2015-2019. Pemerintah harus dapat memberikan layanan dasar dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan seperti air minum, sanitasi dan listrik.

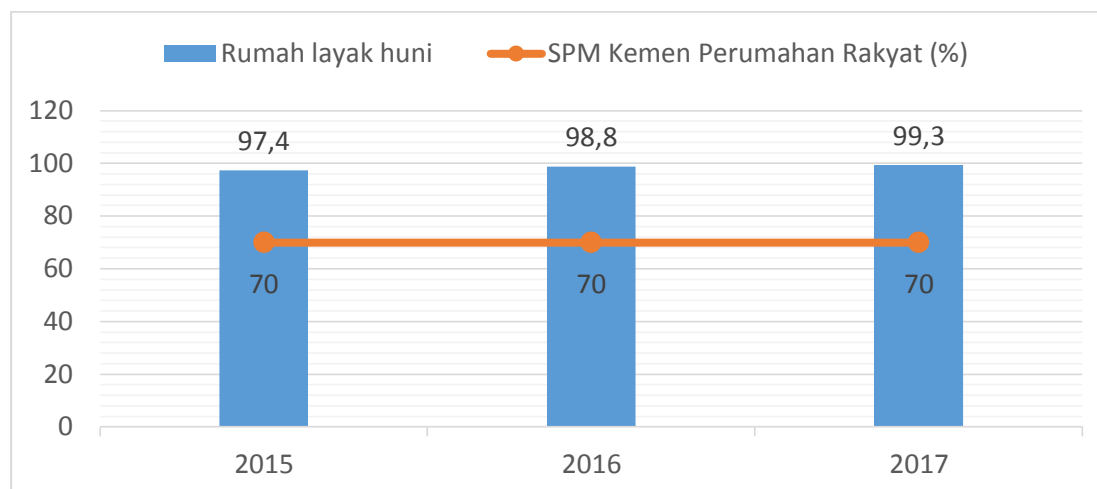
Target MDGs untuk lingkungan kumuh perkotaan pada tahun 2015 adalah 6%. Mengacu kepada Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 masih terdapat 16,7% kawasan pemukiman kumuh atau masih terdapat 55,04 Ha lingkungan pemukiman kumuh dari total 9.246 Ha kawasan pemukiman, dengan demikian target MDGs belum tercapai.

Tabel 2-16 Indikator Lingkungan Pemukiman Kumuh

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Pengurangan luasan Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha)	2.27	2.28	0.75
2	Persentase Kawasan Pemukiman kumuh (Luas Total Pemukiman Kumuh 55.04 Ha, Luas Total Kawasan Pemukiman 9,246 Ha)	-	-	16,7
3	Target MDGs (Ha)	6	6	6

Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumedang

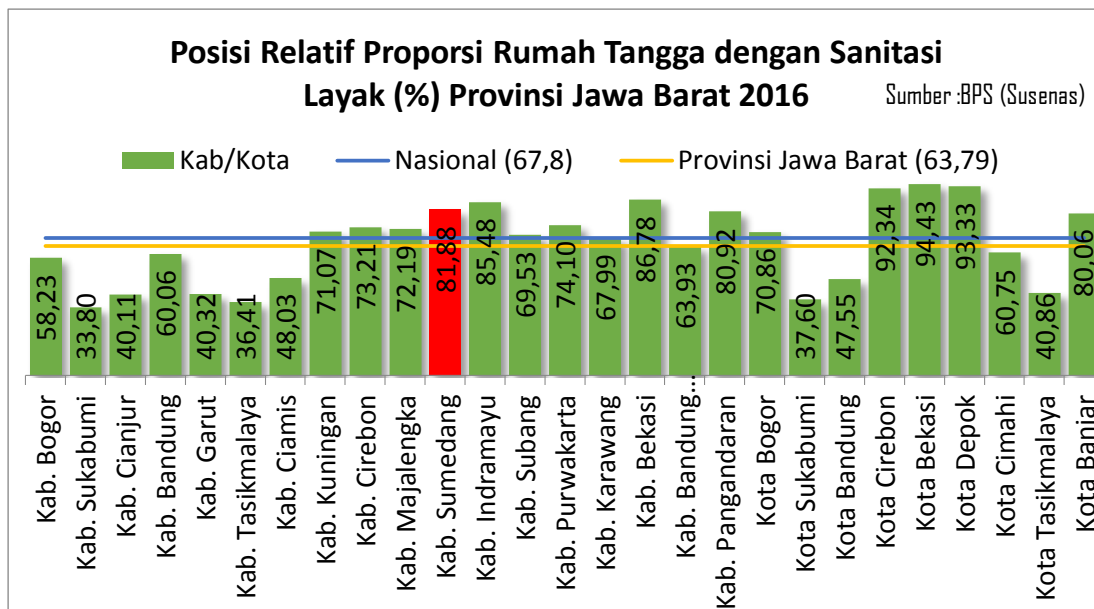
Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 tercatat 99,3%. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Sumedang telah mencapai target.



Sumber : Bappeda Kabupaten Sumedang

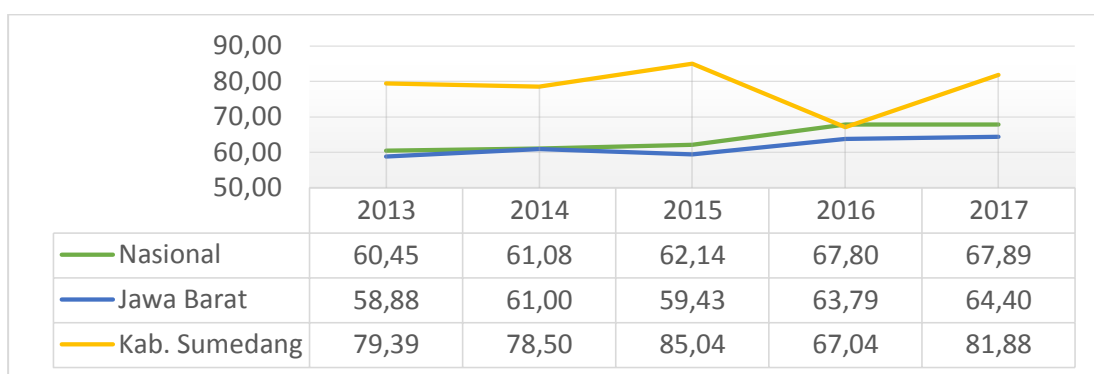
Gambar 2-44 Grafik Rumah Layak Huni

Berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Sumedang, pada tahun 2013 masih terdapat 87.909 rumah tangga yang belum menggunakan listrik atau 24,78% rumah tangga belum menggunakan listrik. Lebih lanjut, karena keterbatasan data sehingga hanya tahun 2013 yang dapat dideskripsikan realisasinya. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus mengupayakan seluruh warganya agar mendapatkan kebutuhan dasar listrik, disamping itu pengelolaan data dan informasi perlu terus ditingkatkan sehingga data-data seri dapat diakses sebagai dasar menentukan kebijakan pembangunan daerah secara tepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 2-45 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Sumedang

Grafik di atas menggambarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Sumedang tahun 2016. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak menggambarkan jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri dan bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Sumedang pada tahun 2016 adalah sebesar 81,88%. Artinya terdapat 81,88% rumah tangga yang menggunakan/ mempunyai akses sanitasi layak di Kabupaten Sumedang pada tahun 2016. Posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Sumedang tahun 2016 menempati urutan ke 6 tertinggi di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Sumedang tahun 2016 melebihi rata-rata Nasional (67,8%) dan Propinsi Jawa Barat (63,79%).



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2-46 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Kabupaten Sumedang

Selama periode 2013-2017 proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dan penurunan. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Sumedang selama periode 2013-2017 tertinggi terjadi pada tahun 2015 (85,04%) dan proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 (67,04%).

Selama periode tersebut proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Sumedang selalu berada diatas rata-rata proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Nasional dan propinsi Jawa Barat, kecuali pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2013-2017 jumlah rumah tangga dengan kondisi sanitasi layak Kabupaten Sumedang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang telah dilakukan selama kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik.

E. Pangan

Kabupaten Sumedang telah menunjukkan arah yang positif. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 sudah terdapat regulasi ketahanan pangan. Selanjutnya ketersediaan pangan utama (kg/1.000) mengalami tren peningkatan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Pada tahun 2013 tercatat 854.25 kemudian meningkat menjadi 921.66 di tahun 2017.

Tabel 2-17 Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (Kg/jiwa/tahun)	951.44	2,900.48	854.25	836.04	777.45	806.14	921.66

2.4.3. Kondisi Kemiskinan Mikro

Kemiskinan tidak hanya dapat diukur melalui indikator makro seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, namun juga dapat diindikasikan oleh beberapa indikator mikro. Indikator mikro ini dapat memberikan gambaran lebih rinci sampai dengan nama dan alamat dari individu dan rumah tangga sasaran.

Dalam penanggulangan kemiskinan, regulasi mensyaratkan penetapan individu dan rumah tangga sasaran harus mengacu kepada rumah tangga dan individu yang tercantum dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (OBDT) atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM). Data Terpadu PPFM adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 92 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Data Terpadu PPFM digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. Data Terpadu PPFM membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari Data Terpadu PPFM, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari Data Terpadu PPFM dengan memperolehnya melalui Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM tanpa dipungut biaya. Berikut ini gambaran Kabupaten Sumedang yang besumber dari Data Terpadu PPFM yang ditetapkan melalui Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

A. Status Kesejahteraan

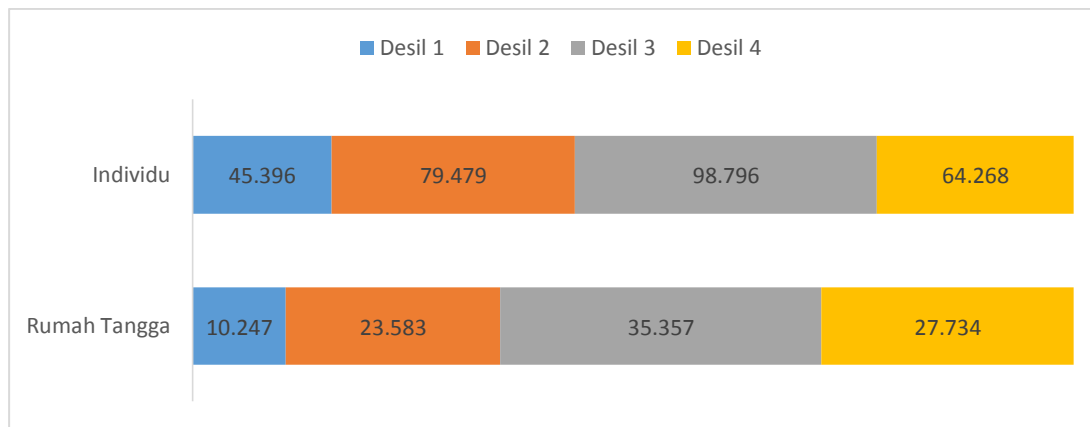
Data Terpadu PPFM berisi data rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah atau dibagi menjadi desil 1-4. Berikut ini kondisi Kabupaten Sumedang.

Tabel 2-18 Jumlah Rumah Tangga dan Individu dengan 40% Kesejahteraan Terendah

Keterangan	Kelompok				Total
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	
Rumah Tangga	10.247	23.583	35.357	27.734	96.921
Individu	45.396	79.479	98.796	64.268	287.939

Sumber: Kemensos

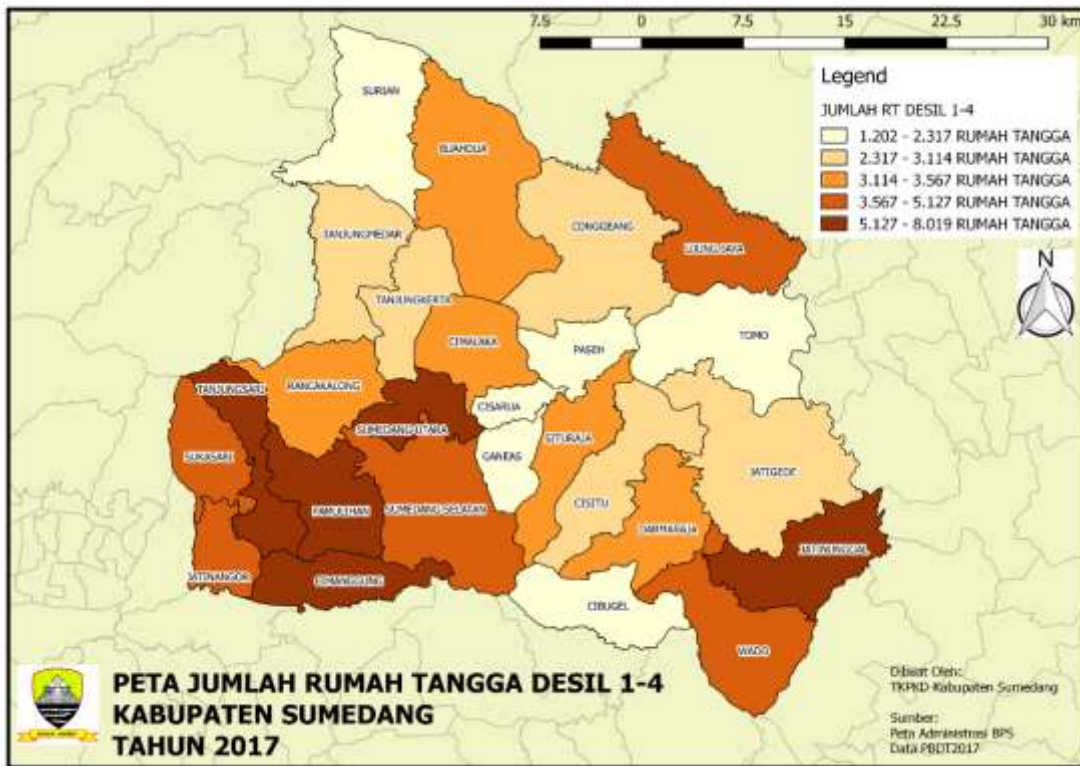
Jumlah rumah tangga dengan 40% rumah tangga terendah di Kabupaten Sumedang sebanyak 96.921 rumah tangga sedangkan individu berjumlah 287.939 jiwa. Dari pengelompokan terlihat bahwa baik rumah tangga maupun individu di Sumedang paling banyak terdapat di desil 3 atau hampir miskin.



Sumber: Kemensos

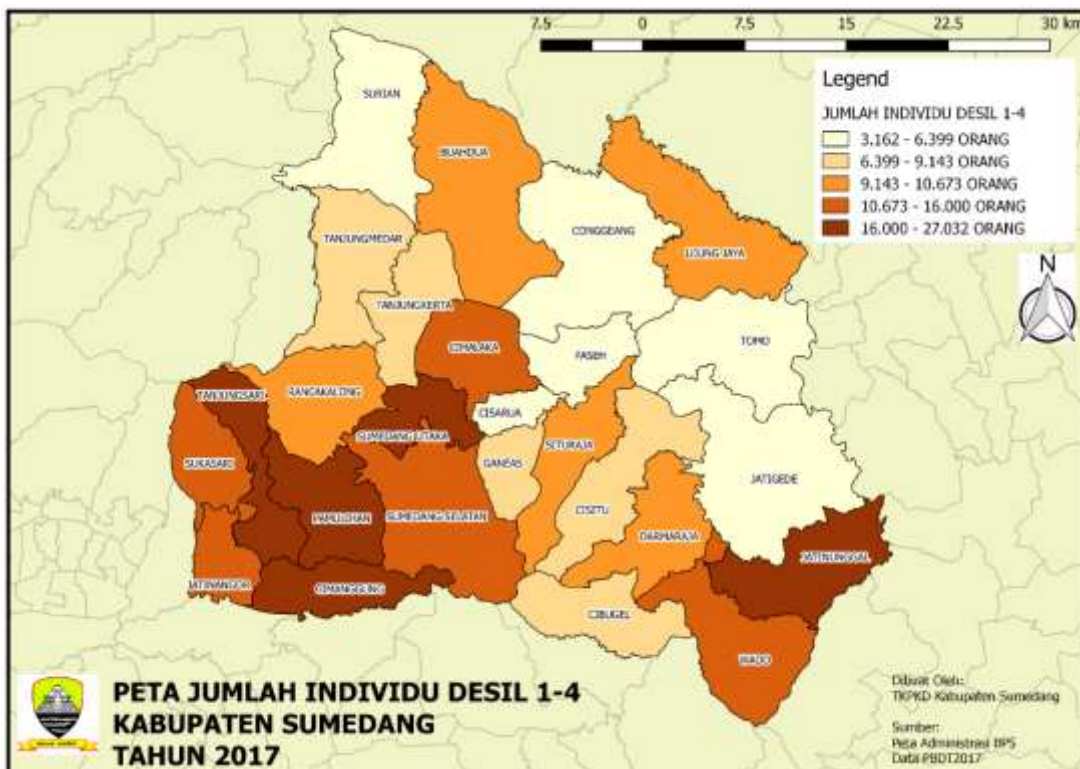
Gambar 2-47 Proporsi Rumah Tangga dan Individu Menurut Desil Kabupaten Sumedang

Rumah tangga desil 1-4 cenderung terkonsentrasi di wilayah selatan Kabupaten Sumedang, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2-48 Peta Jumlah Rumah Tangga Desil 1-4 Kabupaten Sumedang

Lima kecamatan dengan jumlah rumah tangga desil 1-4 terbanyak di Kabupaten Sumedang ditempati oleh Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Jatununggal, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sumedang Utara.



Gambar 2-49 Peta Jumlah Individu Desil 1-4 Kabupaten Sumedang

Kondisi kesejahteraan pada individu pun menunjukkan kondisi yang hampir serupa dimana jumlah individu miskin paling banyak tersebar di wilayah Sumedang Selatan, lima kecamatan dengan jumlah individu desil 1-4 terbanyak yaitu: Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Jatununggal, Kecamatan Tanjungsari

dan Kecamatan Sumedang Utara. Tiga kecamatan yaitu Cimanggung, Pamulihan dan Jatinunggal selalu menempati tiga besar.

Jumlah individu desil 1-4 yang terbanyak berjenis kelamin laki-laki dengan 29.348 orang sedangkan perempuan berjumlah 24.971 orang, sedangkan menurut kelompok umur, paling banyak pada usia produktif 15-44 tahun.

Tabel 2-19 Jumlah Individu Desil 1-4 Kabupaten Sumedang menurut Kelompok Umur

Keterangan	Jenis Kelamin		
	Laki	Perempuan	Jumlah
Usia di bawah 6 tahun	10.204	11.139	21.343
Usia 6 - 14 tahun	22.964	25.378	48.342
Usia 15 - 44 tahun	51.855	57.234	109.089
Usia 45 - 59 tahun	28.567	26.251	54.818
Usia 60 tahun keatas	29.348	24.971	54.319

Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

Tingginya jumlah individu miskin usia produktif merupakan potensi yang harus dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penduduk usia produktif memiliki tingkat kesehatan yang cenderung baik, sehingga dapat didorong untuk ikut serta dalam upaya produktif melalui skema pemberdayaan.

B. Pendidikan

Salah satu informasi bidang pendidikan pada Data Terpadu PPFM adalah jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah yang berasal dari rumah tangga desil 1-4. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, partisipasi pendidikan anak dari keluarga miskin semakin rendah.

Pada tahun 2017, jumlah anak yang bersekolah dari rumah tangga miskin sebanyak 50.268 orang, jenjang SD (7-12 tahun) menjadi jumlah terbanyak dengan 32.206 orang sedangkan jenjang SMA hanya 4.063 orang. Pada jenjang SD, jumlah anak tidak sekolah dari rumah tangga miskin tercatat sebanyak 4.536 orang sedangkan pada jenjang SMP (13-15 tahun) sebanyak 3.307 orang dan jenjang SMA 8.167 orang.

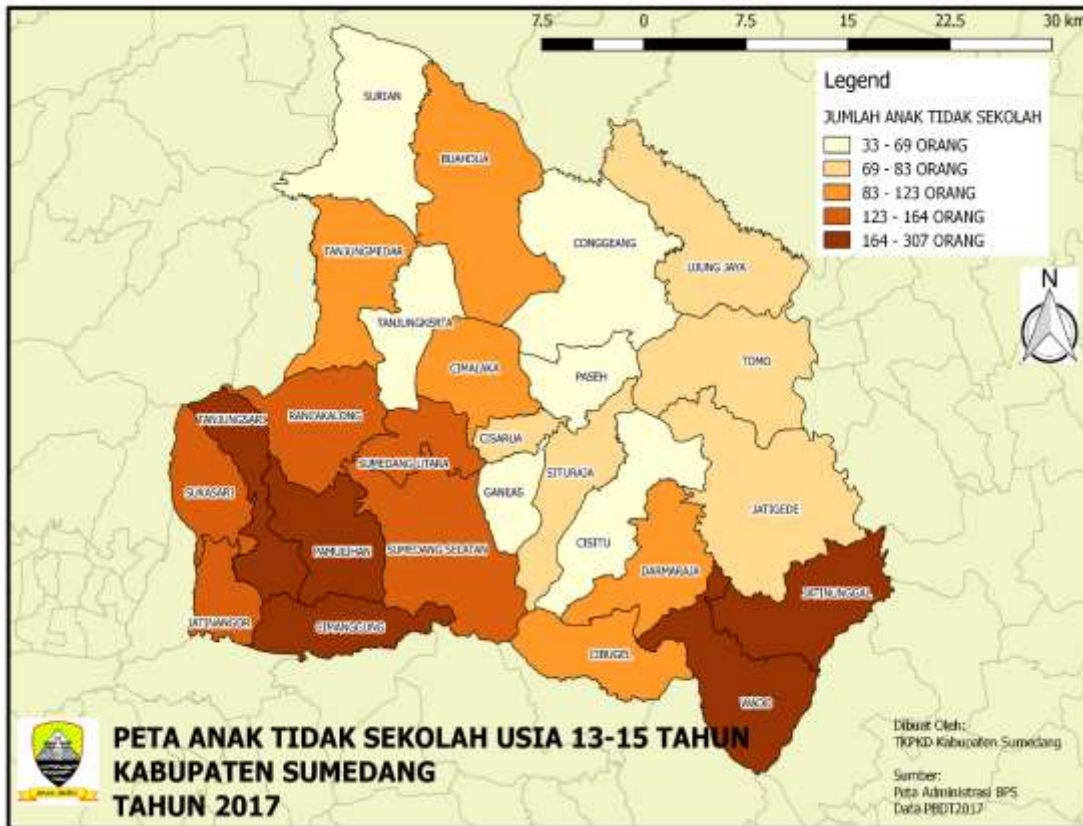
Tabel 2-20 Jumlah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Umur

Keterangan	Kelompok			Jumlah
	Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18	
Anak Bersekolah	32.206	13.999	4.063	50.268
Anak Tidak Bersekolah	4.536	3.307	8.167	16.010

Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

Kondisi partisipasi pendidikan yang rendah ini relevan dengan kondisi kemiskinan, jumlah anak yang tidak bersekolah paling banyak terdapat di wilayah selatan Kabupaten Sumedang. Lima kecamatan dengan jumlah anak tidak bersekolah paling banyak yaitu: Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Jatinunggal. Hal ini tergambar pada peta spasial di bawah ini.

Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Wado, dan Kecamatan Ujung Jaya.

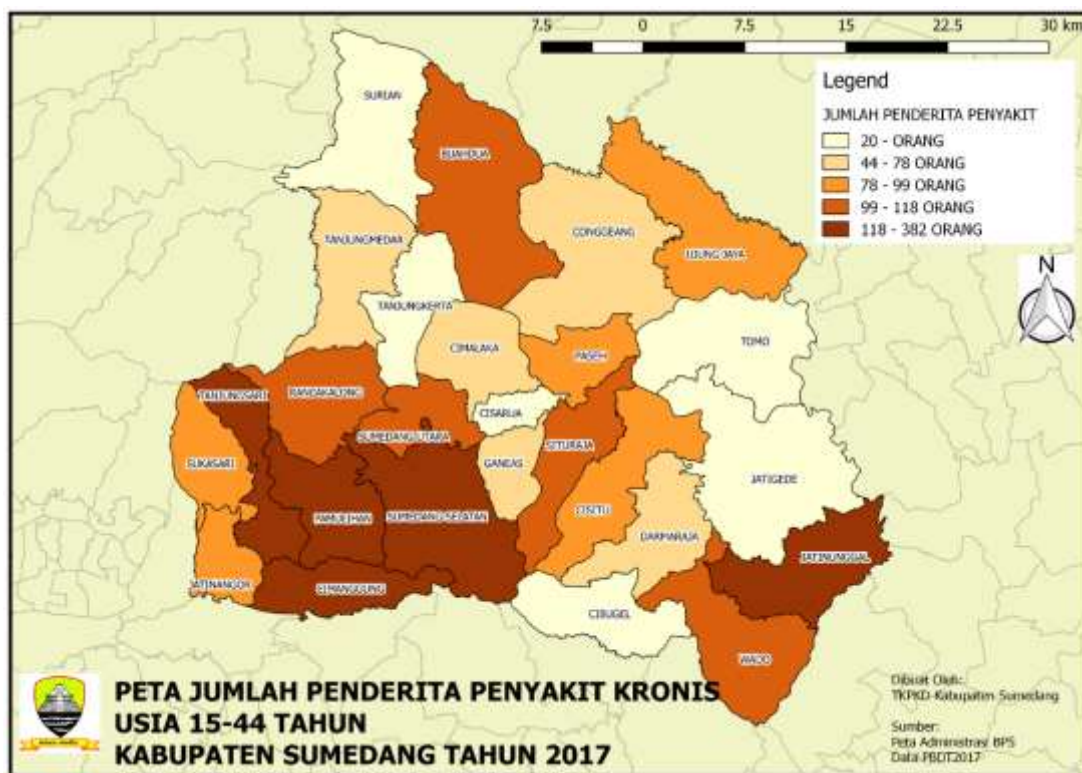


Gambar 2-52 Peta Jumlah Anak Tidak Sekolah Usia 13-15 Tahun Kabupaten Sumedang

Kondisi jumlah anak tidak sekolah usia 13-15 tahun Kabupaten Sumedang lebih banyak terkonsentrasi di selatan Sumedang, lima kecamatan dengan jumlah anak jenjang SMP yang tidak bersekolah yaitu: Kecamatan Cimanggung dengan 370 orang, Kecamatan Pamulihan dengan 295 orang, Kecamatan Wado dengan 264 orang), Kecamatan Jatinunggal dengan 209 orang dan Kecamatan Tanjungsari dengan 200 orang.

Meskipun pendidikan menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun kabupaten/kota bisa berkontribusi terutama bagi siswa yang berasal dari rumah tangga miskin. Lima kecamatan dengan jumlah anak tidak sekolah usia 16-18 tahun terbanyak di Kabupaten Sumedang yaitu: Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal dan Kecamatan Tanjungsari.

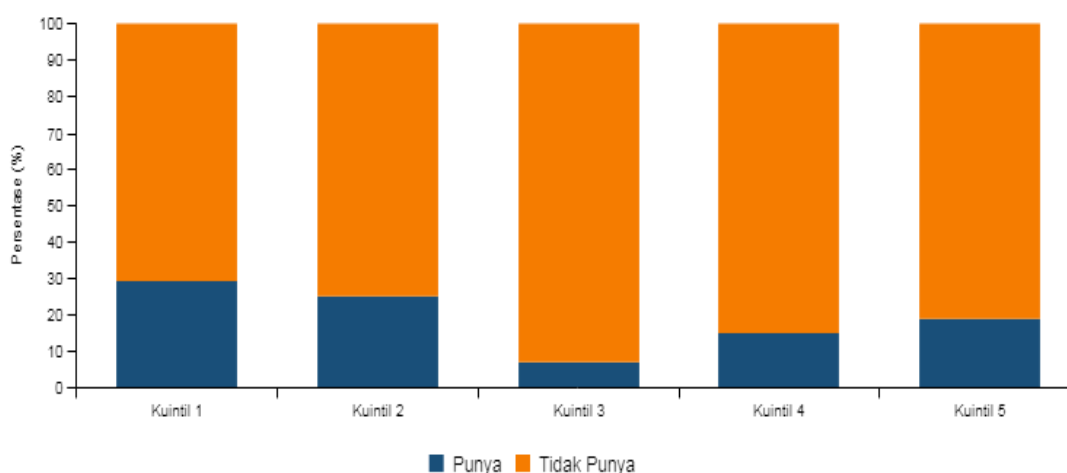
Dari beberapa data di atas terlihat bahwa Kecamatan Cimanggung merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara jumlah di Kabupaten Sumedang selain beberapa kecamatan lain seperti Pamulihan dan Jatinunggal.



Gambar 2-54 Peta Jumlah Penderita Penyakit Kronis Usia 15-44 Tahun Kabupaten Sumedang

Lima kecamatan dengan jumlah penderita penyakit kronis pada usia produktif yaitu Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Tanjungsari dan Jatinunggal. Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menjamin penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Jaminan Sosial adalah jaminan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk melindungi penduduknya saat mereka mengalami shock yang berakibat meningkatnya keterbatasan akses terhadap hal yang menjamin dirinya dapat hidup dengan layak.

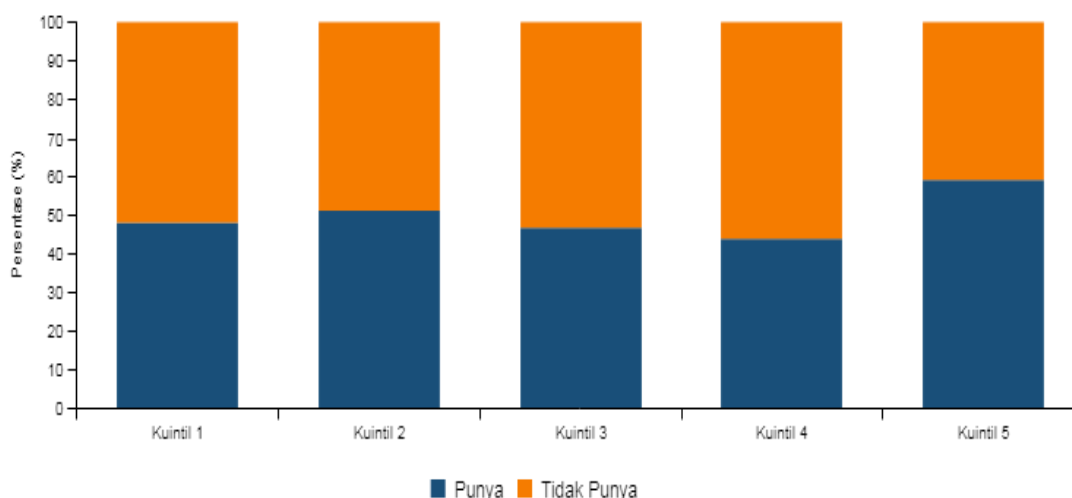


Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2-55 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial Kabupaten Sumedang

Dari gambar di atas terlihat bahwa kepemilikan jaminan sosial di Kabupaten Sumedang relatif rendah, kelompok dengan persentase penduduk yang tidak memiliki

jaminan sosial minimal satu yaitu pada kuintil 3. Masih rendahnya jaminan sosial relatif serupa dengan kepemilikan jaminan kesehatan, meskipun menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik. Jaminan kesehatan dapat diperoleh dari kepesertaan BPJS atau kepesertaan Jamkesda.



Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2-56 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial Kabupaten Sumedang

Berdasarkan hasil pengolahan SEPAKAT Bappenas, dari total observer sebanyak 102.920 observer yang berasal dari penduduk dengan 20% termiskin di Kabupaten Sumedang, baru 29% yang sudah memiliki jaminan sosial dan jaminan kesehatan, masih ada 71% penduduk yang tidak memiliki jaminan sosial. Kondisi pada penduduk 20% terkasya menunjukkan seluruh observer sebanyak 48.128 orang mengaku seluruhnya sudah memiliki jaminan sosial.

D. Ketenagakerjaan

Data terpadu PPFM dapat menunjukkan status pekerja individu dari kesejahteraan 40% terendah. Jumlah penduduk miskin pada kelompok desil 1-4 yang bekerja sebanyak 92.453 orang dan yang belum bekerja sebanyak 178.727 orang jauh lebih banyak. Data menunjukkan masih ada pekerja anak yang berumur 5-14 tahun yang terpaksa bekerja, hal ini kondisi yang kurang baik.

Tabel 2-22 Jumlah Penduduk Desil 1-4 yang Bekerja dan Tidak Bekerja

Keterangan	Status	
	Bekerja	Tidak Bekerja
Usia 5 - 14 tahun	137	52.840
Usia 15 - 59 tahun	73.681	90.207
Usia 60 tahun keatas	18.635	35.680
TOTAL	92.453	178.727

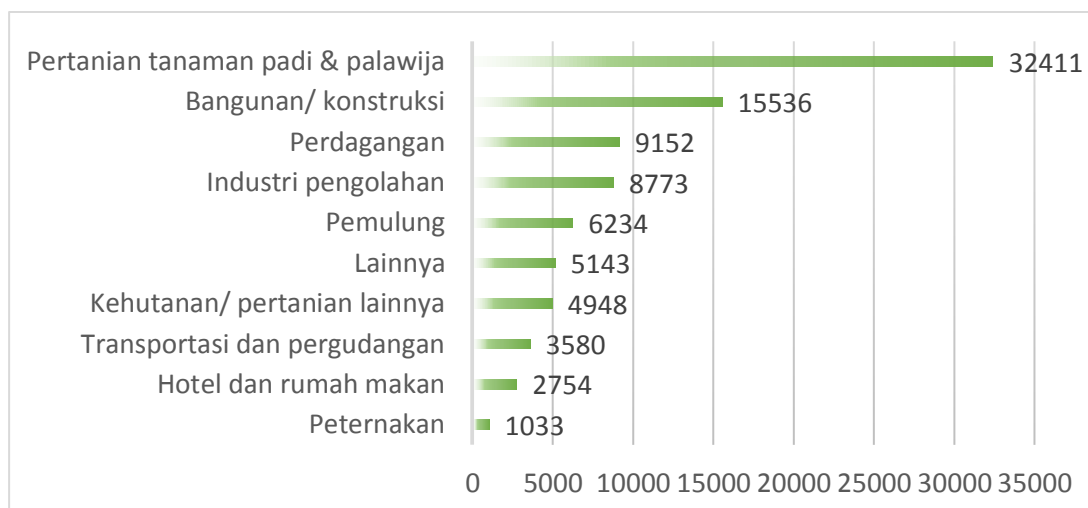
Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

Penduduk miskin paling banyak bekerja pada sektor informal dan dengan karakteristik unskill yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Lima pekerjaan yang paling banyak digeluti yaitu sektor Pertanian tanaman padi & palawija, sektor bangunan/konstruksi, sektor Perdagangan, sektor Industri pengolahan dan sektor Pemulung.



Gambar 2-57 Jumlah Penduduk Tidak Bekerja Usia 15-59 Tahun Kabupaten Sumedang

Jumlah pengangguran yang tinggi terkonsentrasi di wilayah Sumedang Selatan dimana lima kecamatan terbanyak ditempati oleh Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Jatinangor.



Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

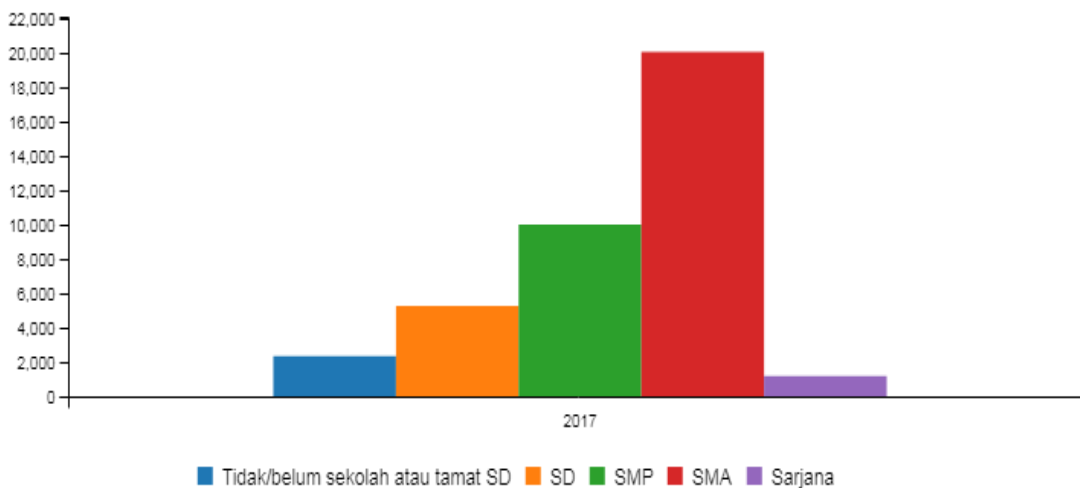
Gambar 2-58 Sepuluh Sektor Penyerap Tenaga Kerja dari Kelompok Desil 1-4

Sektor pertanian, padi dan palawija sebagai sektor terbesar dengan kontribusi tertinggi dalam perekonomian dan juga penyerap individu miskin tertinggi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah timur Kabupaten Sumedang.



Gambar 2-59 Peta Jumlah Penduduk Desil 1-4 yang Bekerja di Sektor Pertanian, Padi dan Palawija Kabupaten Sumedang

Lima kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian yaitu Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Darmaraja.



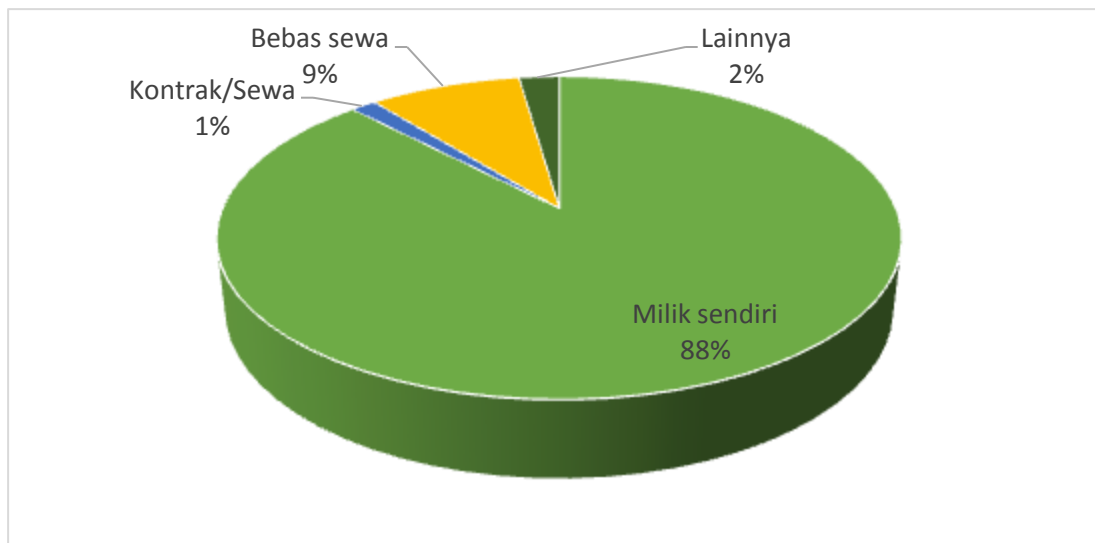
Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2-60 Penduduk Menganggur Terbuka Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Pada tahun 2017, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mayoritas pengangguran terbuka masih berpendidikan SMA, diikuti oleh SMP, SD bahkan tidak atau belum sekolah.

E. Kepemilikan Asset

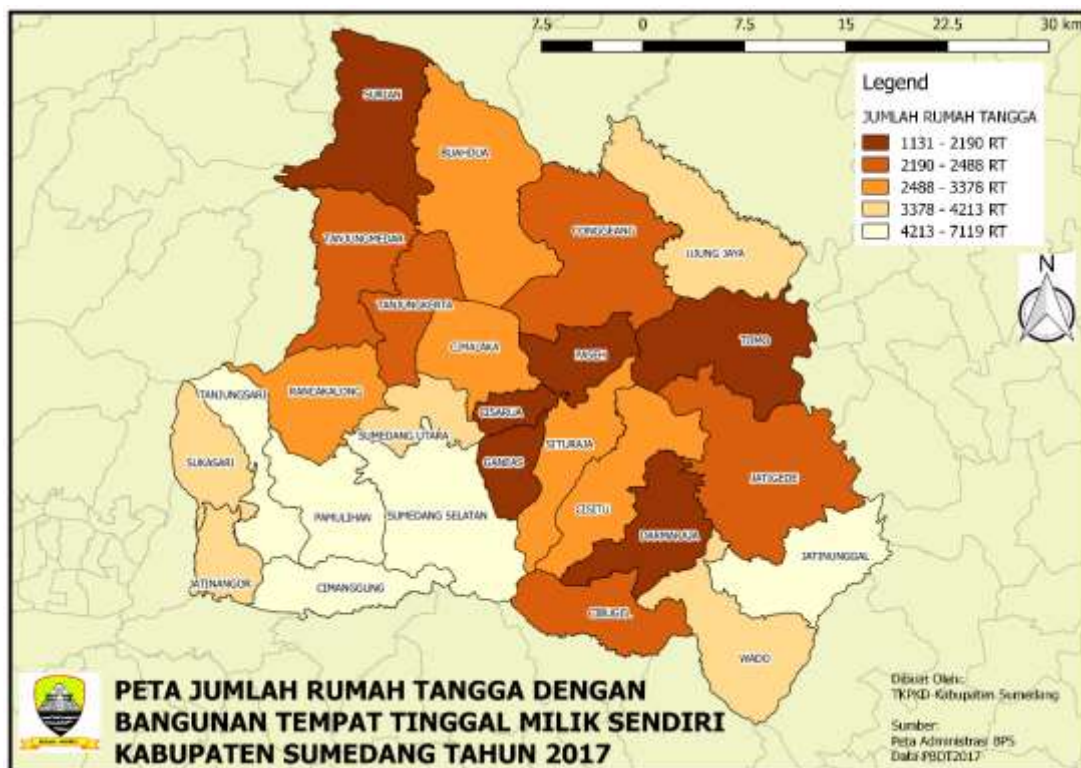
Salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya kepemilikan akan akan asset, data terpadu PPFM menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga miskin (88%) sudah memiliki bangunan milik sendiri.



Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

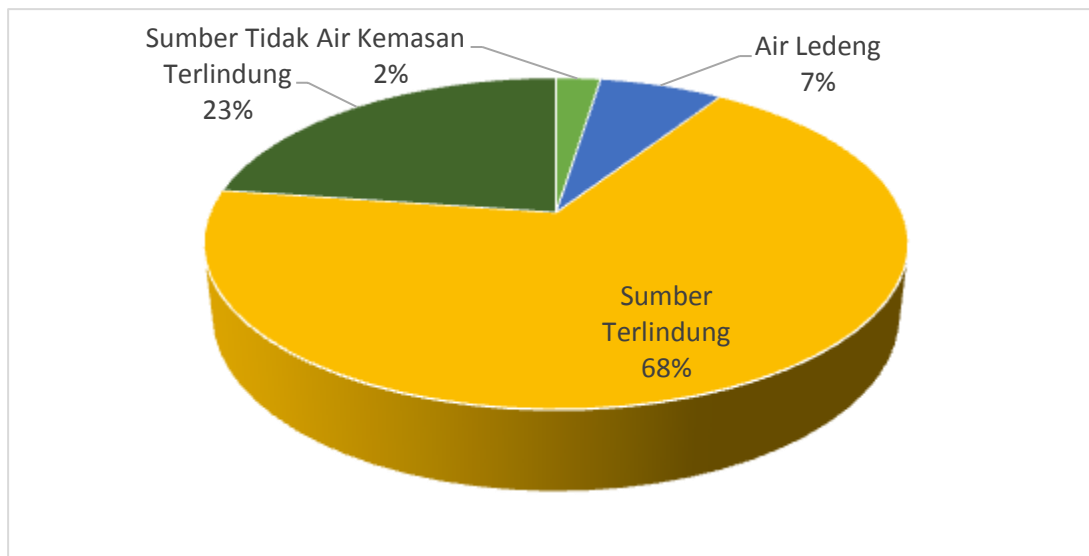
Gambar 2-61 Persentase Kepemilikan Bangunan Menurut Status

Secara spasial sebaran penduduk miskin yang sudah memiliki bangunan/rumah milik sendiri lebih banyak terdapat di wilayah selatan Kabupaten Sumedang, yang tergambar sebagai berikut.



Gambar 2-62 Peta Jumlah Rumah Tangga dengan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri

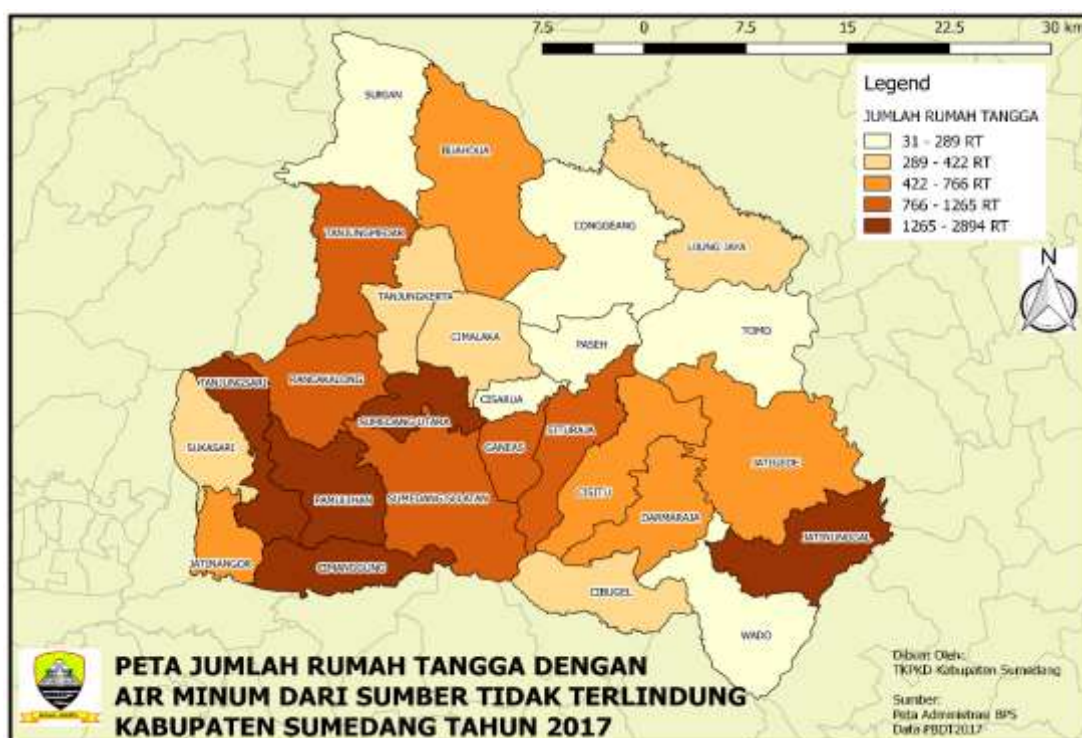
Lima kecamatan dengan jumlah kepemilikan bangunan milik sendiri yaitu Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Jatinunggal dan Kecamatan Tanjungsari.



Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

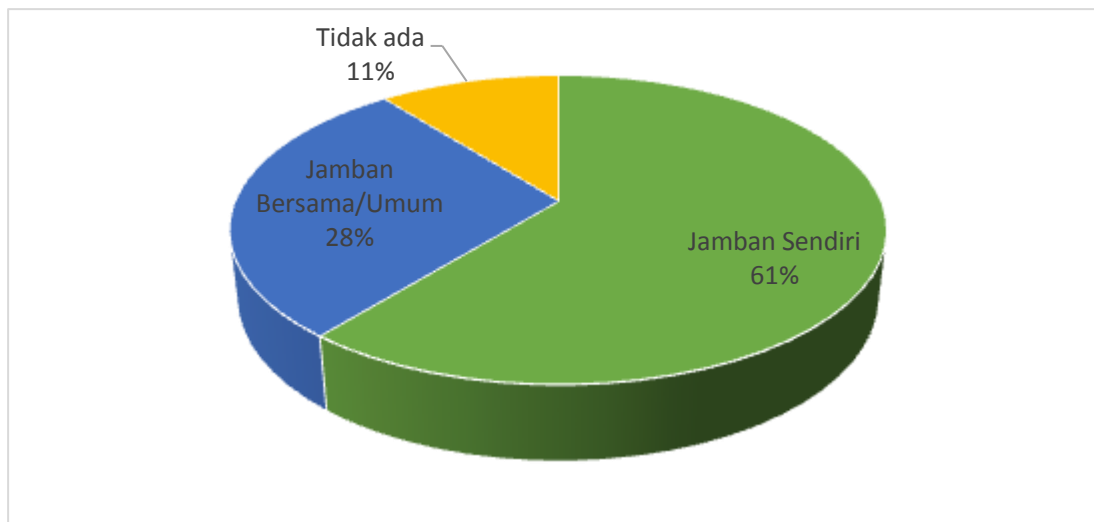
Gambar 2-63 Proporsi Akses Rumah Tangga Desil 1-4 terhadap Sumber Air Minum

Mayoritas rumah tangga desil 1-4 sudah mendapatkan air minum dari sumber terlindung sebesar 68% namun masih ada 23% yang masih mendapatkan air minum dari sumber tidak terlindung, air ledeng baru dinikmati oleh 7% rumah tangga miskin dan rentan.



Gambar 2-64 Peta Jumlah Rumah Tangga dengan Air Minum dari Sumber Tidak Terlindung

Kepemilikan jamban sangat terkait dengan sanitasi lingkungan, dan sanitasi akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini sangat penting dimiliki oleh rumah tangga miskin dan daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan.



Sumber: Data Terpadu PPFM Kemensos

Gambar 2-65 Proporsi Rumah Tangga dengan Kepemilikan Jamban

Mayoritas (61%) rumah tangga desil 1-4 telah memiliki jamban sendiri, sedangkan 28% lainnya mengakses jamban melalui jamban bersama dan atau umum, masih ada 11% rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Pemerintah harus memberikan program yang tepat sehingga selain dapat menurunkan kemiskinan juga dapat meningkatkan indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak.

BAB III
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

3.1. Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Pemerintah sangat memprioritaskan upaya penanggulangan kemiskinan, hal ini terlihat dari penurunan kemiskinan menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) baik RPJMN 2010-2014 maupun RPJMN tahun 2015-2019.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan didefinisikan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan peran *stakeholders* pembangunan lainnya.



Sumber: Bappenas (diolah)

Gambar 3-1 Transformasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Upaya penanggulangan kemiskinan pada RPJMN tahun 2010-2014 dikenal dengan pengelompokan menjadi 4 klaster, (1) klaster I yaitu bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi; (2) Klaster II yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan; (3) Klaster III yaitu Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha, ekonomi mikro dan kecul dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

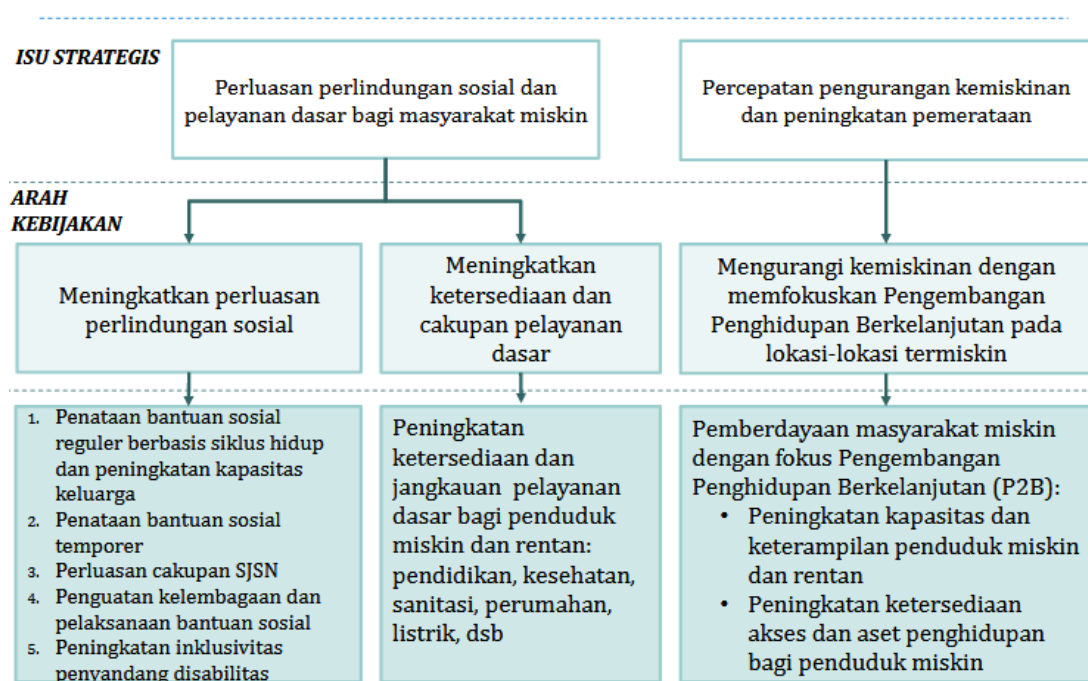
Selain tiga instrumen utama penanggulangan kemiskinan di atas, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat. Upaya peningkatan dan perluasan

program *pro-rakyat* (Klaster IV) dilakukan melalui (1) Program Rumah Sangat Murah; (2) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; (3) Program Air Bersih Untuk Rakyat; (4) Program Listrik Murah dan Hemat; (5) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; dan (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

Program yang digulirkan pada klaster I yaitu (1) Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM); (3) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); (4) Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

Pada klaster II program utama yang digulirkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu (1) PNPM Mandiri Perdesaan; (2) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI; (3) PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas; (4) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan; (5) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif; (6) PNPM Mandiri Respek; (7) PNPM Mandiri Perkotaan; (8) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan; (9) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); (10) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); (11) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus; (12) PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan; (13) PNPM-Mandiri Pariwisata; dan (14) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman. Program lain pada klaster II yaitu Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Sedangkan program unggulan pada klaster II yaitu: (1) Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Selanjutnya pada RPJMN tahun 2015-2019, isu strategis terkait dengan penanggulangan kemiskinan yaitu Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Isu ini kemudian dijawab melalui tiga arah kebijakan yang kemudian dikenal dengan tiga strategi penanggulangan kemiskinan yaitu: (1) Meningkatkan perluasan perlindungan sosial (2) Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar; dan (3) Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin.

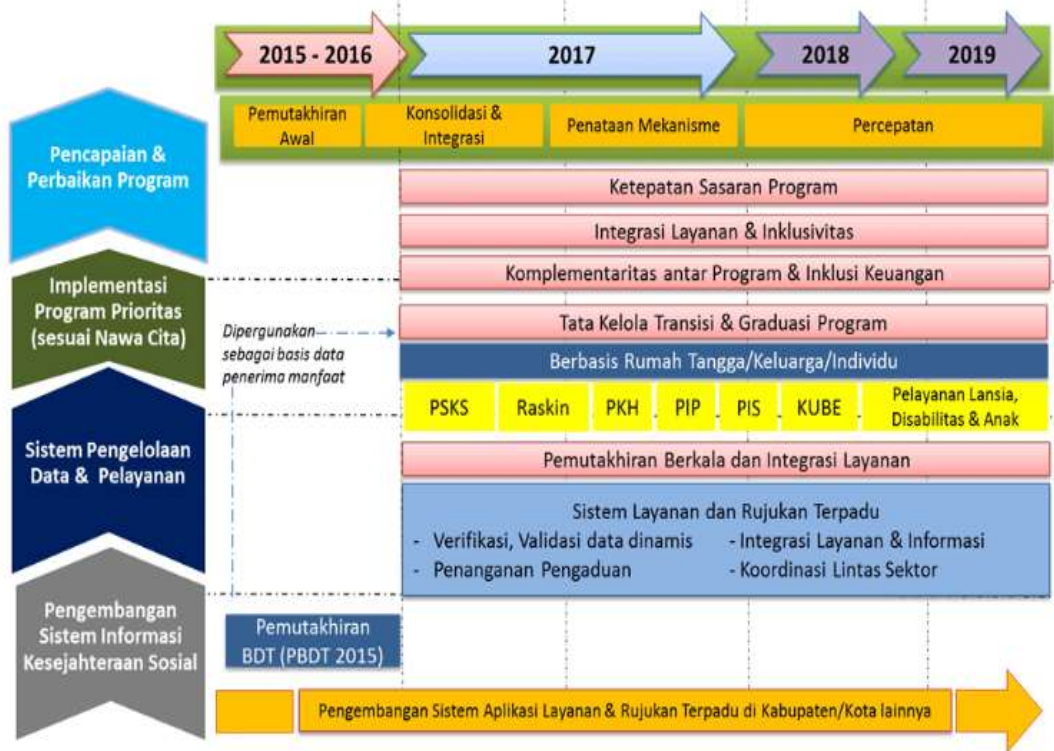


Sumber: BAPPENAS

Gambar 3-2 Isu Startegi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Konsep klaster I-IV kemudian bertransformasi dan harmonisasi menjadi konsep *sustainable livelihood* yang terbagi menjadi lima asset yaitu; (1) aset finansial berupa bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar; (2) aset manusia berupa balai pelatihan kerja; (3) aset infrastruktur berupa perbaikan kampung, listrik, air minum; (4) aset alam berupa perlindungan lingkungan dan (5) aset sosial berupa perencanaan partisipatif komunitas.

Selain optimalisasi tiga strategi utama tersebut, kementerian sosial (Kemensos) mencoba mendukung percepatan/akselerasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT memiliki empat fungsi utama yaitu: integrasi layanan dan informasi; identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan; pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala di daerah. Penyelenggara SLRT diharapkan mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.



Sumber: BAPPENAS

Gambar 3-3 Peta Jalan Perlindungan Sosial Periode 2015-2019

3.2. Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan

Visi yang diusung oleh Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023. Visi ini kemudian diturunkan kedalam lima misi:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Secara umum penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sumedang mengacu kepada tiga strategi nasional penanggulangan kemiskinan yaitu: (1) perlindungan sosial yang komprehensif; (2) Peningkatan Pelayanan dasar dan Infrastruktur Dasar; dan (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B). Tiga strategi tersebut pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sumedang selama ini telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Berikut ini program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui PD terkait:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. Pemberdayaan KUBE;
 - b. Pemberdayaan UEP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyakit Sosial;
 - d. Pendampingan Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - e. Pendampingan Program Keluarga Harapan;
 - f. Pelayanan Jamkesda;
 - g. Bantuan Pangan Non Tunai / Rastra;
 - h. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam Non Alam;
 - i. Jaminan Sosial Lanjut Usia;
 - j. Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah;
 - k. Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat;
 - l. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa;
 - m. Pelatihan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana;
 - n. Verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti;
 - o. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas PSKS; dan
 - p. Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
2. Dinas Pendidikan
 - a. Bantuan Operasional PAUD (DAK Reguler Non Fisik);
 - b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN dan SMP;
 - c. Bantuan PIP-Program Indonesia Pintar SD dan SMP;
 - d. Publikasi dan Management Pendataan Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 - e. Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang SD/MI dan SMP/MTs; dan
 - f. Bantuan Biaya Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.
3. Dinas Kesehatan
 - a. Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - c. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Asuransi); dan
 - d. Jampersal.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - a. Pengembangan desa Mandiri Pangan;

- b. Kawasan Rumah Pangan Lestari; dan
 - c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - b. Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat;
 - c. Penciptaan wirausaha muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri; dan
 - d. Penempatan Transmigrasi.
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
Program kependudukan dan keluarga berencana - Pelayanan KB keliling.
 7. Dinas Perikanan dan Peternakan
 - a. Pengembangan Usaha Budidaya Domba/Kambing; dan
 - b. Pengembangan Usaha Budidaya Unggas.
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian:
 - a. Pelatihan kewirausahaan anggota koperasi berbasis sumberdaya local;
 - b. Kegiatan Pelatihan Kemasan Produk UMKM;
 - c. Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kualitas sarana Prasarana Usaha Mikro;
 - d. Kegiatan Penataan dan fasilitasi Sarana dan Prasarana UMKM;
 - e. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM;
 - f. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan UMKM;
 - g. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru;
 - h. Kegiatan Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA; dan
 - i. Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Sumedang.
 9. Sekretriariat Daerah
 - a. Bantuan Hukum bagi Orang atau kelompok orang miskin;
 - b. Penyusunan Regulasi Daerah Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. Evaluasi Sinergitas Penanganan Kemiskinan berbasis Ekonomi .
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Program BSMSS;
 - b. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Program TMMD; dan
 - c. Pembinaan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (Pelayanan Sosial Dasar).

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Data kemiskinan masih belum dimanfaatkan dengan baik;
2. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara parsial dan sektoral;
3. Program penanggulangan kemiskinan belum menggunakan data terpadu PPFM dalam menentukan RTS; dan
4. Belum ada layanan terpadu satu pintu yang dapat mengintegrasikan seluruh program.

3.3. Review Penanggulangan Kemiskinan

Berikut ini hasil evaluasi capaian indikator makro kemiskinan terhadap capaian target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018.

**Tabel 3-1 Hasil Evaluasi Capaian Target Indikator Kemiskinan RPJMD
Kabupaten Sumedang**

Indikator	2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IPM	73,36	68,76	73,76	69,29	74,15	69,45	74,55	70,07
Indeks Gini	0,29	0,33	0,28	0,34	0,27	0,37	0,26	0,39
Tingkat Kemiskinan	11,31	10,78	10,81	11,36	10,31	10,57	9,80	10,53
TPT	7,04	7,51	6,66	9,00	6,28	9,00	5,90	7,15
TPAK perempuan	30,34	49,95	31,86	42,63	33,45	42,60	35,12	42,86
LPE	4,87	4,71	5,05	5,25	5,24	5,70	5,42	6,23

Sumber: Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas indikator kemiskinan seperti tingkat kemiskinan, TPT, Indeks Gini tidak berhasil dicapai begitu juga dengan indikator lain seperti IPM yang masih masuk dalam kategori kuning.

Indeks gini Kabupaten Sumedang cenderung meningkat dan menjauhi target RPJMD yang terus menurun setiap tahunnya, hal ini menggambarkan meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumedang. Tingkat kemiskinan Sumedang hanya berhasil mencapai target pada tahun 2014, selanjutnya masuk dalam kategori kuning meskipun secara tren menunjukkan penurunan yang presisten.

TPT Kabupaten Sumedang menurun dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 tercatat sebesar 7,15% menurun dari tahun sebelumnya yang masih berada pada angka 9% namun belum berhasil mencapai target RPJMD sebesar 5,90%. TPAK perempuan meskipun cenderung stagnan namun berhasil mencapai target dalam empat tahun terakhir.

LPE Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan yang presisten yaitu dari 4,71% pada tahun 2014 kemudian terus meningkat hingga mencapai 6,23% pada tahun 2017. Kabupaten Sumedang hanya gagal mencapai target LPE pada tahun 2014, sedangkan pada tahun-tahun setelahnya selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Berikut ini hasil evaluasi pencapaian indikator kemiskinan Kabupaten Sumedang terhadap target RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3-2 Pencapaian Indikator Kemiskinan Kabupaten Sumedang Terhadap Target RPJMD Provinsi Jawa Barat

Uraian	Target RPJMD Jawa Barat					Capaian Kabupaten Sumedang				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Kemiskinan Konsumsi</i>										
Angka Kemiskinan	9,22	8,50 - 8,00	8,00 - 7,50	7,50 - 7,00	8,000	11,31	10,77	11,36	10,57	10,53
Indeks Gini	0,40-0,39	0,38-0,37	0,37-0,36	0,36-0,35	0,390	0,337	0,328	0,349	0,367	0,387
<i>Ketenagakerjaan</i>										
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,01	64,00- 65,00	65,00- 66,00	66,00- 67,00	60,96	61,08	65,23	61,21		62,06
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,22	8,50-8,00	8,00-7,50	7,50-7,00	8,00	6,41	7,51	9,00		7,15
<i>Kesehatan</i>										
AHH (Angka Harapan Hidup)	68,70-68,90	69,00- 69,20	70,00- 70,25	70,50- 70,00	72,77- 72,96	71,86	71,89	71,91	71,96	72,00
<i>Ekonomi</i>										
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,06	5,90-6,50	6,20-6,80	6,30-6,90	5,50-5,76	4,84	4,71	5,25	5,7	
<i>Pembangunan Manusia dan Gender</i>										
Indeks Pembangunan Manusia	73,4	74,25- 74,75	74,75- 75,50	75,50- 76,00	70,82- 71,03	68,47	68,76	69,29	69,45	70,07
Indeks Pemberdayaan Gender	69,70	70,00	72,02	73,00	69,40	64,82	72,32	68,69		

Sumber: BPS-RPJMD Jawa Barat (revisi)

Hasil evaluasi capaian indikator-indikator makro kemiskinan Kabupaten Sumedang terhadap target RPJMD Provinsi Jawa Barat terlihat bahwa masih banyak indikator yang tidak berhasil mencapai target RPJMD. Hanya dua indikator yang telah berhasil mencapai target yaitu TPT dan AHH. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Sumedang sebesar 7,15% sedangkan target RPJMD sebesar 8,00%.

Nilai capaian lima indikator lainnya masih masuk dalam kategori kuning artinya belum mencapai target namun masih *on track* atau masih bisa diupayakan melalui akselerasi. Angka kemiskinan masih terpaut cukup jauh dari target, nilai Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumedang sebesar 10,53% sedangkan target RPJMD Jawa Barat sebesar 8,00%.

Gini ratio Kabupaten Sumedang tahun 2017 tercatat 0,387 poin angka ini masuk dalam kategori moderat, angka ini berhasil melampaui target RPJMD Jawa Barat yaitu sebesar 0,390 poin. Indikator ini hanya gagal mencapai target pada tahun 2016.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 baru memasuki kategori tinggi dengan angka 70,07 setelah sebelumnya masih masuk dalam kategori sedang. Meskipun demikian, target IPM Jawa Barat tahun 2017 adalah 71,03 sehingga nilai capaian masih di bawah target.

3.4. Rencana Pengembangan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang ditargetkan mencapai 5,76 persen pada tahun 2023. Target persentase penduduk miskin per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-3 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rentan miskin. Dua hal tersebut akan sangat terkait dengan program-program pada bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4-1 RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Urusan Pendidikan										
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Siswa PAUD yang Melanjutkan Kejenjang SD/MI	100.00	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disdik
	Bantuan Opreasional PAUD	Cakupan bantuan operasional PAUD	n/a	PAUD	100	100	100	100	100	100	
	Program Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs	119.01	Persen	119.13	119.25	119.37	119.49	119.61	119.61	Disdik
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK/MA	88.69	Persen	88.95	89.21	89.48	89.74	90.00	90.00	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0.09	Persen	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0.81	Persen	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	
	Sosialisasi PIP SMP	Jumlah lembaga SMP yang disosialisasi	106	Lembaga	118	118	118	118	118	118	
	Sosialisasi PIP SD	Jumlah lembaga SD yang disosialisasi	596	Lembaga	596	596	596	596	596	596	
	Sosialisasi PIP Pendidikan Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Masyarakat yang disosialisasi	187	Lembaga	187	187	187	187	187	187	
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN	Persentase sekolah yang mendapatkan bantuan BPS SD	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Persentase sekolah yang mendapatkan bantuan BPS SD	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) SD	Persentase siswa yang mendapatkan program PIP SD	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) SMP	Persentase siswa yang mendapatkan program PIP SMP	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Program Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Paket A	0.06	Persen	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	Disdik
		Angka Partisipasi Kasar Paket B	0.71	Persen	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.20	
		Angka Partisipasi Kasar Paket C	3.13	Persen	3.03	2.93	2.83	2.73	2.63	2.63	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Paket A/B/C	Jumlah lembaga	76	Lembaga	76	76	76	76	76	76	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Pendidikan	85.47	Persen	86.32	87.17	88.03	88.89	90.00	90.00	Disdik
	Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SD	Persentase pengelolaan administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SD	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pengelolaan Administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang SMP	Persentase pengelolaan administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang SMP	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Kesehatan										
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase PPK BLUD memiliki IKM Kategori Baik	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinkes
		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	83	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pelayanan kesehatan gawat darurat medis pra fasilitas kesehatan	0	Persen	50	60	75	90	100	100	
	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase puskesmas terbiayai BOK	35	Persen	35	35	35	35	35	35	
	Pembangunan RS Pratama	Persentase proses pembangunan RS Pratama sampai dengan pembangunan RS Pratama	20	Persen	40	60	80	90	100	100	
	Program Pembiayaan dan Jaminan kesehatan	Persentase kepesertaan JKN seluruh penduduk sumedang	73.17	Persen	95	96	97	98	100	100	Dinkes
	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN)	Persentase pembayaran premi bagi peserta jamkesda terintegrasi JKN	73.17	Persen	95	96	97	98	100	100	
	Jaminan Kesehatan daerah (JAMKESDA)	Persentase peserta jamkesda yang terbiayai diluar kuota JKN	68.5	Persen	95	96	97	98	100	100	
	Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Persentase Pelayanan PPK BLUD yang sesuai standar	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinkes
	Pelayanan Kesehatan PPK BLUD Puskesmas	Persentase pelayanan kesehatan PPK BLUD Puskesmas	100	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga	Persentase PHBS	56.25	Persen	58	60	62	63	63	63	
	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Germas	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Lingkungan Bersih Sehat	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinkes
	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah kecamatan yang dibina	26	Kecamatan	26	26	26	26	26	26	
	Percepatan dan penguatan STBM	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dibina STBM	277	Desa	40	50	60	70	80	80	
	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Persentase Anemia Pada Ibu Hamil	8.07	Persen	7.67	7.27	6.87	6.47	6.07	6.07	Dinkes
		Persentase BBLR	3.09	Persen	2.49	1.81	1.17	0.53	0.11	0.11	
		Persentase balita gizi lebih	1.01	Persen	0.95	0.79	0.63	0.47	0.31	0.31	
		Persentase balita gizi kurus	2.11	Persen	1.01	0.91	0.81	0.71	0.61	0.61	
			Persentase lansia yang mendapat <i>screening</i> kesehatan	54.20	Persen	100.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Percepatan Perbaikan Gizi untuk Penanggulangan Stunting	Cakupan keluarga Baduta stunting mendapat pendampingan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Pra Sekolah	Persentase pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Pra Sekolah	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pelayanan kesehatan keluarga terstandar	Cakupan orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan terstandar	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Sarana Air Minum yang terbangun	70	Persen	80	83	85	87	90	90	Perkimtan
	Penunjang Program PAMSIMAS	Persentase fasilitasi program PAMSIMAS	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Penunjang Program SANIMAS	Persentase fasilitasi program SANIMAS	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Penunjang Program KOTAKU	Persentase fasilitasi program KOTAKU	100	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Pembangunan Sarana Sanitasi dasar (IPAL dan MCK)	Jumlah sanitasi berbasis masyarakat yang dibangun	n/a	Unit	3	3	3	3	5	17	
	Peningkatan SPAM Perdesaan	Jumlah sarana air minum (air tanah dalam) yang terbangun	n/a	Unit	254	200	300	300	300	1354	
	Peningkatan SPAM Perdesaan khusus	Jumlah sarana sanitasi (septik tank) yang terbangun	n/a	Unit	1007	975	985	995	1000	4962	
	Program Penanganan dan pengembangan perumahan dan Kawasan Pemukiman	Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80.00	Persen	80.13	80.30	80.48	80.67	80.87	80.87	Perkimtan
	Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RUTILAHU)	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	n/a	Unit	240	238	238	238	238	1192	
	Urusan Sosial										
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima bantuan program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial sejenisnya	1.71	Persen	2.86	4.01	5.18	6.33	7.49	7.49	Dinsos P3A
	Pemberdayaan PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pembinaan UEP	371	Orang	79	20	10	30	15	154	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah kelompok yang dibina	n/a	Kelompok	2	2	2	2	1	9	
	Pemberdayaan Sosial KUBE Keluarga Miskin	Jumlah kelompok yang diberdayakan melalui program KUBE	97	kelompok	5	5	6	5	7	28	
	Program Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima jaminan sosial	52.14	Persen	53.24	53.24	53.24	53.24	53.24	53.24	Dinsos P3A
	Pendampingan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Jumlah kepala keluarga yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya	3013	KK	400	600	600	600	600	2800	
	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah kepala keluarga yang menerima bantuan sosial pangan non tunai (Rastra)	81528	KK	100743	100743	100743	100743	100743	100743	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Pelayanan Jamkesda	Persentase pelayanan masyarakat miskin yang mengajukan Jamkesda	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga penerima manfaat PKH	51033	KPM	62000	61323	61323	61323	61323	61323	
	Peningkatan Peran Mitra Sosial dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan	Jumlah mitra dalam penanganan bidang sosial dan kesehatan	262	Orang	262	262	262	262	262	262	
	Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan jaminan kesehatan yang terintegrasi sistem JKN	38297	Orang	10000	10000	10000	10000	10000	50000	
	Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah penyandang disabilitas berat dan lanjut usia tidak potensial yang menerima Jaminan	261	Orang	261	261	261	261	261	1305	
	Jaminan Sosial bagi Korban Bencana Setelah Tanggap Darurat Bencana	Jumlah korban bencana yang menerima jaminan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Jumlah dokumen basis data terpadu	1	Dokumen	1	1	1	1	1	5	
	Program Perlindungan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinsos P3A
	Penanganan Masalah-masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Penanganan Masalah - Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kejadian bencana alam dan bencana sosial	70	Kejadian	70	70	70	70	70	350	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar	8.53	Persen	16.88	26.17	35.36	44.79	54.28	54.28	Dinsos P3A
		Persentase Tuna Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	2.77	Persen	11.17	20.74	29.79	40	51.60	51.60	
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	5.73	Persen	14.89	24.05	33.21	42.37	53.05	53.05	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0.68	Persen	10.61	20.54	30.47	40.41	50.34	50.34	
		Persentase PMKS yang direhabilitasi	n/a	Persen	10	20	30	40	50	50	
	Rehabilitasi Sosial PMKS	Persentase PMKS (penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial terlantar) yang direhabilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah	Jumlah klien yang dilayani	40	Orang	50	50	50	50	50	250	
	Penanganan PMKS Jalanan	Jumlah PMKS jalanan yang ditangani	46	Orang	46	65	65	65	65	306	
	Penyuluhan Rehabilitasi Sosial Keliling	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan rehabilitasi sosial	n/a	Orang	100	100	100	100	100	100	
	Rehabilitasi Sosial Keliling	intensitas penanganan klien	120	Kali	120	120	120	120	120	600	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang menerima bantuan Kebutuhan dasar	190	Orang	20	20	20	20	30	110	
	Bimbingan Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang menerima bimbingan sosial	n/a	Orang	20	20	20	30	30	120	
	Rehabilitasi Tuna Susila	Jumlah tuna susila yang menerima bantuan kebutuhan dasar	20	Orang	20	20	20	20	20	100	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Terlantar	Jumlah gelandangan, pengemis dan pemulung terlantar yang menerima bantuan sosial	n/a	Orang	10	10	10	10	10	50	
	Rehabilitasi Sosial Eks Warga Binaan Perumahan	Jumlah eks warga binaan yang menerima bantuan Sosial	n/a	Orang	20	20	20	20	20	100	
	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial	26	Orang	20	20	20	25	25	110	
	Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang menerima bantuan sosial	19	Orang	10	10	10	10	10	50	
	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima bantuan kebutuhan dasar	126	Orang	20	20	20	50	30	140	
	Penyusunan Kebijakan Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial	n/a	Perda	1	0	0	0	0	1	
	Penyediaan Sarana Usaha bagi Keluarga PCB dan Lanjut Usia Tidak Potensial	Jumlah keluarga PCB dan lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan usaha	n/a	Orang	20	20	20	20	20	100	
	Pelayanan Terpadu Fakir Miskin dan Lansia	Jumlah sarana dan prasarana	n/a	Paket	1	1	1	1	1	5	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif	50	Persen	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	Dinsos P3A
	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan/ dibina	6	Jenis	5	5	5	5	5	5	
	Penguatan Peranan Karang Taruna di Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah pengurus karang taruna yang dibina	26	Orang	50	50	50	50	50	250	
	Penguatan Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang dibina	26	Orang	26	26	26	26	26	26	
	Penguatan Peranan LKS, LK3 dan Peksos	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	3	Lembaga	3	3	3	3	3	3	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Penguatan Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang dibina	277	Orang	70	70	70	70	67	347	
	Rumah Besar Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	Jumlah puskesmas yang dibentuk di setiap desa	n/a	Puskesmas	6	64	70	70	67	277	
	Urusan Tenaga Kerja										
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang bersertifikat	60	Persen	100	100	100	100	100	100	Disnaker Trans
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	160	Orang	160	240	240	240	240	1120	
	Penguatan Calon Tenaga Kerja Berbasis Kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	32	Orang	32	42	42	42	42	200	
	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlatih yang mendapat uji kompetensi	20	Orang	20	40	40	40	40	180	
	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan masyarakat	32	Orang	32	42	42	42	42	200	
	Peningkatan Kualitas dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Lokal	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	32	Orang	32	32	32	32	32	160	
	Pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	192	Orang	192	192	192	192	192	960	
	Penguatan kompetensi calon tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	64	Orang	64	64	64	64	64	320	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20	Persen	20	20	20	20	20	20	Disnaker Trans
	Pelayanan dan penempatan pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	1969	Orang	1969	1969	1969	1969	1969	9845	
	Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	32	Orang	32	32	32	32	32	160	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Bimbingan Inkubasi Bisnis Berbasis Potensi Persiapan Pra Purna Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100	Persen	100	100	100	100	100	500	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100	Persen	100	100	100	100	100	500	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak yang ditangani	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinsos P3A
		Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan Sekolah Ramah Anak	3.85	Persen	19.23	30.77	42.31	53.85	73.08	73.08	
	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase layanan perlindungan perempuan dan anak	57	Kasus	50	50	50	50	50	250	
	Pencegahan Kekerasan termasuk TPPO Terhadap Perempuan dan Anak	Intensitas sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	n/a	Kali	1	1	1	1	1	5	
	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi keluarga	12.84	Persen	13.96	15.07	16.19	17.31	18.42	18.42	Dinsos P3A
	Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa yang dibina melalui program P2WKSS	18	desa	1	1	1	1	1	5	
	Peningkatan Manajemen Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Intensitas peningkatan kelompok PEKKA	4	Kali	1	1	1	1	1	5	
	Pemberdayaan Perempuan Dalam Keluarga	Jumlah perempuan yang dibina	100	Orang	100	100	100	100	100	500	
	Peningkatan Peran Perempuan dalam membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah perempuan yang dibina	100	Orang	100	100	100	100	100	500	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Urusan Pangan										
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Persentase ketersediaan pangan utama	100	Persen	100	100	100	100	100	100	Distan KP
Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita		91.5	Persen	92.50	93.50	94.50	95.00	95.50	95.5		
Persentase pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan		100	Persen	100	100	100	100	100	100		
	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah KWT yang difasilitasi	5	Kelompok	5	7	9	11	13	45	
	Pembangunan/Perbaikan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah lumbung pangan masyarakat	26	Unit	2	1	1	1	2	7	
		Jumlah sarana pendukung LPM yang tersedia	26	Paket	2	1	1	1	2	7	
	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	10	Ton	19	20	20	20	20	20	
		Jumlah desa mandiri pangan	1	Desa	1	1	1	1	1	6	
	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah pengembangan diversifikasi pangan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan	5	KWT	5	5	5	5	5	25	
		Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui lomba cipta menu pangan lokal	1	Kali	1	1	1	1	1	5	
		Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan	1	Kali	1	1	1	1	1	5	
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam rangka mendukung Program P2WKSS	Jumlah model pekarangan pangan	1	KWT	1	1	1	1	1	5	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal	Jumlah peningkatan kelompok pengolah bahan pangan potensi lokal	5	Kelompok	5	5	5	5	5	25	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	81	Persen	94	94	97	97	97	97	Disduk Capil
		Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	74	Persen	86	86	86	88	88	88	
	Percepatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan kartu keluarga dan cakupan penerbitan KTP elektronik	81	Persen	94	94	97	97	97	97	
	Percepatan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran 0-18 Tahun	74	Persen	86	86	86	88	88	88	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan	30	Persen	33	36	39	42	45	45	DPMD
	Partisipasi Masyarakat melalui BSMSS	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	15	Persen	30	30	30	30	30	30	
	Partisipasi Masyarakat melalui TMMD	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	15	Persen	25		15		15	15	
	Partisipasi Masyarakat melalui BBGRM	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	10	Persen	10	10	10	10	10	10	
	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah keluarga yang dibina	n/a	KK	500	500	500	500	500	500	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif	50	Persen	95	100	100	100	100	100	DPMD
	Pembinaan BUMDes	Jumlah BUMDes yang dibina	n/a	Bumdes	30	45	50	50	50	225	
	Pembinaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Dana Bergulir	Jumlah UPK/UPBD yang dibina	n/a	UPK	23	23	23	23	23	23	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	(UPDB)										
	Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa Lainnya	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan lainnya yang dibina	n/a	Unit	20	20	20	20	20	100	
	Pembinaan Pengelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah kelompok pengelola SDA yang dibina	n/a	kelompok	10	10	10	10	10	50	
	Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	n/a	kelompok	2	2	2	3	3	12	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
	Program kependudukan dan keluarga berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	72.8	Persen	74.47	74.77	75.07	75.37	75.67	75.67	DPPKB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8.37	Persen	9.08	9.07	9.06	9.05	9.04	9.04	
	Pelayanan KB keliling	Jumlah akseptor KB IUD	n/a	Orang	1470	1544	1543	2312	2543	9412	
		Jumlah akseptor KB Implant	n/a	Orang	1225	1286	1286	1927	2110	7834	
	Pelayanan KB medis operasi dan metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah akseptor MOW	n/a	Orang	98	135	135	162	170	700	
		Jumlah akseptor MOP	n/a	Orang	5	7	7	7	10	36	
	Penguatan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	n/a	Kampung	1	1	1	2	2	7	
	Program Ketahanan Keluarga	Cakupan kelompok bina keluarga balita (BKB) yang aktif	68.94	Persen	70	72	72.51	72.81	73.11	73.11	DPPKB
		Cakupan kelompok bina keluarga remaja (BKR) yang aktif	64.37	Persen	65	65.62	65.8	66	66.32	66.32	
		Cakupan kelompok bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	62.81	Persen	63	63.41	63.6	63.82	64.1	64.1	
		Cakupan keluarga pra sejahtera dan KS 1 yang menjadi anggota UPPKS	49.62	Persen	50.07	51.93	53.79	55.65	57.51	57.51	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Pembinaan Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang dibina	n/a	Kelompok	40	21	23	32	34	150	
		Jumlah kader BKL dan BKB yang dibina	n/a	Orang	125	59	63	93	101	441	
	Pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah peningkatan status kelompok UPPKS	n/a	Kelompok	21	21	21	24	27	114	
		Jumlah kader UPPKS yang dilatih	n/a	Orang	20	20	20	23	26	109	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
	Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif	423	Koperasi	449	458	467	476	485	485	DKUKM Perindag
	Peningkatan akses pembiayaan koperasi	Jumlah koperasi yang mengakses sumber pembiayaan	50	Koperasi	6	6	6	6	6	30	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi	Peningkatan jumlah koperasi besar	8	Koperasi	10	12	14	16	18	18	DKUKM Perindag
	Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan Koperasi	Jumlah koperasi yang mengembangkan jaringan usaha dan/atau melakukan kemitraan dengan lembaga usaha lainnya	40	Koperasi	5	5	5	5	5	25	
	Peningkatan Kewirausahaan Koperasi	Jumlah koperasi yang berhasil meningkatkan kapasitas dan/atau jenis usaha	50	Koperasi	10	10	10	10	10	50	
	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM	15467	UMKM	15517	15567	15617	15667	15717	15717	
	Kegiatan Pelatihan Kemasan Produk UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kemasan	150	UMKM	20	25	30	35	40	150	
	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah wirausaha baru yang mengikuti pelatihan	50	UMKM	50	50	50	50	50	250	
	Kegiatan Pemberdayaan UMKM	Jumlah UMKM yang telah dibina	150	UMKM	25	30	35	40	50	180	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Kegiatan Sosialisasi Akses Permodalan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi akses permodalan	0	UMKM	25	30	35	40	45	175	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jml UMKM yang mendapat bantuan Sapras	2566	UMKM	3530	4561	5659	6824	8056	8056	DKUKM Perindag
	Kegiatan Pengembangan Kredit Usaha Mikro Kecil Program KUSUMA	Jumlah UMKM yang mengakses permodalan	658	UMKM	120	130	140	150	160	700	
	Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Bantuan Sarana Produksi UMKM	Jumlah UMKM yang menerima bantuan sarana produksi	40	UMKM	8	8	8	8	8	40	
	Kegiatan Pengembangan Jaringan dan Kemitraan UMKM	Jumlah UMKM yang telah bermitra dengan pelaku usaha besar	150	UMKM	20	25	30	35	40	150	
	Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil Program Kusuma	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan dana bergulir Program Kusuma	658	UMKM	200	200	200	200	200	1000	
	Urusan Pariwisata										
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	7	Sub Sektor	10	12	16	16	16	16	Disparbud Pora
	Pelatihan Teknis para pelaku Ekonomi kreatif masyarakat	Jumlah para pelaku sub sektor ekonomi kreatif masyarakat yang dibina	n/a	Orang	200	200	200	200	200	1,000	
	Urusan Pertanian										
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah peningkatan kelompok tani pengolah hasil pertanian	105	Kelompok	120	138	157	179	206	206	Distan KP
	Kegiatan Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Tanaman Pangan	Jumlah kelompok tani budidaya tanaman pangan menjadi kelompok pengolah hasil Tanaman Pangan yang mendapatkan bantuan sarana prasarana penanganan panen, pasca panen dan pengolahan	64	Kelompok	3	3	3	3	3	15	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Kegiatan Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	Jumlah kelompok tani budidaya tanaman pangan menjadi kelompok pengolah hasil Tanaman Pangan yang mendapatkan bantuan sarana prasarana penanganan panen, pasca panen dan pengolahan	8	Kelompok	2	2	2	2	2	10	
	Kegiatan Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	Jumlah kelompok tani budidaya tanaman pangan menjadi kelompok pengolah hasil Tanaman Pangan yang mendapatkan bantuan sarana prasarana penanganan panen, pasca panen dan pengolahan	6	Kelompok	3	3	3	3	4	16	
	Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau Mole dan Tembakau Hitam	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan pemerintah	15	Kelompok	15	15	14	14	14	72	
	Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kopi	Jumlah Kelompok Petani Perkebunan Yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah	10	Kelompok	14	15	16	17	18	80	
	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terbina	75	Unit	84	100	100	100	100	100	Disnakan
	Pembinaan dan Pengembangan pengolahan hasil peternakan	Jumlah produk	2 dari 10	Jenis	2	2	2	2	2	10	
	Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah kegiatan	0 dari 10	Kali	2	2	2	2	2	10	
	Pengembangan Kemitraan Usaha Peternakan	Jumlah pelaku usaha	0 dari 60	Orang	10	12	12	13	13	60	
	Urusan Perdagangan										
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang dibina	1503	Orang	5043	5884	6724	7565	8405	8405	DKUKM Perindag
		Jumlah Kawasan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk	0	Wilayah	1	2	3	4	5	5	

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Data Capaian Awal	Satuan	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2019	2020	2021	2022	2023		
	Bintek Para Pedagang Pasar Rakyat	Jumlah pelaku usaha perdagangan di pasar rakyat yang dibina	50	Orang	50	50	50	50	50	250	
	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Kabupaten Sumedang	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	30	Orang	30	30	30	30	30	150	
	Urusan Perencanaan										
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial	Persentase Ketercapaian Target Program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial berkategori "Baik"	98	Persen	100	100	100	100	100	100	Bappeda
	Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah dokumen laporan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah	1	Dok	1	1	1	1	1	6	
	Urusan Administratif Pemerintahan										
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase cakupan pengaduan hukum yang ditindak lanjuti	80	Persen	100	100	100	100	100	100	Setda
	Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin	Jumlah fasilitasi pemberian bantuan hukum untuk orang/kelompok miskin	10	Perkara	5	5	5	5	5	35	

BAB V PENUTUP

Upaya Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan secara sinergis multi sektor dan multi pihak serta dilakukan secara terencana dan terkoordinir dengan baik. TKPKD harus berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

TKPKD harus dapat mengajak dan melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi sosial, filantropi bisnis dan lain-lain dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan prinsip kolaborasi dengan dasar modal sosial. Dengan demikian diharapkan terjadi akselerasi dalam penurunan angka Kemiskinan yang saat ini mengalami stagnasi.

Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan dan warna dalam dokumen perencanaan yang lebih luas dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Lebih luas, RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat sehingga tercipta sinergitas dan harmonisasi perencanaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

